

DR. ANANG SUTONO, CHE

PARIWISATA DAN KETAHANAN NASIONAL

PENGUKURAN KETAHANAN DESTINASI PARIWISATA
BERBASIS ASTAGATRA



Kontributor:
Fajar Aditya Nugroho, S.Par
Dyah Ayu Kumala Dewi, S.Par

IMAGE SOURCE: INDONESIA TRAVEL

PARIWISATA DAN KETAHANAN NASIONAL

Pengukuran Ketahanan Destinasi Pariwisata Berbasis Astagatra



Dr. Anang Sutono, CHE adalah dosen Manajemen Bisnis Pariwisata di Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan sebelumnya bertugas sebagai Staff Ahli Menteri Pariwisata Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua STP NHI Bandung dari tahun 2014 - 2018 dan merupakan alumni dari PPSA XXI - 2017 LEMHANNAS RI. Penulis merupakan pendiri PT. Mandapa Tourism Indonesia. Penulis juga sebagai *International Journal Reviewer* dan *Writer*, dan pernah menjadi pembicara di beberapa forum internasional di antaranya United Kingdom, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, India, China, Hong Kong, Papua New Guinea, Thailand, Philippines, United Arab Emirates, Spain dan France.



Fajar Aditya Nugroho, S.Par adalah lulusan Program Studi Destinasi Pariwisata di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Saat ini, kontributor tengah menyelesaikan studi jenjang magister pada Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung yang dibiayai oleh beasiswa LPDP. Kontributor telah beberapa kali melakukan penelitian yang terfokus pada bidang kajian manajemen destinasi pariwisata dan pariwisata berkelanjutan. Beberapa hasil kajian kontributor telah terpublikasi baik di jurnal nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan telah kontributor raih seperti Pemenang II Duta Bahasa Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Terbaik VI Duta Bahasa Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.



Dyah Ayu Kumala Dewi, S.Par adalah Sarjana Pariwisata dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Kontributor telah melakukan beberapa penelitian di bidang pariwisata. Salah satu penelitiannya telah disajikan dalam forum internasional "*The 2nd International Hospitality Entrepreneurship and Innovation Conference*" di tahun 2022. Ruang lingkup penelitiannya beragam; mulai dari *Geotourism* hingga *Creative Tourism*. Penelitian terbarunya mempelajari transformasi wisatawan selama kegiatan wisata kreatif mereka. Kontributor juga pernah dipercaya menjadi pembicara dalam pelatihan untuk masyarakat.

Penerbit

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Pariwisata NHI Bandung

Jl. Dr. Setiabudhi No. 186, Bandung, Jawa Barat
Email: litabmas@stp-bandung.ac.id



PARIWISATA DAN KETAHANAN NASIONAL

**PENGUKURAN KETAHANAN DESTINASI PARIWISATA
BERBASIS ASTAGATRA**

Dr. Anang Sutono, CHE

Kontributor:

Fajar Aditya Nugroho, S.Par dan Dyah Ayu Kumala Dewi, S.Par

PARIWISATA DAN KETAHANAN NASIONAL

Pengukuran Ketahanan Destinasi Pariwisata Berbasis Astagatra

**Copyright © 2023, Anang Sutono – Puslitabmas Politeknik
Pariwisata NHI Bandung**

Penulis : Anang Sutono
Kontributor : Fajar Aditya Nugroho
Dyah Ayu Kumala Dewi
Penyunting : Taufik Dwicahyono
Sumaryadi
Haryadi Darmawan
Penata Letak : Fajar Aditya Nugroho
Desain Sampul : Dyah Ayu Kumala Dewi
Mayang Anggani

Diterbitkan oleh:

**Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Pariwisata NHI Bandung**

Jl. Dr. Setiabudhi No. 186, Bandung, Jawa Barat

Email: litabmas@stp-bandung.ac.id

Cetakan Pertama, Februari 2023

339 hlm; 15,5 cm x 23 cm



Persembahan,

Buku ini dipersembahkan pada Miem, Mas Mul, Aqsha, Keluarga besar H. Kasno Surodimedjo dan Keluarga besar R.H Hidayat yang selalu memberi semangat dengan tulus., Semoga selalu dalam keberkahan Allah SWT, Aamiin.

PRAKATA

“Life doesn’t get easier or more forgiving, we get stronger and more resilient.” -- Steve Maraboli, *Life, the Truth, and Being Free* (1999). Sebuah untaian kata sederhana namun sarat akan makna dan motivasi, mengingatkan kita bahwasanya segala hal dalam kehidupan di dunia akan semakin sulit dan memaksa kita untuk terus meningkatkan daya saing dan kapasitas diri guna beradaptasi dan membangun sebuah ketahanan. Dari petikan tersebut pulalah yang mengantarkan penulis untuk membuat sebuah karya berupa buku yang berjudul “Pariwisata dan Ketahanan Nasional: Pengukuran Ketahanan Destinasi Pariwisata Berbasis Astagatra” ini.

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah buku ini dapat tersusun dan terselesaikan tanpa suatu hambatan berarti. Kendati melalui proses yang tak singkat dan tak mudah, namun nyatanya buku ini dapat dituntaskan dan mencapai tangan pembaca.

Berangkat dari kemirisan penulis pada kondisi kepariwisataan Indonesia yang terpuruk pasca pandemi global Covid-19 yang mendera seluruh negara di dunia dan mengharuskan adanya restriksi perjalanan, penulis menilai bahwa sudah seharusnya tiap-tiap destinasi wisata di Indonesia dapat mandiri dan memiliki ketahanan yang baik khususnya dalam menghadapi krisis, sehingga ketika

terjadi krisis kembali di masa mendatang, kita telah siap dan kuat untuk terus bertahan.

Berbicara mengenai ketahanan sebuah destinasi pariwisata tentunya tak lepas dari paradigma ketahanan nasional. Ketahanan nasional secara konseptual merupakan sudut pandang pengembangan wilayah baik nasional maupun regional yang sudah sepatutnya dikaji secara holistik dan diimplementasikan secara komprehensif guna menyiapkan diri dari segala ancaman dan hambatan yang terus mengincar. Terlebih dengan kondisi Indonesia yang secara geografis dan politis memiliki posisi yang amat strategis di dunia.

Pemerintah Republik Indonesia sejatinya memahami secara serius mengenai pentingnya menjaga dan memperkuat ketahanan nasionalnya. Hal ini dapat secara eksplisit dilihat dari berdirinya Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) yang didirikan sejak Tahun 1965 dan secara khusus didirikan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional dari berbagai sektor dan berbagai skala melalui berbagai pendekatan. Salah satu produk yang berhasil dirumuskan oleh LEMHANNAS dalam mengevaluasi ketahanan nasional Indonesia ialah adanya konsep Tri Gatra dan Panca Gatra yang selanjutnya digabungkan menjadi satu model utuh yakni Astagatra Ketahanan Nasional yang menjadi alat penting dalam mengukur dan mengkaji ketahanan destinasi pariwisata nasional.

Pariwisata, yang merupakan salah satu sektor unggulan dan kian waktu kian dipandang sebagai sektor yang amat layak untuk diprioritaskan pengembangannya, sudah sepantasnya dikaji ketahanannya, terutama menimbang sifat dari sumber daya pariwisata yang rentan terhadap perubahan dan degradasi nilai. Di Indonesia sendiri, pariwisata merupakan satu-satunya sektor yang diharapkan menjadi penyumbang devisa negara terbesar dan menjadi tumpuan negara, menggantikan sektor migas dan perkebunan.

Namun, nyatanya dalam perjalanan sejarahnya pariwisata kerap kali dihadang dan dirugikan oleh terjadinya berbagai macam krisis, baik skala lokal, regional, maupun nasional. Dengan sifatnya yang rentan dan sangat sensitif terhadap dinamika, pariwisata harus memiliki tumpuan secara konseptual dan praktikal untuk dapat menjadi sektor yang dapat membentuk ketahanannya sendiri. Oleh karenanya, penyusunan alat maupun model ketahanan pariwisata terutama dalam lingkup destinasi wisata mutlak diperlukan.

Melalui pendekatan Astagatra yang merupakan model utuh ketahanan nasional Indonesia, dalam buku ini selanjutnya akan dibahas secara detail mengenai latar belakang, proses, langkah, serta target luaran untuk mengukur ketahanan destinasi pariwisata di Indonesia. Harapannya ialah bahwa buku ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi tiap-tiap pengelola destinasi wisata di Indonesia untuk dapat melakukan self-assessment terhadap ketahanan

destinasi wisata mereka sendiri, dan dapat merumuskan strategi yang tepat untuk menyikapi luaran/ hasil penilaian mandiri tersebut.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Direktur dan seluruh jajaran pimpinan dan segenap civitas akademika Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Alumni PPSA-XXI LEMHANNAS-RI 2017 serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor yang telah secara sungguh-sungguh menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya demi terwujudnya buku ini.

Harapan terbesar penulis ialah bahwasanya dengan dituntaskannya penyusunan buku ini dapat menjadi acuan dalam mendefinisikan bentuk ideal pengelolaan destinasi wisata yang memiliki ketahanan terhadap segala bentuk ancaman, maupun menjadi panduan dalam menyusun strategi dalam mencapai kondisi ideal tersebut sesuai dengan karakteristik destinasi itu sendiri. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap khasanah literatur kepariwisataan dan menjadi acuan akademik yang relevan terhadap konteks perkembangan kepariwisataan nasional dan global. Terakhir, penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata baik bagi akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, masyarakat, media, maupun politisi dalam memetakan perannya.

Penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya terdapat kesalahan, kekeliruan, serta kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan umpan balik yang membangun dari seluruh pembaca demi kepentingan perbaikan muatan dan kemasan buku ini sehingga dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi khalayak yang lebih luas ke depannya. Semoga buku ini memberikan sumbangsih bagi peningkatan ketahanan destinasi pariwisata di Indonesia yang tentunya akan berimplikasi pula terhadap peningkatan ketahanan nasional Indonesia.

Insha Allah, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan pengabdian tiada henti kepada negara yang amat kita cintai dan banggakan, Indonesia. Ini semua demi tercapainya cita-cita luhur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI.

Bandung, Februari 2022

Dr. Anang Sutono, CHE



SAMBUTAN PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada *ALLAH subhānahu wata'ālā* Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku Pariwisata dan Ketahanan Nasional: Pengukuran Ketahanan Destinasi Pariwisata Berbasis Astagatra dapat rampung dengan baik.



Kepariwisataan sejatinya merupakan sektor yang secara alamiah sangat bergantung pada interaksi dan mobilitas manusia. Karena itu restriksi perjalanan yang diberlakukan beberapa tahun terakhir untuk mengurangi laju penularan pandemi COVID-19 telah melumpuhkan sektor kepariwisataan dunia. Bahkan tahun 2020 disebut *World Tourism Organization* sebagai *the Worst Year in Tourism History*.

Menyadari kompleksitas problematika yang ada, kehadiran perangkat maupun model untuk mengukur ketahanan destinasi pariwisata menjadi mutlak diperlukan. Atas dasar tersebut, kehadiran buku ini dapat menjadi oase dalam upaya pentahelix kepariwisataan nasional dalam meningkatkan ketangguhan destinasi pariwisata.

Lebih dari itu buku ini berhasil menjabarkan secara komprehensif dan mendalam pilar Trigatra serta Pancagatra yang dirangkum dalam konsep Astagatra dan korelasinya dengan isu-isu kepariwisataan kontemporer. Secara akademis konsep Astagatra merupakan tulang punggung dalam menjaga ketahanan nasional menghadapi ancaman krisis multidimensional, dan membuka lapangan pekerjaan, utamanya di era Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA) yang disruptif.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anang Sutono dan seluruh kontributor atas sumbangan berharganya dalam khazanah ilmu pengetahuan nasional. Semoga dengan terbitnya karya ini dapat menjadi rujukan bagi pentahelix kepariwisataan nasional untuk menghasilkan parekras yang unggul, yang akan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, dan pada akhirnya mampu memberikan dampak bagi pemulihan kepariwisataan nasional yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan inklusif dalam upaya memastikan bahwa *no one left behind*.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Sandjaja Saifuddin Uno



SAMBUTAN PENGANTAR
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG
BUKU PARIWISATA DAN KETAHANAN NASIONAL: PENGUKURAN KETAHANAN DESTINASI
PARIWISATA MELALUI PENDEKATAN ASTRA GATRA
KARYA Dr. ANANG SUTONO, MM.Par., CHE.

Pandemi covid-19 yang sempat melanda dunia telah menimbulkan dampak besar bagi sektor pariwisata. Berdasarkan data *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), pandemi berdampak pada penurunan pendapatan global sekitar USD 2 triliun dari sektor pariwisata. Sementara itu, penurunan *traffic* wisatawan mancanegara secara signifikan sebesar 80 persen yang berdampak pada lebih dari 100 juta orang secara langsung atau tidak langsung yang bekerja di industri pariwisata.

Para pelaku industri di sektor pariwisata pun dituntut untuk mampu beradaptasi dalam menghadapi tantangan pasca pandemi untuk dapat berbenah dan bangkit kembali. Oleh karena itu, destinasi pariwisata didorong untuk memperkuat ketahanan sebagai salah satu pilar pemulihan pasca pandemi. Konsepsi ketahanan nasional pun menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergi dari seluruh bidang dan sektor pembangunan, termasuk pembangunan pariwisata.

Dalam kesempatan ini, saya menyambut baik sekaligus mengapresiasi terbitnya buku *Pariwisata dan Ketahanan Nasional: Pengukuran Ketahanan Destinasi Pariwisata Melalui Pendekatan Astra Gatra* yang ditulis oleh Dr. Anang Sutono, MM.Par., CHE., selaku dosen Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Melalui karya ini, para pembaca akan mendapatkan sudut pandang perspektif mengenai ketahanan destinasi pariwisata yang dikaji berdasarkan 8 (delapan) unsur dominan dari Parameter Astagatra sebagai aspek kehidupan nasional Indonesia, yaitu geografi negara, sumber kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi kalangan institusi pendidikan pariwisata, para pemangku kepentingan, pemerhati, dan praktisi pariwisata, dalam upaya meningkatkan pembangunan dan ketahanan, khususnya pembangunan bidang pariwisata guna meningkatkan perekonomian ketahanan nasional.



Bandung, Februari 2023


Andar Danova L. Goeltom, S.Sos., M.Sc.

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
SAMBUTAN PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PERSPEKTIF, ISU, TREN, TANTANGAN, DAN PELUANG KETAHANAN NASIONAL	1
1. Isu-Isu Global	1
a. Pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pemulihan kondisi global pasca krisis	1
b. Pemulihan pariwisata pasca krisis sebagai prioritas utama	10
c. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	17
2. Isu-Isu Nasional	20
a. Pariwisata sebagai isu strategis nasional	20
b. Pengembangan Destinasi Prioritas Nasional	25
c. Perkembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Indonesia	29
3. Prasyarat Ketahanan Destinasi Pariwisata	37
a. Keamanan dan Keselamatan	37
b. Komitmen Global dalam Kepariwisata	42
c. Pariwisata yang Berkualitas	49
d. Teknologi Kepariwisata	52
BAB II KONSTRUKSI KETAHANAN DESTINASI PARIWISATA	58
1. Konsepsi Ketahanan Nasional	58
2. Ketahanan Destinasi Pariwisata	78

3. <i>Destination Management Organization</i>	88
4. Konsepsi Sistem Manajemen Organisasi	101
5. <i>Digital Maturity</i>	107
6. <i>Smart Destination</i>	111
7. Ekonomi Hijau dan Pariwisata	117
BAB III PENGUKURAN KETAHANAN DESTINASI PARIWISATA	131
1. Pilar Ideologi	132
a. Gagasan dan Keyakinan Kolektif	133
b. <i>Strong Notions</i> (Ide yang Kuat)	136
2. Pilar Politik	139
a. Hukum dan Kebijakan	142
b. Stabilitas Pemerintahan	149
3. Pilar Ekonomi	157
a. Pendapatan Domestik Bruto Pariwisata	158
b. <i>Tourist Expenditure</i> (Pengeluaran Wisatawan)	167
c. Ketenagakerjaan di Bidang Pariwisata	175
4. Pilar Sosial dan Budaya	182
a. Warisan Budaya	183
b. Partisipasi Masyarakat	192
c. <i>Governance</i> (Tata kelola yang baik)	198
5. Pilar Pertahanan Keamanan	203
a. Manajemen Keamanan dan Keselamatan	205
b. Manajemen Krisis	209
c. Manajemen Bencana	215
6. Pilar Sumber Daya Alam	220
a. Ekosistem Lingkungan	221

b. Gerakan yang Berwawasan Lingkungan	230
c. Manajemen Energi, Air, dan Limbah	234
7. Pilar Demografi	242
a. Populasi	243
b. Tingkat Migrasi	248
c. Tingkat Pendidikan	253
8. Pilar Geografi	257
a. Spasial Pariwisata	258
b. Ekologi Pariwisata	261
BAB IV NILAI MANFAAT PARIWISATA	267
1. Nilai Manfaat Ekonomi	268
2. Nilai Manfaat Lingkungan	272
3. Nilai Manfaat Sosial	276
4. Nilai Manfaat Budaya	280
5. Nilai Manfaat Pengetahuan	283
BAB V PENUTUP	287
1. KESIMPULAN	287
2. SARAN	291
DAFTAR PUSTAKA	295

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hirarki Kebutuhan Maslow	2
Gambar 2. Penurunan GDP Beberapa Negara Pada Masa Krisis 1997-1998	3
Gambar 3. Grafik Pertumbuhan Jumlah Pemesanan Perjalanan Daring pada Tahun 2003-2004	5
Gambar 4. Dinamika Pertumbuhan GDP Pariwisata Global yang Mengalami Kemerostan di Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19	7
Gambar 5. Visa “ <i>Welcome Stamp</i> ” Guna Memulihkan Pariwisata di Negeranya	12
Gambar 6. Komponen Pariwisata Berkelanjutan	18
Gambar 7. <i>Eco Resort</i> Pulau Macan sebagai bentuk dari Usaha Pariwisata Berkelanjutan	20
Gambar 8. Tema dan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021	22
Gambar 9. Desa Wisata Penglipuran, Salah Satu Desa Wisata Mandiri Di Indonesia	34
Gambar 10. Penganugerahan ADWI Tahun 2022	36
Gambar 11. Kedudukan STDGs dan SDGs	44
Gambar 12. Laman Resmi Kepariwisataan Indonesia	54
Gambar 13. Pengambilan Keputusan Wisatawan terhadap Destinasi Wisata	56
Gambar 14. <i>Tourism Resilience Roadmap</i>	80
Gambar 15. ITDC (<i>Indonesia Tourism Development Corporation</i>) sebagai salah satu DMO yang berhasil mengembangkan Nusa Dua dan Mandalika	90

Gambar 16. Perbandingan Unit Bisnis dengan berbagai level kematangan digital	110
Gambar 17. Visualisasi Konsep Smart Destination	112
Gambar 18. <i>Smart Destination Model</i>	114
Gambar 19. Model Strategi Pengembangan Ekonomi Inklusif Indonesia	125
Gambar 20. Model Ketahanan Destinasi Pariwisata	131
Gambar 21. Data Kedatangan Wisatawan Internasional di Bali (Dalam Ribuan)	153
Gambar 22. <i>FIFA World Cup Qatar 2022</i>	154
Gambar 23. Tourism Working Group G20 2022	155
Gambar 24. Data Pengeluaran Wisatawan Nusantara 2021 berdasarkan Jenis Pengeluaran	168
Gambar 25. Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia	184
Gambar 26. Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Tak Benda	186
Gambar 27. Noken sebagai Warisan Budaya Tak Benda asal Papua	187
Gambar 28. Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Budaya Alam UNESCO	189
Gambar 29. Fase Manajemen Krisis	212
Gambar 30. Kebijakan Bidang Pariwisata Merespon Pandemi COVID-19	214
Gambar 31. Fase Penanganan Bencana di Destinasi Pariwisata	220
Gambar 32. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Indonesia Usia 15 Tahun ke Atas (%) (2019-2022)	255
Gambar 33. Nilai Manfaat Pariwisata	267
Gambar 34. Model Pengukuran Destinasi Pariwisata	288

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Ambang Batas Jumlah Penduduk DKI Jakarta berdasarkan Ketersediaan Air	246
--	-----

BAB I

PERSPEKTIF, ISU, TREN, TANTANGAN, DAN PELUANG

KETAHANAN NASIONAL

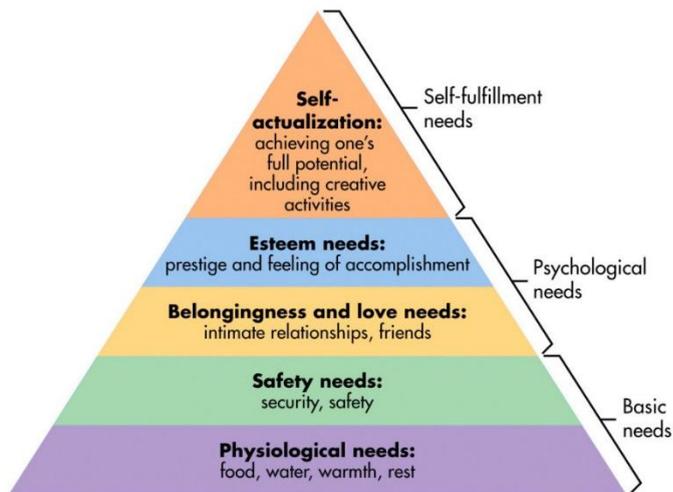
1. Isu-Isu Global

a. Pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pemulihan kondisi global pasca krisis

Pariwisata adalah industri dinamis yang meningkatkan ekonomi dengan menghasilkan pendapatan, lapangan kerja, investasi dan ekspor, sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, setiap orang mengidentifikasi industri pariwisata sebagai katalisator yang signifikan untuk transformasi ekonomi dan sosial negara dan masyarakat yang kurang kaya sumber daya. Selain itu, pariwisata merupakan dasar untuk hubungan internasional, bisnis dan pemahaman lintas budaya, promosi komunitas global, pemahaman dan perdamaian internasional, peningkatan standar hidup, perdagangan lokal dan industri, pelestarian warisan dan tradisi dll (Goeldner & Ritchie, 2012).

Namun, nyatanya kedinamisan sektor pariwisata memiliki implikasi negatif pula. Dengan sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh kondisi global, tren yang sangat cepat untuk

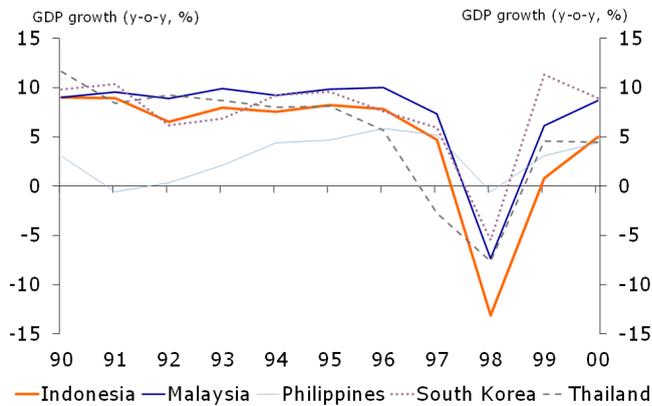
berubah, serta ketergantungannya dengan sektor lain membuat pariwisata menjadi sangat rentan terhadap terjadinya krisis. Terlebih lagi dengan kondisi bahwa mencocokkannya dengan hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow (gambar 1), pariwisata masuk ke dalam kategori *self-esteem* atau pemenuhan diri atas keinginan sementara dan dianggap sebagai hal yang sangat tidak mendasar dalam kebutuhan hidup manusia sehingga jika seseorang memiliki keterbatasan atau menghadapi krisis pribadi, dia cenderung untuk melupakan kegiatan pariwisata dan memenuhi kebutuhan pokok hidupnya (Çınar & Şener, 2021).



Gambar 1. Hirarki Kebutuhan Maslow

(McLeod, 2007)

Dalam sejarahnya, ada banyak sekali kejadian/ kasus yang mengancam eksistensi pariwisata di berbagai wilayah di dunia yang disebabkan oleh krisis, terutama krisis ekonomi. Pada Tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Asia dikarenakan depresiasi nilai tukar mata uang sejumlah negara seperti Thailand, Indonesia dan Korea Selatan mempengaruhi hampir seluruh negara di Asia. Bahkan, krisis moneter ini memberikan pengaruh hingga ke Rusia dan Brazil. Krisis ini membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk pulih secara global dan mengakibatkan merosotnya perjalanan wisata antarnegara.

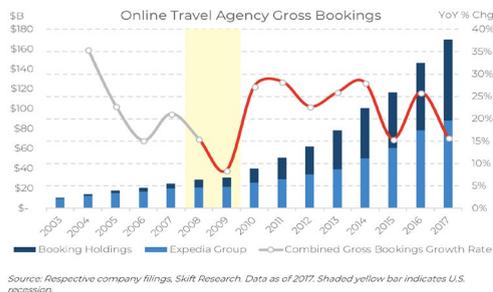


Gambar 2. Penurunan GDP Beberapa Negara Pada Masa Krisis 1997-1998

(Kalf & Weernink, 2016)

Contoh lainnya ialah krisis keuangan global yang terjadi di Tahun 2007 di mana resesi terjadi secara besar-besaran di

hampir seluruh negara di dunia dan merupakan yang terburuk setelah tragedi *The Great Depression* yang terjadi pada Tahun 1929. Resesi ini bermula dari hancurnya sistem perekonomian Amerika Serikat akibat ketimpangan pada sektor pengelolaan dan penetapan standar harga rumah sehingga berdampak pada kebutuhan hidup lainnya yang meningkat. Parahnya, sejak Tahun 2000-2007 Amerika Serikat menyumbang setidaknya sepertiga dari konsumsi global, sehingga permasalahan yang terjadi di Amerika Serikat tersebut tentunya berdampak kepada banyak negara di dunia. Dalam konteks pariwisata, Industri pariwisata global telah melaporkan penurunan penjualan penginapan, layanan makanan, acara, dan produk perhotelan lainnya dan beberapa telah menutup pintunya selamanya. Penurunan tersebut tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya kunjungan ke hotel, restoran, pusat konferensi dan konvensi, dll., tetapi juga dari penurunan yang signifikan dalam pengeluaran rata-rata per tamu (Pizam, 2009).



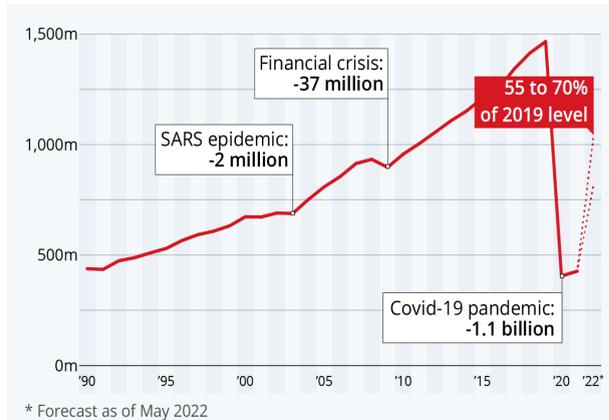
Gambar 3. Grafik Pertumbuhan Jumlah Pemesanan Perjalanan Daring pada Tahun 2003-2004
(Skift Research, 2018)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2007 dan 2008 terjadi kemerosotan dalam pemesanan perjalanan wisata daring (*online*) secara global, dan pulih kembali di Tahun 2010. Hal ini merupakan dampak eksplisit dari adanya resesi global sehingga masyarakat dunia cenderung menunda perjalanan wisata mereka.

Berikturnya, salah satu krisis yang terjadi belakangan ini ialah akibat pandemi Covid-19 yang menjadi permasalahan luar biasa dunia. Merebaknya varian virus Covid-19 yang menjadi epidemi global sejak awal Tahun 2020 menimbulkan berbagai ketidakseniambungan dalam kehidupan. Secara global, terjadinya pandemi akibat Covid-19 membuat sebagian besar negara-negara di dunia mengalami kejatuhan pembangunan. Pandemi Covid-19 menimbulkan adanya prasyarat pembatasan aktivitas dan

kontak fisik antarmanusia yang pada akhirnya menghambat kinerja berbagai sektor pembangunan sebuah negara. Alhasil, siklus perekonomian dunia mengalami kemerosotan drastis yang tentu saja berdampak terhadap ketahanan dari tiap-tiap negara.

Salah satu sektor yang mengalami keterpurukan secara langsung akibat Pandemi Covid-19 ialah pariwisata. Sektor pariwisata yang berorientasi pada perpindahan manusia, jalinan kontak fisik dengan lingkungan, serta aktivitas di khalayak ramai dipaksa untuk berhenti dan dibatasi secara ketat akibat adanya protokol kesehatan yang tak memungkinkan untuk berjalan maksimal seperti sebelumnya. Padahal, dewasa ini sektor pariwisata telah berkembang menjadi sektor unggulan dan prioritas di sejumlah negara di dunia dan dianggap sebagai ekonomi masa depan.



Gambar 4. Dinamika Pertumbuhan GDP Pariwisata Global yang Mengalami Kemerosotan di Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19

Sumber: UNWTO (2022)

Namun, OECD di laman resminya (oecd.org) tepatnya pada artikel berjudul “*A Systemic Resilience Approach to Dealing with Covid-19 and Future Shock*” (OECD, 2020) memaparkan bahwa untuk menyikapi Pandemi Covid-19 dan memulihkan ketahanan nasional sebuah negara yang terpuruk akibatnya, diperlukan pendekatan sistematis dan hirarkis dengan membuat skala prioritas terhadap sektor-sektor yang dianggap tak hanya dapat memulihkan ketahanan secara cepat, namun juga dapat berlanjut secara jangka panjang sehingga dapat menjadi tumpuan nasional, salah satunya melalui sektor pariwisata.

Lalu, mengapa harus melalui pariwisata? UNWTO dalam artikel di laman World Economic Forum (Masterson, 2022) mengemukakan beberapa alasan berikut:

- 1) Pariwisata merupakan salah satu dari tiga sektor ekspor terbesar di dunia

Selama beberapa dekade terakhir, pariwisata melalui cabang-cabang industrinya mengalami peningkatan pesat pada perputaran siklus ekonominya. Tercatat oleh UNWTO pada akhir tahun 2019 pariwisata global meraup keuntungan sebesar 8 triliun dollar Amerika atau sekitar 10,4 % dari pendapatan global dan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi global.

- 2) Pariwisata memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak masyarakat dunia

Pariwisata menyediakan lapangan pekerjaan setidaknya kepada 27,3 juta masyarakat dunia, atau sekitar 10,6 % dari total seluruh lapangan pekerjaan di dunia. Angka ini merupakan angka yang cukup besar mengingat tidak semua negara di dunia telah fokus dan memprioritaskan pengembangan pariwisata di negaranya. Adapun sebagian besar para pekerja tersebut berkarier di bidang penyediaan jasa akomodasi/ perhotelan, makanan dan minuman, manajemen event, serta jasa hiburan lainnya.

3) Pariwisata menunjukkan laju pemulihan yang cukup pesat

UNWTO mencatat hingga kuartar pertama tahun 2022, seluruh destinasi wisata di dunia menerima jumlah kunjungan wisatawan yang sama dengan keseluruhan jumlah kunjungan di tahun 2021 yang mengindikasikan terjadi peningkatan sebesar tiga kali lipat dibandingkan tahun 2021. Hal ini memberi makna bahwa pertumbuhan sektor pariwisata berikut jumlah perjalanan wisata dunia mengalami peningkatan secara signifikan dan tentunya pemulihan sektor pariwisata global menunjukkan tren yang sangat baik. Ke depannya, dengan semakin longgarnya restriksi dari tiap-tiap negara di dunia bagi para wisatawan untuk melakukan perjalanan diharapkan dapat terus mendukung laju pertumbuhan ini.

Selanjutnya, resesi global yang diperkirakan akan berlangsung kembali pada Tahun 2023 merupakan bentuk potensi krisis yang perlu diantisipasi. Resesi ini dipicu pengetatan moneter oleh banyak bank sentral, imbas perang Ukraina-Rusia, hingga kebijakan zero-Covid di China. Sejumlah negara pun berupaya untuk menghindari risiko tersebut, salah satunya di sektor pariwisata. Oleh karenanya, upaya-upaya pertahanan dalam berbagai sektor mutlak diperlukan sehingga nantinya tidak mengalami dampak yang

signifikan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata, baik skala nasional, regional, destinasi, maupun skala terkecil yakni tapak.

b. Pemulihan pariwisata pasca krisis sebagai prioritas utama

Sebagian besar negara di dunia memahami bahwa memulihkan pariwisata setelah terjadinya krisis merupakan salah satu agenda yang perlu diprioritaskan. Dalam konteks terbaru, Selain kebijakan vaksinasi masal bagi warganya, sejumlah kebijakan khusus diterapkan oleh sejumlah negara guna mempercepat laju pemulihan sektor pariwisata nasionalnya setelah merebaknya pandemi Covid-19 dan menjadi paradigma global.

Melansir artikel dari International Monetary Fund (imf.org), sejumlah negara memberlakukan kebijakan strategis guna menstimulasi peningkatan aktivitas wisata dan daya adaptasi industrinya. Thailand misalnya, yang mengalokasikan 700 juta dollar Amerika dari anggaran nasional mereka untuk memacu pariwisata domestik. Di Jamaika, pemerintah memberikan kelas sertifikasi pelatihan daring gratis kepada 10.000 pekerja pariwisata untuk membantu meningkatkan keterampilan mereka di bidang tertentu yang dapat membantu mereka mencari alternatif pekerjaan lain. Sementara Vanuatu menawarkan hibah kepada usaha kecil

dan menengah, juga telah membantu perusahaan untuk menyesuaikan model bisnis mereka dan melatih kembali staf sehingga terbentuk resiliensi sektor bisnis dan ekonomi individual.

Tidak hanya itu, kendati banyak negara yang sulit menerapkan kebijakan terkait dengan bantuan ekonomi dikarenakan terhambat oleh ruang fiskal yang terbatas, namun muncul inisiatif-inisiatif baru untuk menghidupkan kembali pariwisatanya. Di Kosta Rika, misalnya, hari libur nasional untuk sementara dipindahkan ke hari Senin untuk meningkatkan pariwisata domestik dengan memperpanjang akhir pekan. Selain itu, Barbados memperkenalkan visa *'Welcome Stamp'*—izin tinggal satu tahun yang memungkinkan karyawan jarak jauh untuk tinggal dan bekerja dari negara tersebut. Demikian pula, Fiji meluncurkan inisiatif Jalur Biru yang memungkinkan kapal pesiar berlabuh di marinyanya setelah memenuhi persyaratan karantina dan pengujian yang ketat .



Gambar 5. Visa “Welcome Stamp” Guna Memulihkan Pariwisata di Negaranya

(Barbados.org, 2020)

Semua kebijakan yang tersebut di atas semata-mata dilakukan untuk memastikan bahwa mata rantai aktivitas kepariwisataan di negaranya tidak terputus dan justru bergerak secara lebih cepat dan konstan meskipun kondisi global belum sepenuhnya pulih.

Selain banyaknya negara-negara di dunia yang telah berkomitmen untuk memulihkan sektor kepariwisataan di negaranya masing-masing, sejumlah organisasi-organisasi dunia pun telah mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung dan menstimulasi pemulihan pariwisata global. Yang utama ialah UNWTO di mana regulasi dan panduan mengenai pemulihan pariwisata di berbagai tingkatan manajemen pariwisata telah dikeluarkan bahkan sejak Mei 2020, beberapa bulan saja sejak pandemi Covid-19 merebak. Selain itu, UNWTO juga membangun

platform “UNWTO Covid-19 Dashboard” yang merupakan platform untuk melacak dan menghimpun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh seluruh negara di dunia dalam menangani pandemi Covid-19 dan bagaimana penyesuaian pada sektor pariwisatanya. Hal ini dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan negara-negara yang membutuhkan acuan dan sudut pandang dalam membangun kebijakan ataupun strategi dalam membangun kembali pariwisatanya.

Selanjutnya, salah satu gerakan internasional yang menandai adanya komitmen dalam memulihkan industri pariwisata global ialah adanya gerakan “*people center*” melalui penguatan masyarakat dan UMKM sebagai agen transformasi dalam pemulihan kepariwisataan. Hal ini merupakan bentuk hasil kesepakatan bersama pasca presidensi negara-negara G20 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada Tahun 2022. Adapun bentuk konkret gerakan tersebut ialah dituangkan ke dalam sebuah buku panduan yang diterbitkan oleh UNWTO yang berjudul “*The G20 Bali Guidelines: Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents – A People-centred Recovery*” (UNWTO, 2022).

Pedoman tersebut bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja untuk memajukan transformasi sektor pariwisata

melalui aksi kebijakan pada UMKM dan masyarakat. Secara detail, tujuannya ialah untuk memberikan panduan tentang kebijakan dan praktik utama untuk menciptakan komunitas dan UMKM yang lebih tangguh dan berkelanjutan setelah pandemi COVID-19 dan dalam konteks perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan tantangan polusi, peningkatan sosial, ekonomi dan teritorial kesenjangan, digitalisasi dan tantangan ekonomi global saat ini.

Penyusunan buku pedoman tersebut dibangun berdasarkan lima pilar tindakan, yakni:

- Pilar 1: Modal manusia (*human capital*): pekerjaan, keterampilan, kewirausahaan dan pendidikan

Fokusnya ialah mencermati kebutuhan pasar, manajemen talenta, pengembangan pendidikan dan keterampilan, serta kebijakan dan praktik untuk menciptakan lapangan kerja baru dan bernilai tambah, mengingat penguatan sumber daya manusia adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong kesempatan kerja yang layak untuk semua orang di seluruh dunia. sektor pariwisata untuk memungkinkan sektor ini merespon dengan lebih baik terhadap kebutuhan yang berubah.

- Pilar 2: Inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif

Berfokus pada bagaimana memacu inovasi di komunitas lokal, menciptakan infrastruktur dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk digitalisasi, serta menghubungkan wilayah perkotaan dan pedesaan. Aksi ini juga ditujukan untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai penggerak rantai nilai pariwisata yang lebih beragam, meningkatkan daya saing UMKM, daya tarik destinasi dan branding (budaya dan pariwisata) mereka secara keseluruhan.

- **Pilar 3: Pemberdayaan perempuan dan pemuda**

Dengan fokus khusus pada tindakan yang diperlukan untuk menciptakan pekerjaan yang layak bagi perempuan dan pemuda, yang merupakan tulang punggung industri, serta untuk memberdayakan mereka dan mempromosikan peran mereka di komunitas lokal sebagai juara kebijakan atau bisnis, pengusaha, pekerja dan inovator. Tujuan dari segmen ini juga untuk memanfaatkan peran penting pendidikan dan keterampilan untuk mempromosikan inklusi penuh dari kedua kelompok, yang sangat penting untuk ketahanan masa depan masyarakat lokal di seluruh dunia.

- **Pilar 4: Aksi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan sirkularitas**

Berfokus pada transisi ke model pariwisata yang lebih berkelanjutan dan kemajuan menuju pencapaian tujuan Perjanjian Paris. Mengatasi penggunaan energi, tanah, air, dan sumber daya makanan oleh pariwisata dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), hilangnya keanekaragaman hayati, dan limbah.

- **Pilar 5: Kerangka kebijakan, tata kelola dan investasi**

Berfokus pada kebutuhan untuk membuat kebijakan dan tindakan pariwisata holistik, kondisi investasi dan model tata kelola yang memadai yang mendukung bidang-bidang tersebut di atas dengan mempertimbangkan keadaan, kebutuhan, dan prioritas nasional

Penyusunan buku pedoman tersebut maupun pedoman lainnya dan segala bentuk kesepahaman dan program yang dilakukan oleh UNWTO baik secara mandiri maupun bentuk reaksi atas gerakan tertentu merupakan wujud nyata upaya yang dilakukan oleh organisasi pariwisata resmi terbesar di dunia tersebut untuk memulihkan kembali kondisi pariwisata global pascakrisis yang melanda. UNWTO secara aktif menghimpun berbagai isu, paradigma, dan permasalahan yang terjadi secara global dan implikasinya terhadap sektor pariwisata.

Selain UNWTO, sejumlah organisasi lain seperti UNDP, IMF, ILO, serta HLB juga menunjukkan keseriusan dan

komitmennya dalam memulihkan pariwisata dunia melalui berbagai program/ proyek pemulihan pariwisata di negara-negara yang membutuhkan, menghimpun data-data penunjang, serta mempublikasikan riset-riset pendukung. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah publikasi yang ada pada laman resmi masing-masing lembaga tersebut.

c. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan

Dalam memulihkan sektor kepariwisataan di sebuah negara pascapandemi Covid-19, pendekatan spesifik dan khusus diperlukan. Meskipun harapan semua pihak ialah kondisi pariwisata global yang kembali sepenuhnya seperti sebelum pandemi Covid-19, nyatanya pendekatan yang lebih terbatas diperlukan untuk menyesuaikan dengan keadaan di mana penyebaran Virus Covid-19 belum benar-benar berakhir dan isu mengenai sanitasi dan restriksi di ruang publik masih tetap diperlukan.

Pendekatan yang mutlak menjadi solusi ialah membangun pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Isu mengenai pengembangan yang berkelanjutan dari sektor pariwisata secara kolektif telah digaungkan dan disepakati oleh sebagian besar negara di dunia. Wu et al. (2021) menyatakan bahwa dari sekian banyaknya isu yang terjadi dalam sektor pariwisata, ketidaknyamanan dan kekecewaan

masyarakat di sekitar destinasi wisata dan wisatawan yang datang akibat penyelenggaraan aktivitas pariwisata yang semena-mena menjadi isu yang paling sering muncul dan dikaji oleh para ahli setidaknya dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Hal ini membuktikan bahwa dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata, kajian holistik merupakan hal yang mutlak diperlukan sehingga dibutuhkan alat yang memadai guna mendukung kajian tersebut.



Gambar 6. Komponen Pariwisata Berkelanjutan

Sumber: SketchBubble (2022)

UNWTO yang berkolaborasi bersama UNEP mengelaborasi nilai-nilai pariwisata berkelanjutan di sebuah destinasi wisata ke dalam 3 prinsip utama yakni prinsip ekonomi, prinsip sosial-budaya, serta prinsip lingkungan (UNWTO & UNEP, 2005). Prinsip ekonomi berfokus pada bagaimana sektor kepariwisataan tak hanya memberikan sumbangsih kepada pemasukan daerah, namun juga penurunan angka pengangguran, peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, serta secara lebih luas ialah penekanan angka inflasi (Wu et al., 2021). Selanjutnya, prinsip sosial-budaya berfokus pada pengurangan nilai kerusakan budaya tradisional, degradasi sosial, pengendalian tingkat kriminalitas, serta asimilasi dan akulturasi negatif pada gaya hidup masyarakat lokal. Terakhir, prinsip lingkungan dititikberatkan pada kerusakan alam, penyalahgunaan tata guna lahan, polusi, pengelolaan limbah, kesemrawutan lalu lintas, serta kesesakan di sebuah wilayah (Dyer et al., 2007).



Gambar 7. Eco Resort Pulau Macan sebagai bentuk dari Usaha Pariwisata Berkelanjutan

Sumber: Tripadvisor (2022)

Uniknya, indikator-indikator yang terurai dari prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan memiliki banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip dalam konsep ketahanan nasional/ wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa melalui irisan konseptualnya, upaya peningkatan ketahanan di sebuah wilayah/ negara dapat menjadi langkah strategis dari penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang memiliki implikasi positif ganda.

2. Isu-Isu Nasional

a. Pariwisata sebagai isu strategis nasional

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Dr (HC) dr HR Agung Laksono dalam sebuah kuliah umum di

Universitas Yarsi (23/8/2021) memaparkan bahwa ketahanan nasional memiliki korelasi erat dengan bagaimana ketangguhan sebuah negara dalam menghadapi dinamika yang menimpa negara tersebut. Ketahanan nasional didefinisikan sebagai kemampuan dan ketangguhan dinamis suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara serta setidaknya mengandung empat unsur, yakni kemampuan dan ketangguhan, faktor-faktor dinamis dan statis, jaminan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta kejayaan bangsa dan negara. Oleh karenanya, penting bagi kita selaku warga negara untuk memastikan bahwa keterpurukan kita akibat hantaman pandemi Covid-19 sebagai poin penting pembelajaran yang mengantarkan kita untuk lebih tangguh dan tidak mengulangi kegagalan yang sama di masa mendatang.

Pariwisata dianggap sektor strategis di mana untuk memulihkannya tidak membutuhkan banyak usaha khususnya modal dan kemampuan spesifik (Rosy & Handayani, 2022). Selain itu, pariwisata merupakan bentuk konkret sebuah pendekatan ekonomi berbasis masyarakat. Hal ini terrefleksi secara nyata dalam penetapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan kolektifikasi dari langkah-langkah strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memulihkan

kembali perekonomian nasional yang sempat terpuruk. Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut dirangkum ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dibawah oleh komando Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).



Gambar 8. Tema dan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
(BAPPENAS, 2021)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa salah satu fokus pembangunan dalam pemulihan ekonomi nasional ialah Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi. Pariwisata dapat menjadi alat sekaligus wahana untuk mengakomodasi kebutuhan untuk memenuhi agenda-agenda pembangunan/prioritas nasional di atas dengan efektif. Pada aksinya, kolaborasi dan kesepahaman bersama menjadi hal yang

penting dan fundamental sehingga pemulihan nasional terutama melalui sektor pariwisata menjadi satu suara dan satu langkah demi efektifitas dan efisiensinya. Oleh karenanya, diperlukan sebuah alat/sarana yang dapat memetakan tugas pokok, fungsi, dan skala kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan khususnya dalam memulihkan kondisi nasional sehingga nantinya berdampak positif terhadap ketahanan nasional melalui ketahanan di masing-masing destinasi wisata.

Apa yang dipaparkan di atas juga mempertegas kedudukan pariwisata yang diprioritaskan pengembangannya dan dalam tujuannya sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) dalam pembangunan nasional. Sedari awal masa kerjanya, Presiden RI Taun 2019-2024 Joko Widodo secara gamblang dan tegas menyatakan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan DNA baru bangsa Indonesia yang secara strategis akan menjadi tumpuan perekonomian negara melalui peningkatan kualitas produk wisata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan teori industri dasar yang menyatakan bahwa ada empat bidang dasar dalam industri dunia yakni agrikultur, manufaktur, teknologi informasi, dan ekonomi kreatif. Indonesia selanjutnya melalui pendekatan ekonomi kreatif mulai menggarap dan memfokuskan sektor

kepariwisataan sebagai tumpuan nasional setelah mempertimbangkan keseimbangan dan keberlanjutannya terhadap berbagai ancaman.

Berikutnya, dalam tujuannya untuk mengembangkan pariwisata sebagai sektor utama dan menjadi lini industri yang mandiri, pembangunan pariwisata dapat dilakukan dengan memperkuat keterkaitan setiap sektor pendukung dimana klaster destinasi atau daya tarik wisata dapat didukung oleh klaster pemasok pangan, klaster pemasok kerajinan, klaster hub pariwisata (transit dan akomodasi), dan lain sebagainya. Selain itu, sebagai respon adaptif pemerintah terhadap pemulihan pascakrisis akibat Pandemi Covid-19, ditetapkan beberapa kebijakan seperti reaktivasi wisatawan domestik dan mancanegara secara bertahap, reorientasi pada pariwisata yang berkualitas (*quality tourism*) dan tidak hanya berorientasi pada mass tourism;, percepatan pemulihan 5 destinasi super prioritas, pengembangan beberapa destinasi sebagai *tourism hub*, fasilitasi penambahan *direct flight (point to point)*, penerapan standar kebersihan dan keselamatan melalui protokol CHSE (*Cleanliness, Health, Safety And Environmental Sustainability*), serta *re-skilling & up-skilling* untuk memenuhi standar pariwisata baru.

b. Pengembangan Destinasi Prioritas Nasional

Seperti yang telah diketahui bersama, Bali merupakan titik tumpu pertumbuhan pariwisata Indonesia, bahkan kini mulai dianggap sebagai pusat perbandingan perkembangan kepariwisataan secara global. Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa pariwisata Bali masih menumpu 41% dari total pemasukan pariwisata nasional. Begitupun dengan Bandara Internasional Ngurah Rai yang masih menjadi pintu gerbang penerima wisatawan mancanegara terbesar. Akan tetapi, eksistensi Bali yang kian lama kian menguat seakan menjadi boomerang bagi Indonesia. Pesatnya laju pertumbuhan sektor kepariwisataan di Bali seakan menutup peluang destinasi wisata lain di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dan momentumnya. Hal ini dikarenakan atensi wisatawan khususnya wisatawan asing yang akan selalu berfokus pada Bali sebagai primadona.

Hal itulah yang mendasari Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat sebuah “dobrakan” secara regulatif dan membuat program pemrioritasan pembangunan di destinasi-destinasi yang dianggap memiliki potensi selevel Bali namun hingga saat ini belum mendapatkan perhatian dan memiliki banyak kekurangan. Salah satu program yang dikembangkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ialah pengembangan destinasi wisata super prioritas. Penyusunan program destinasi wisata super prioritas merupakan mandat langsung dari Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia di mana beliau menghendaki adanya fokus pengembangan destinasi wisata prioritas baru yang dapat menduplikasi kesuksesan Bali dan diharapkan dapat menjadi pilar-pilar penunpu kepariwisataan Indonesia baru secara masif dan simultan.

Dari perspektif tersebut, maka Kementerian menetapkan 5 destinasi utama yakni Danau Toba, Kawasan Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, serta Likupang sebagai destinasi wisata super prioritas (DSP) Indonesia dan merupakan bentuk aktualisasi dari RPJMN Indonesia Tahun 2020-2024 di mana dalam dokumen tersebut diterangkan bahwa 5 DSP tersebut menjadi penyumbang peningkatan produk domestic bruto (PDB) sebesar 5,5% atau sebesar 30 miliar USD dari total target 350-400 juta perjalanan wisata dan mencapai total kunjungan wisatawan sejumlah 22,3 juta wisatawan (Kemenparekraf, 2022b). Memang sejatinya kelima DSP tersebut masih terlalu “mentah” untuk dapat mencapai target tersebut, terlebih dengan ruang lingkup RPJMN yang memiliki masa kerja 5 tahun. Oleh karenanya, Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif secara strategis mengarahkan fokus pembangunan di 5 DSP tersebut secara komprehensif meliputi pengembangan infrastruktur aksesibilitas, amenitas, jaringan telekomunikasi, produk wisata, sumber daya manusia, hingga perbaikan ekosistem ekonomi kreatif (Kemenparekraf, 2022b).

Sejatinya, pembentukan 5 DSP merupakan bentuk simplifikasi dari program terdahulunya yakni program 10 destinasi wisata prioritas atau yang biasa dikenal dengan “10 Bali baru” di mana destinasi yang menjadi fokus ialah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Riau, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, serta Morotai. Namun, menimbang kompleksnya proses dan kebutuhan masing-masing destinasi untuk dapat secara layak mencapai target yang ditentukan dan menimbang pula efektifitas kinerja, oleh karenanya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengarahkan pengerucutan dari program prioritas tersebut sehingga tersisa 5 DSP yang hingga kini menjadi fokus pembangunan destinasi pariwisata unggulan baru Indonesia.’

Berbicara mengenai 5 DSP tersebut sebagai substitusi Bali, nyatanya tidak serta-merta dapat dibangun hanya melalui konseptualisasi dan manifestasi rencana. Bali, sebagai destinasi wisata andalan Indonesia nyatanya membutuhkan

waktu setidaknya 100 tahun untuk dapat eksis dan lestari seperti sekarang. Merujuk pada Buku “Metamorfosis Pariwisata Bali: Tantangan Membangun Pariwisata Berkelanjutan”, geliat pariwisata di Pulau Bali bermula dari adanya kunjungan salah seorang anggota parlemen Belanda, H. Van. Kol ke Pulau Bali pada Tahun 1902. Setelahnya, H. Van. Kol merangkum perjalanannya ke dalam sebuah buku berjudul “Uit Onze Kolonien” (Dari Koloni Kita) yang dapat direferensikan sebagai bahan promosi pertama mengenai kepariwisataan di Pulau Bali. Di masa selanjutnya, perkembangan aktivitas pariwisata di Bali semakin meningkat dan secara konstan berkembang menjadi tujuan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara.

Namun, yang perlu diperhatikan ialah ketika melewati fase perkembangan vitalnya, Bali mengalami dinamika pasang-surut dikarenakan beberapa tragedi yang menjadikan aktivitas pariwisata turun drastis. Salah satunya ialah adanya serangan teroris melalui pemboman beberapa titik padat wisatawan di Legian, Kuta, dan Jimbaran di Tahun 2002 yang menelan puluhan korban jiwa. Hal ini secara traumatis berdampak terhadap keberanian wisatawan untuk mengunjungi Bali di masa itu. Tragedi kedua ialah merebaknya pandemi global Covid-19 yang terjadi di awal Tahun 2020 dan bertahan setidaknya setahun yang memaksa seluruh kegiatan pariwisata dibatasi secara besar-besaran

bahkan sempat dilakukan pelarangan. Hebatnya, Bali berhasil pulih dan kian menguat setelah melewati beberapa tragedi tersebut. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa Bali memiliki ketahanan sebagai destinasi wisata yang baik. Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah destinasi wisata lainnya di Indonesia khususnya 5 DSP dapat mencapai ketahanan destinasi sebaik Bali? Kalaupun iya, berapa lama waktu yang dibutuhkan?

Oleh karenanya, diperlukan alat dan instrumen untuk mengukur secara mandiri ketahanan tiap-tiap destinasi pariwisata di Indonesia dan menentukan langkah/ strategi tervital yang dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan destinasi sehingga tiap-tiap destinasi wisata di Indonesia siap akan segala kemungkinan di masa depan dan berimplikasi pada kemajuan destinasi itu sendiri.

c. Perkembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Indonesia

Sebagai salah satu pilar dalam keberlanjutan pariwisata, masyarakat memegang kendali penting dalam penyelenggaraannya. Pendekatan pariwisata berkelanjutan sejatinya mengedepankan prinsip-prinsip sosial di mana masyarakat di sekitar destinasi wisata dapat terlibat dan ikut serta dalam menghidupkan potensi-potensi lokal yang ada. Tanpa partisipasi langsung dari masyarakat di destinasi

wisata, mustahil pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Konsep inilah yang dikenal dengan pariwisata berbasis masyarakat.

Tosun dan Timothy juga memaparkan bahwasanya aspek penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah penekanan pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini lebih fokus terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam merencanakan dan mengembangkan potensi di destinasi pariwisata (Tosun & Timothy, 2003). Dengan terlibatnya masyarakat di suatu destinasi, maka pariwisata secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Secara konseptual, ASEAN mendefinisikan pariwisata berbasis masyarakat atau dikenal dengan istilah *Community-Based Tourism* (CBT) sebagai kegiatan kepariwisataan yang sepenuhnya dimiliki, dijalankan, dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial-budaya yang bernilai maupun sumber daya alam dan warisan budaya (ASEAN, 2016). Singkatnya, masyarakat diharapkan dapat secara mandiri mengelola pariwisata di daerahnya, bahkan melakukan kolaborasi dengan pihak lainnya namun tetap dengan kendali penuh dari masyarakat sendiri.

Selanjutnya, ASEAN juga memaparkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

- Melibatkan dan memberdayakan komunitas agar pengelolaan dapat dipastikan transparan
- Membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini dikenal dengan konsep *hexa helix* (pemerintah, swasta, media, akademisi, komunitas, dan politisi)
- Memperoleh pengakuan dari otoritas terkait
- Meningkatkan kesejahteraan sosial dan martabat manusia
- Menerapkan mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan transparan
- Meningkatkan skema hubungan ekonomi dengan pihak lokal dan regional
- Menghargai tradisi dan budaya lokal
- Berkontribusi terhadap konservasi sumber daya alam
- Meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dan tuan rumah dengan memperkuat interaksi yang bermakna antara tuan rumah (warga selaku pengelola) dengan tamu (wisatawan)

- Bekerja untuk menuju kemandirian finansial

Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal pada umumnya tidak memiliki informasi, sumber daya, dan kekuatan yang cukup untuk mengambil keputusan dalam pembangunan pariwisata. Untuk itu, dibutuhkan pihak-pihak khusus dan profesional yang dapat mengatasi keterbatasan-keterbatasan masyarakat lokal untuk menguatkan organisasi lokal secara kontinyu, sehingga dapat lebih baik dalam mengembangkan destinasi wisata. Di Indonesia, penekanan mengenai pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ialah kepada masyarakat yang ada di wilayah pedesaan sehingga arah kebijakannya menjadi ceruk dan fokus pada wisata pedesaan atau secara aktualisasinya menjadi program yang dikenal dengan desa wisata.

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, karena memasok hampir seluruh kebutuhan pangan nasional. Desa juga memasok kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar di kota melalui urbanisasi. Namun kehidupan di desa saat ini belum berkembang sebagaimana mestinya (Li et al., 2021). Selayaknya kebanyakan negara berkembang, di Indonesia banyak penduduk desa yang tak lagi tertarik untuk bekerja di pedesaan sehingga perkembangannya sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Sektor pertanian belum memberikan penghasilan yang cukup bagi sebagian besar masyarakat yang menjadi petani, sehingga sebagian besar dari mereka bermigrasi ke kota. Akan tetapi, meninjau sumber dayanya, sejatinya lingkungan pedesaan memiliki banyak potensi pengembangan. Pengembangan pariwisata, misalnya, dapat menjadi pilihan. Pengembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih dengan kondisi bahwa mengembangkan pariwisata di pedesaan sebenarnya tidak membutuhkan banyak syarat. Sebagai contoh, masyarakat dapat memanfaatkan kamar kosong dan layanan makanan dan minuman di rumah masing-masing sebagai modal untuk mendirikan pondok wisata atau yang kerap disebut sebagai *homestay*. Masyarakat juga dapat menjual produk-produk lokal dari hasil produksi UMKM menjadi buah tangan bagi para wisatawan. Intinya, pengembangan pariwisata di desa dapat dilakukan secara sederhana namun memberikan efek yang berkepanjangan.



Gambar 9. Desa Wisata Penglipuran, Salah Satu Desa Wisata Mandiri Di Indonesia

(JADESTA, 2022)

Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata. Dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, dan layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai, dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa. Prinsip utama dalam desa wisata adalah desa membangun, yaitu fokus kepada pemberdayaan masyarakat untuk dapat membangun desanya secara mandiri. Pengembangan desa wisata merupakan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal.

Saat ini terdapat 1073 desa yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Adapun peran pemerintah ialah sebagai fasilitator dalam menyediakan pendampingan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, fasilitas akses finansial, promosi, dan pengembangan kemitraan dari masyarakat desa. Sebagai contoh pendampingan yang diberikan bisa mencakup:

- tata kelola melalui pengembangan usaha pariwisata, *homestay*, paket wisata, kerajinan, restoran, dan lain lain
- akses pembiayaan melalui KUR dan dana bergulir
- pemasaran melalui pembuatan laman profil dan promosi, konten di media sosial, *event* dan pameran, serta kerja sama dengan agen wisata dan media.

Pelaksanaan program pengembangan desa wisata di Indonesia nyatanya telah difokuskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta didukung oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di level regional provinsi atau kabupaten/kota, pelaksanaan program pengembangan desa wisata dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Pariwisata, Badan Pemberdayaan Masyarakat &

Pembangunan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Indakop atau Perdakkum, dan Dinas Pertanian – Perikanan.



Gambar 10. Penganugerahan ADWI Tahun 2022

(Kemenparekraf, 2022a)

Pada skala nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan apresiasi bagi desa-desa wisata yang dianggap berhasil dan dapat menjadi teladan bagi desa lainnya melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diselenggarakan tiap tahun dan diikuti oleh lebih dari 3000 desa wisata di Indonesia, yang selanjutnya tergabung dalam JADESTA (Jaringan Desa Wisata). Apresiasi ini sekaligus membuktikan keseriusan Pemerintah RI terhadap peningkatan kualitas masyarakat pedesaan melalui pelibatan dalam kegiatan pariwisata.

3. Prasyarat Ketahanan Destinasi Pariwisata

Masuknya sektor pariwisata di sebuah wilayah tentunya akan menuntut adanya penyesuaian dan pengembangan terutama berkaitan dengan penyediaan kebutuhan dari wisatawan selaku tamu dan pengelola selaku tuan rumah. Terlebih apabila tujuan utamanya ialah menjadikan wilayah tersebut menjadi destinasi wisata yang unggul dan berdaya saing. Namun, setelah penjabaran paradigma, isu, serta tantangan pada bagian-bagian sebelumnya, kita sepakat bahwasanya yang dibutuhkan oleh destinasi pariwisata tidak hanya itu saja. Sebagai bagian dari negara, destinasi pariwisata hendaknya membangun diri menjadi sebuah satuan pengembangan yang memiliki ketahanan diri, terutama guna menyiapkan diri apabila di suatu waktu krisis melanda.

Berangkat dari penjabaran mengenai konseptualisme manajemen destinasi pariwisata, pola perilaku wisatawan yang berdasarkan motivasi, penguatan daya saing wilayah, serta manajemen krisis maka selanjutnya ada beberapa hal yang secara vital dan substansial menjadi prasyarat sebuah destinasi wisata dalam meningkatkan ketahanannya. Adapun prasyarat tersebut mencakup:

a. Keamanan dan Keselamatan

Keselamatan dan keamanan merupakan faktor penting yang menentukan daya saing industri pariwisata suatu negara.

Wisatawan kemungkinan besar menolak untuk bepergian ke negara atau wilayah berbahaya, terlebih dengan konflik antarkepentingan yang berkepanjangan. Adapun beberapa alasan umum yang menjadi pertimbangan seorang wisatawan sebelum mengunjungi sebuah negara ialah bagaimana tingkat kejahatan umum, kekerasan, terorisme, serta sejauh mana layanan kepolisian dapat diandalkan untuk memberikan perlindungan dari berbagai macam kejahatan (WEF, 2019).

Di samping itu, keselamatan dan keamanan sangat penting untuk memberikan kualitas dalam pariwisata. Menjalani pengalaman baru bilamana di saat yang sama merasa aman adalah beberapa kebutuhan dasar manusia. Hal ini bahkan lebih ditekankan saat bepergian, terutama dalam perjalanan ke luar negeri, daripada dalam kehidupan sehari-hari. UNWTO (1993) mendefinisikan pariwisata sebagai “kegiatan orang-orang yang bepergian ke dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan biasa mereka selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk bersantai, bisnis dan tujuan lainnya”. Dengan demikian, pengalaman wisata merupakan “potongan kue” dari pengalaman hidup yang nyata. Oleh karenanya, semua aspek perjalanan harus diperhatikan dengan perhatian yang proporsional. Dalam hal aspek komersial pariwisata — akal sehat, profesionalisme, dan solusi praktis juga harus diterapkan.

Selanjutnya, UNWTO dalam bukunya yang berjudul “Tourist Safety and Security: Practical Measures for Destinations” (UNWTO, 1997) memaparkan bahwa perencanaan aspek keselamatan dan keamanan di sebuah destinasi pariwisata memerlukan pertimbangan risiko yang berasal dalam empat hal utama, yakni:

1) lingkungan manusia dan kelembagaan di luar sektor pariwisata

Risiko yang bersumber pada manusia dan tatanan institusional yang akan muncul ketika pengunjung menjadi korban:

- Kenakalan umum (pencurian, pencopetan, penyerangan, perampokan, penipuan, dll)
- Kekerasan tanpa pandang bulu dan terarah (seperti pemerkosaan dan pelecehan)
- Kejahatan terorganisir (pemerasan, perdagangan budak, pemaksaan, dll)
- Terorisme dan campur tangan yang melanggar hukum (serangan terhadap institusi negara, menyatakan kepentingan vital, dll.), pembajakan tinggi dan penyanderaan

- Perang, konflik sosial, dan kerusuhan politik dan agama
- Kurangnya perlindungan publik dan kelembagaan dan layanan masing-masing

2) Sektor pariwisata dan sektor komersial terkait

Kurang berfungsinya pariwisata dan sektor terkait (transportasi, olahraga, perdagangan ritel, dll.) yang bertanggung jawab atas isu keamanan pribadi wisatawan, integritas fisik dan kepentingan ekonomi sebagai konsekuensi dari:

- Cacat dalam standar keselamatan di tempat wisata (kebakaran, kesalahan konstruksi, kurangnya perlindungan anti gempa, dll.)
- Cacat dalam sanitasi dan kebijakan dalam keberlanjutan lingkungan
- Tidak adanya perlindungan terhadap campur tangan yang melanggar hukum, kejahatan dan kenakalan terhadap fasilitas pariwisata
- Penipuan dalam aktivitas komersial
- Ketidapatuhan terhadap kontrak
- Pemogokan karyawan

3) Wisatawan individu (risiko pribadi)

Terlepas dari faktor eksternal, wisatawan itu sendiri juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan mereka sendiri serta terhadap pengelola destinasi wisata/ masyarakat sekitar selaku tuan rumah.

Penyebabnya antara lain:

- Praktik berbahaya wisatawan dalam olahraga dan kegiatan rekreasi, mengemudi, serta konsumsi makanan dan minuman
- Kondisi kesehatan wisatawan sebelumnya yang mungkin memburuk saat bepergian
- Perilaku pengunjung yang bertentangan atau tidak pantas dengan hormat kepada penduduk kependudukan atau hukum setempat
- Kegiatan terlarang atau kriminal tertentu (misalnya, perdagangan gelap narkoba)
- Kunjungan ke daerah berbahaya
- Kehilangan barang pribadi, dokumen, uang, dll., melalui tindakan lalai atau kecerobohan pribadi

4) Risiko fisik atau lingkungan (alam, klimatologi, epidemiologi)

Risiko fisik dan lingkungan juga merupakan salah satu bentuk dari risiko pribadi, namun berbeda dengan bagian sebelumnya di mana risiko tersebut ditandai dengan tindakan yang disengaja, risiko fisik atau lingkungan terjadi dikarenakan ketidaktahuan wisatawan atau pendekatan pasif terhadap potensi risiko. Risiko fisik dan lingkungan akan terjadi apabila wisatawan:

- Tidak menyadari karakteristik alami dari lingkungan destinasi, khususnya flora dan fauna
- Tidak siap lahiriah secara sudut pandang medis (membutuhkan vaksinasi atau pencegahan)
- Memiliki kebiasaan yang buruk dalam mengonsumsi makanan dan minuman
- Terkena keadaan darurat (bencana alam, epidemi, dll) yang timbul dari lingkungan fisik.

b. Komitmen Global dalam Kepariwisata

Kemasifan dinamika yang terjadi dalam industri pariwisata dunia merupakan sebuah efek dari esensi sektor pariwisata yang multidisiplin. Dengan banyaknya unsur pembentuk dan pemengaruh, perubahan rasanya akan selalu terjadi dan kian lama kian cepat dan ekstrim. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu wujud perubahan yang terjadi dewasa ini ialah perubahan paradigma

pariwisata berkualitas sebagai timbal balik dari perspektif mengenai pariwisata berbasis kuantitas yang dianggap terlalu eksploitatif. Hal ini sejalan dengan paradigma lain mengenai pariwisata berkelanjutan dan turunannya yakni pariwisata yang bertanggung jawab.

UNWTO sebagai organisasi dunia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kepariwisataan secara global memahami penuh bahwasanya perubahan-perubahan tersebut perlu diantisipasi dan disikapi dengan serius. Oleh karenanya, melalui kesepakatan dan kesepakatan dari tiap-tiap negara di dunia, UNWTO mewujudkan komitmen-komitmen bersama guna mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan sektor pariwisata di berbagai lingkup. Salah satunya yakni komitmen bersama mengenai tujuan/ poin utama pembangunan pariwisata berkelanjutan yang diwujudkan dalam *Sustainable Tourism Development Goals* yang mengiringi implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs).



Gambar 11. Kedudukan STDGs dan SDGs

(Garrido, 2022)

UNWTO yang merupakan badan resmi PBB (UN) dan menaungi 156 negara anggotanya bertanggung jawab atas promosi pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diakses secara universal yang diarahkan pada pencapaian Agenda universal 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

UNWTO menawarkan kepemimpinan dan dukungan kepada sektor pariwisata dalam memajukan pengetahuan dan kebijakan pariwisata di seluruh dunia, mengadvokasi pariwisata yang bertanggung jawab dan mempromosikan pariwisata sebagai kekuatan pendorong menuju

pertumbuhan ekonomi, pembangunan inklusif, dan kelestarian lingkungan.

Dari hasil kesepakatan dan kesepakatan dari sejumlah negara yang dihasilkan dari konferensi yang secara berkala diselenggarakan oleh Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sebagai perpanjangan tangan dari UNWTO, dihasilkan pedoman dan praktik manajemen pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pedoman ini berlaku untuk semua bentuk pariwisata di semua jenis destinasi, termasuk pariwisata massal dan berbagai segmen pariwisata khusus. Prinsip keberlanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya dari pengembangan pariwisata, dan keseimbangan yang sesuai harus ditetapkan antara ketiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang. Ini merupakan bentuk konkret komitmen bahwasanya pelaksanaan praktik pariwisata yang berkelanjutan telah disikapi secara serius dan ada wujud teknisnya.

Menyambung konteks pariwisata berkelanjutan yang dielaborasi oleh UNWTO, didapatkan konsep bahwasanya pariwisata berkelanjutan harus:

- Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, menjaga proses ekologi yang penting dan

membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati.

- Menghormati keaslian sosial-budaya masyarakat tuan rumah, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang mereka bangun dan hidup, dan berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya.
- Memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk lapangan kerja yang stabil dan peluang memperoleh pendapatan serta layanan sosial bagi masyarakat tuan rumah, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi informasi dari semua pemangku kepentingan yang relevan, serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan partisipasi yang luas dan pembangunan konsensus. Mencapai pariwisata berkelanjutan adalah proses yang berkesinambungan dan membutuhkan pemantauan dampak yang konstan, memperkenalkan langkah-langkah pencegahan dan/atau perbaikan yang diperlukan kapan pun diperlukan.

Selanjutnya, UNWTO juga mendorong adanya kesepakatan mengenai komitmen lanjutan yang secara teknis dapat mengimplementasikan konsep pariwisata berkelanjutan dan pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible tourism*) ke dalam Kode Etik Pariwisata Global/ *Global Code of Ethic for Tourism* (GCET). Sebagai kerangka acuan mendasar untuk pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, Kode Etik Pariwisata Global adalah seperangkat prinsip komprehensif yang dirancang untuk memandu para pemain kunci dalam pengembangan pariwisata. Ditujukan kepada pemerintah, industri perjalanan, komunitas, dan turis, ini bertujuan untuk membantu memaksimalkan manfaat sektor sambil meminimalkan potensi dampak negatifnya terhadap lingkungan, warisan budaya, dan masyarakat di seluruh dunia.

Diadopsi pada tahun 1999 oleh Majelis Umum Organisasi Pariwisata Dunia, dan diakui oleh PBB dua tahun kemudian. Selanjutnya PBB secara tegas mendorong UNWTO untuk mempromosikan tindak lanjut yang efektif dari ketentuan-ketentuannya. Meskipun tidak mengikat secara hukum, Kode tersebut menampilkan mekanisme implementasi sukarela melalui pengakuannya atas peran Komite Etika Pariwisata Dunia (WCTE), yang dapat dirujuk oleh pemangku kepentingan mengenai penerapan dan interpretasi dokumen tersebut.

Tersusun atas 10 pasal dan 48 poin indikator, kode etik ini banyak mencakup komponen ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari industri perjalanan dan pariwisata. Adapun kesepuluh pasal tersebut antara lain:

- Kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan
- Pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif
- Pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan
- Pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya
- Pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya
- Kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata
- Hak atas pariwisata
- Kebebasan pergerakan wisatawan
- Hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata
- Penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata

Berikutnya, sudah menjadi tugas seluruh negara di dunia untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata global dalam pembangunan pariwisata di negaranya. Kedua komitmen ini juga menjadi panduan sekaligus jaminan konkret bagi wisatawan sehingga dapat tumbuh kesadaran dan kepedulian diri terhadap implementasi pariwisata yang bertanggung jawab.

c. Pariwisata yang Berkualitas

Dewasa ini, kita dihadapkan pada manajemen destinasi pariwisata yang berdasarkan pada kualitas, terlebih dalam perannya untuk meningkatkan daya saing destinasi itu sendiri. Hal inilah yang mendorong terciptanya kesepakatan mengenai pariwisata yang berkualitas. Pariwisata yang berkualitas (*Quality tourism*) merupakan konsep pariwisata yang berseberangan dengan konsep pariwisata massal (*mass tourism*).

Dalam mendorong pariwisata yang berkualitas, pengelola destinasi wisata seyogyanya tidak lagi berfokus untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, melainkan bagaimana memberikan kesan yang amat baik dalam diri

wisatawan karena kualitas produk wisata yang melampaui ekspektasi sehingga wisatawan mau untuk menghabiskan waktu lama di tempat tersebut dan akan berimplikasi pada meningkatnya pendapatan pariwisata. Melalui pariwisata yang berkualitas, jumlah pengeluaran wisatawan akan lebih banyak dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas performa destinasi dan layanan pariwisata (Pristiwasa & Zahari, 2022). Hal ini mengandung intisari bahwa melalui pendekatan pariwisata yang berkelanjutan, kita akan mendapatkan pendapatan pariwisata yang besar dan konstan dari jumlah wisatawan yang terkendali.

Meningkatnya komitmen terkait kualitas pariwisata semakin nampak, salah satu yang mengindikasikan ialah semakin banyaknya kajian ilmiah baik berupa jurnal maupun buku monograf yang secara eksklusif dan komprehensif mengenai hal tersebut. Hal ini berimplikasi juga terhadap semakin banyak pula model maupun konsep untuk menilai atau mengevaluasi kualitas pariwisata di sebuah destinasi.

Kachniewska dalam bukunya yang berjudul “Quality Tourism Management” menekankan pengembangan pariwisata yang berkualitas dari perspektif ekonomi melalui pendekatan produk dan pemasaran. Adapun Kachniewska memaparkan bahwa dalam meningkatkan kualitas produk wisata, yang perlu diperhatikan ialah aspek-aspek seperti

strategi, pemasaran, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, serta informasi (Kachniewska, 2006).

Sedangkan Pristiwasa dan Zahari dalam bukunya Pristiwasa & Zahari (2022) menjelaskan bahwa ada 4 komponen dasar pembentuk kualitas dalam pengembangan sebuah destinasi pariwisata yakni:

- Kepuasan wisatawan
- Kepuasan industri pariwisata
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat
- Peningkatan kualitas lingkungan

Terakhir, Trimurti dkk. mengkolektifkan sekaligus menkonkretkan sejumlah model maupun konsep pariwisata yang berkualitas menjadi indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana kualitas sebuah destinasi pariwisata dari perspektif wisatawan, selaku pemegang kuasa tertinggi dalam industri kepariwisataan (Trimurti et al., 2021). Berikut merupakan indikator-indikator tersebut:

- Menghargai budaya lokal
- Kesadaran lingkungan
- Pembelanjaan terhadap produk lokal

- Latar belakang pendidikan tinggi
- Tingkat kepadatan wisatawan yang rendah
- Atraksi wisata yang menarik
- Kualitas infrastruktur

Dari indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya untuk menghasilkan luaran produk pariwisata yang berkualitas, dibutuhkan pemahaman dan kesepakatan lintas sektoral guna mendukung terpenuhinya indikator-indikator yang nantinya akan meningkatkan kualitas destinasi pariwisata secara keseluruhan.

d. Teknologi Kepariwisataan

Sebagai dampak atas kemajuan teknologi yang menuntut seluruh sektor kehidupan untuk beradaptasi, pariwisata juga dituntut untuk adaptif dan inovatif khususnya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

Manajemen pariwisata adalah bidang yang luas dengan tujuan kompleks yang memerlukan rencana tindakan yang berbeda karena karakteristik khususnya yang tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, heterogen, dan tidak tahan lama. Karl W Wober dalam makalah penelitiannya yang berjudul “Information Supply in Tourism Management” secara kritis

meneliti peran teknologi informasi dalam perencanaan pariwisata dan menyebutkan bahwa masalah komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dalam siklus pengelolaan destinasi pariwisata (Wober, 2003).

Teknologi Informasi (TI) memiliki peran utama dalam menampilkan informasi tentang produk wisata, mengkoordinasikan & menerapkan langkah-langkah promosi, serta distribusi penjualan. Mengoptimalkan presentasi pengetahuan kualitas layanan dalam layanan informasi telah diabaikan. Dari sudut pandang manajemen, pentingnya sistem informasi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor manajemen. Untuk memenuhi permintaan dalam konteks pariwisata, serta kemampuan untuk dapat bertahan dalam jangka panjang maka tidak ada pilihan selain menggabungkan teknologi dan meningkatkan interaktivitas dengan pasar (Buhalis, 1998).

Faktor-faktor yang difasilitasi oleh berkembangnya TI akan meningkatkan kepuasan konsumen sehubungan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi tentang aksesibilitas menuju destinasi, fasilitas yang tersedia, jenis dan kualitas daya tarik wisata, serta pilihan aktivitas. Wisatawan akan cenderung memiliki lebih banyak informasi dan pilihan. Di sisi lain, penggunaan teknologi digital akan berdampak baik juga pada pengurangan proses birokrasi dan pekerjaan “di

atas kertas” secara efektif sehingga membebaskan waktu untuk layanan terhadap wisatawan.

TI menciptakan pasar global baru yang kompetitif dengan kemampuan menjangkau audiens global, mendapatkan informasi pasar instan, dan melakukan transaksi bisnis elektronik dan telah meningkatkan efisiensi ekonomi, serta membuka pasar untuk barang & jasa dari dunia berkembang. Konsep e-tourism dan perubahan bentuk industri dari industri informasi menjadi industri pengetahuan telah terbentuk. Peran terpenting TI dapat dilihat dari industri pariwisata yang memimpin penerapan TI di arena B2C (*business to customer*). Laman (web) digunakan tidak hanya untuk pengumpulan informasi, tetapi juga untuk layanan pemesanan. Jenis pengguna baru muncul yang bertindak sebagai agen perjalanannya sendiri dan membuat paket perjalanan yang dipersonalisasi (Shanker, 2008).

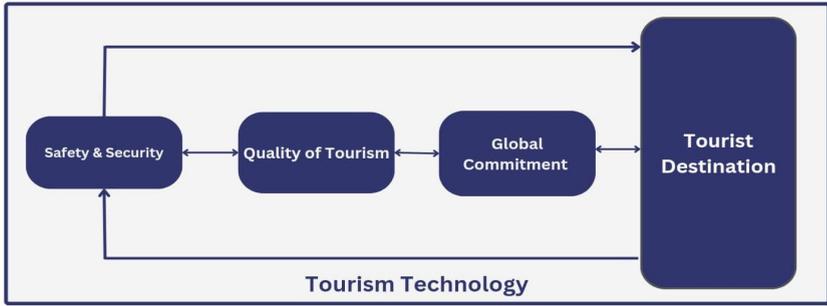


Gambar 12. Laman Resmi Kepariwisataaan Indonesia

(Kemenparekraf, 2022b)

Selanjutnya, Fesenmaier dkk. menekankan bahwa sistem informasi perjalanan telah menjadi penghubung penting antara wisatawan dan pelaku industri. Masa depan *e-tourism* akan difokuskan pada teknologi '*consumer centric*' yang akan memungkinkan pengelola destinasi wisata untuk fokus pada profitabilitas mereka melalui jaringan kemitraan (Fesenmaier et al., 2009). Hal ini didukung oleh Daniele (2003) yang berpandangan bahwa munculnya internet telah sangat mengembangkan industri perjalanan & pariwisata. Ini telah menjadi kategori produk tunggal terbesar melalui layanan yang dijual melalui internet, dan proporsi bisnis yang ditransaksikan melalui media ini terus berkembang. Oleh karenanya, penyesuaian destinasi berikut produk dan atraksi wisatanya terhadap TI dan dunia digital mutlak diperlukan, atau sebagai konsekuensinya produk/ destinasi tersebut tidak akan dilirik oleh wisatawan.

Dari penjabaran keempat unsur prasyarat destinasi wisata dalam memenuhi diri sebagai destinasi tujuan utama wisatawan dalam konteks meningkatkan ketahanan di atas, maka secara umum keempat unsur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 13. Pengambilan Keputusan Wisatawan terhadap Destinasi Wisata

Sumber: Olahan Penelitian (2022)

Gambar tersebut merepresentasikan pola atau pemetaan ketika wisatawan memilih dan menentukan destinasi yang akan ia kunjungi melalui pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga mereka dapat memilih destinasi yang sesuai dengan minat dan preferensinya. Dari gambar tersebut pula tercermin bahwasanya unsur-unsur yang menjadi pertimbangan wisatawan memiliki ikatan erat dengan bagaimana ketahanan destinasi yang dipilih khususnya dalam konteks pariwisata sebagai sebuah produk.

Tak dipungkiri, penjabaran mengenai paradigma pada bab ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai **bagaimanakah langkah strategis untuk mengukur ketahanan destinasi wisata, serta bagaimana menginterpretasikan dan menyikapi hasilnya sehingga masing-masing destinasi wisata dapat memiliki nilai ketahanan yang tinggi dan menjanjikan?**

Oleh karenanya, pada bagian-bagian selanjutnya, akan dibahas secara mendetail dan komprehensif mengenai penjabaran konseptual mengenai berbagai disiplin ilmu berkaitan dengan penilaian dan penguatan ketahanan sebuah wilayah dalam konteksnya sebagai destinasi pariwisata, bagaimana mengukur ketahanan destinasi pariwisata melalui pendekatan astagatra yang telah dielaborasi secara adaptif dalam konteks kepariwisataan, serta arahan mengenai luaran (*output*) yang diharapkan.

BAB II

KONSTRUKSI KETAHANAN DESTINASI PARIWISATA

1. Konsepsi Ketahanan Nasional

Mungkin konsep ketahanan nasional dalam persepsi sebagian besar masyarakat merupakan substansi yang berkaitan dengan kemiliteran. Namun, dalam sudut pandang yang lebih luas, konsep ketahanan nasional merupakan implikasi akhir dari tercapainya tujuan dalam pembangunan sebuah negara. Dari perencanaan dan pembangunan yang komprehensif dan sukses, negara dapat membentuk sebuah ketahanan terhadap berbagai ancaman maupun kondisi yang tidak diharapkan (Kimhi et al., 2019). Oleh karenanya, kajian mengenai ketahanan perlu mendapat topangan dari sisi akademis dan strategis pula.

Ketahanan sebuah negara merupakan faktor vital bagaimana negara tersebut bisa tetap mempertahankan eksistensinya dan menghadapi segala kondisi, termasuk yang terburuk sekalipun. Krisis COVID-19 contohnya, memaksa negara-negara di seluruh dunia bergulat dengan penyediaan layanan kesehatan darurat, menantang perilaku warga, gangguan industri yang meluas, dan konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Ini telah memperluas semua dimensi pengaturan manajemen risiko dan krisis nasional, termasuk penilaian risiko, evaluasi respons kebijakan, pengambilan keputusan

kepemimpinan, komunikasi publik, intervensi dukungan keuangan, dan implementasi inisiatif yang terkoordinasi (Dewaele & Lucas, 2022).

Sementara bagi banyak negara, isu membangun ketahanan/resiliensi nasional mungkin merupakan salah satu tantangan paling akut di abad ke-21. Hal ini dikarenakan lingkungan risiko yang lebih kompleks saat ini (dengan tantangan mulai dari dunia maya hingga iklim) telah menempatkan pendekatan tata kelola risiko nasional tradisional di bawah tekanan yang cukup besar, menuntut perilaku baru, interaksi, dan solusi.

Ketahanan nasional didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang stabil dari sebuah negara dan merupakan modal dalam pembangunan nasional guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis bangsa yang mengandung ketahanan dan keuletan serta kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional, menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, mengancam dan membahayakan keutuhan, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ancaman, tantangan ketahanan nasional kini mulai muncul dalam berbagai bentuk, seperti dampak negatif globalisasi dan modernisasi (Isabella, 2017).

Sedangkan Prayitno dan Trubus mendefinisikan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi seluruh

kehidupan bangsa yang terpadu yang mengandung keuletan dan ketangguhan dan terelaborasi dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, serta terhadap menjamin identitas, keutuhan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional (Prayitno & Trubus, 2013).

Ada berbagai macam model konseptual yang dapat digunakan untuk mengukur ketahanan nasional sebuah negara. Morgenthau menyusun sebuah model yang menilai pengaruh kekuatan politik suatu negara untuk mengukur ketahanan negara tersebut melalui indikator-indikator berikut:

- Geografi
- Sumber-sumber nasional
- Kapasitas industri
- Kesiapsiagaan militer
- Penduduk,
- Karakter nasional
- Moral nasional
- Kualitas diplomasi
- Kualitas pemerintahan (Morgenthau, 1978).

Sedangkan Schleicher menitikberatkan model pengukuran ketahanan nasionalnya pada aspek keilmuan (penguatan edukasi) masyarakat negaranya dan bagaimana hal tersebut berimplikasi pada peningkatan ketahanan nasional secara utuh (Schleicher, 2021). Selanjutnya, Hartman (2018) mengemukakan indikator-indikator yang berlandaskan sistem ekonomi dan bisnis sebuah negara menjadi tumpuan dalam membangun ketahanan. Adapun indikator-indikator dalam model milik Hartman ialah sebagai berikut:

- Variasi & redundansi produk nasional
- Konektivitas internasional
- Sistem pemerintahan yang polisentris
- Sensitivitas lingkungan
- Kemampuan reflektif (pembelajaran) dari sebuah permasalahan
- Gabungan pemikiran dalam sistem yang adaptif

Di sisi lain, di samping model-model konseptual yang dikemukakan para akademisi seperti yang telah dijabarkan di atas, banyak negara di dunia terutama negara maju yang telah menyusun indikator khusus guna mengukur ketahanan negaranya. Sebut saja Israel yang menekankan ketahanan nasional negaranya melalui pendekatan

kesejahteraan masyarakat dan prinsip siklus hidup berkelanjutan yang secara detail diturunkan kepada indikator-indikator berikut:

- Kualitas pekerjaan
- Keamanan personal
- Kesehatan
- Infrastruktur dan perumahan
- Pendidikan dan keahlian
- Kesejahteraan personal dan sosial
- Lingkungan
- Kepemerintahan dan keterlibatan masyarakat
- Standar materi hidup

Tak jauh berbeda dengan Israel, Australia pun memiliki indikator tersendiri dalam mengukur ketahanan negaranya, bahkan sudah secara mandiri mempublikasikan hasilnya dalam “National Resilience Index Australia” yang dipublikasikan tiap tahunnya (Driven, 2021). Pemerintah Australia menitikberatkan ketahanan nasional pada keandalan atau ketahanan individu masing-masing warganya yang nantinya akan berimplikasi pada ketahanan wilayah dan nasional. Adapun indikator yang digunakan oleh Australia antara lain:

- Visi (Domain ketahanan tujuan dan sasaran, perasaan kesesuaian, dan tindakan bergerak menuju sesuatu yang bermakna)
- Ketenangan (Domain ketahanan regulasi emosional, kesadaran internal, dan keterampilan manajemen stress)
- Penalaran (Domain ketahanan pemecahan masalah, banyak akal, mengantisipasi tantangan dan perencanaan ke depan)
- Kolaborasi (Domain ketahanan koneksi manusia, jaringan dukungan sosial, dan keterampilan komunikasi yang baik)
- Kegigihan (Domain ketahanan dari kegigihan, memiliki optimisme yang realistis, dan bangkit kembali untuk mendapatkan kembali motivasi)
- Kesehatan (Domain ketahanan investasi dalam kesejahteraan fisik, termasuk olahraga teratur, kualitas tidur, dan nutrisi sehat).

Di Indonesia, ketahanan nasional merupakan hal yang cukup diperhatikan dan difokuskan. Hal ini dapat dilihat dari adanya lembaga khusus yang menangani hal ini yakni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Lemhannas menggunakan pendekatan khusus dalam mengukur ketahanan nasional Indonesia yakni melalui pilar-pilar Tri Gatra (3 pilar) dan Panca Gatra (5 pilar) yang nantinya bersatu dalam satu model utama yakni Astagatra (8 Pilar) ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional sebagai konsepsi

merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan delapan aspek kehidupan nasional yang diistilahkan sebagai Astagatra. Astagatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah tiga aspek alamiah, yaitu aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, oleh karena itu Trigatra harus dikelola dengan baik. Sedangkan Pancagatra adalah lima aspek sosial, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan.

Ancaman terhadap bangsa Indonesia selalu ditujukan kepada aspek-aspek kehidupan Pancagatra yang senantiasa dinamis, oleh karenanya diperlukan upaya peningkatan ketahanan Pancagatra secara utuh dan menyeluruh. Terjaganya kualitas Pancagatra dalam kehidupan nasional dan terintegrasi dengan Trigatra yang selalu terpelihara dengan baik, akan mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang mantap. Penggabungan Trigatra dan Panca gatra akan menjadi Astagatra yang merupakan model pemetaan yang lugas dan cermat dari sistem kehidupan nasional bangsa Indonesia.

Ketahanan nasional dalam konteks konsepsi merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya dan perlu diimplementasikan kepada seluruh bangsa Indonesia sehingga akan terjalin pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja yang sama secara nasional, holistik, dan berorientasi global (tidak lingkup kedaerahan). Oleh

karena itu, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergi dari seluruh bidang dan sektor pembangunan, terutama sektor pariwisata yang telah ditetapkan sebagai sektor strategis nasional (Modul Materi BS Konsepsi Ketahanan Nasional, 2011).

Secara detail, penjabaran mengenai pilar-pilar ketahanan nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tri Gatra

a) Kondisi Geografis

Sebagai sebuah negara kepulauan dengan wilayah perairan dan daratan yang luas, Indonesia berada pada posisi silang dunia, yakni posisi silang antara 2 benua yakni Benua Asia dan Australia, serta posisi silang antara 2 samudera yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat terbuka oleh pengaruh-pengaruh di luar dirinya, baik pengaruh ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Selain itu, karena posisi geografis tersebut pula Indonesia memiliki posisi yang strategis baik dalam kepentingan mondial maupun dalam hubungan bertetangga, berbangsa, dan bernegara.

Pengaruh letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia mengembangkan konsep geopolitik dan geostrategi yang

berciri khusus dan berbeda yang dilandasi dengan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Kondisi yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap pembangunan negara dalam konteks darat, laut (maritim), maupun udara (dirgantara). Dengan luasnya cakupan wilayah tersebut, Indonesia tentu membutuhkan pengembangan konsep wawasan nasional dan ketahanan nasional yang menyeluruh dan utuh dalam mengelola keterbukaan wilayah berdasar corak dan sifat sebagai negara kepulauan yang luas.

Selanjutnya secara klimatologi, Indonesia mengenal dua musim (hujan dan kemarau) sehingga terbebas dari bahaya ancaman cuaca ekstrem seperti badai yang merugikan. Kendati demikian, di wilayah timur Indonesia sangat terpengaruh pada angin kering dari Benua Australia sehingga daerah-daerah ini sering mengalami kekeringan. Pengaruh musim ini juga menyebabkan beberapa perbedaan satwa di Indonesia timur dan di Barat.

b) Kondisi Demografis

Secara demografis, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal tersebut menimbulkan berbagai implikasi sosial, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Komposisi penduduk

Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pertambahan ini jika tidak diimbangi oleh konsep pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang matang akan menimbulkan banyak dampak negatif seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dll. Oleh karenanya, susunan penduduk melalui pendekatan umur, kelamin, agama, suku, serta tingkat pendidikan yang berbeda-beda diperlukan untuk memperkuat kondisi ketahanan nasional. Selain itu, susunan kependudukan Indonesia yang beragam juga harus dikelola dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional.

- Persebaran Penduduk

Sejauh ini, persebaran penduduk Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Ketidakmerataan ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Ketidakmerataan ekonomi menyebabkan terjadinya arus urbanisasi ke kota-kota besar sehingga menyebabkan kepadatan penduduk di kota yang menyebabkan masalah-masalah baru seperti munculnya permukiman kumuh, kriminalitas, kemacetan, dll.

- Kualitas

Tingkat kualitas penduduk sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan, kecerdasan suatu bangsa, dan

persebaran informasi dan pengetahuan. Selain itu, kualitas penduduk juga dicerminkan oleh kemampuan daya kreatifitas, etos kerja, dan produktivitas kerja. Masalah yang dihadapi Indonesia seperti pendapatan perkapita yang rendah, jumlah angka kelahiran yang besar, rasio ketergantungan yang tinggi, maupun rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor-faktor yang vital terkait konsep ketahanan nasional bangsa Indonesia. Dengan kualitas penduduk yang tinggi, bangsa Indonesia akan dapat beradaptasi secara maksimal dalam era globalisasi.

c) Sumber Daya Alam

Aspek trigatra ketahanan nasional berikutnya adalah keadaan dan kekayaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia yang memiliki kapasitas dan keragaman yang melimpah ini meliputi sumber dan potensi alam di darat, perairan, maupun udara. Keberagaman sumber daya alam ini merupakan salah satu modal utama Indonesia dalam mengembangkan sektor pariwisatanya,, mengingat Indonesia masih didominasi oleh daya tarik ataupun atraksi wisata berbasis alam.

Secara umum, kekayaan alam di Indonesia dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu flora, fauna, tanah, mineral, atmosfer, potensi dirgantara, air, laut, dan energi dari alam.

Selain itu, kekayaan alam di Indonesia juga dibagi sesuai sifatnya, yakni kekayaan alam yang dapat diperbarui, kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui, dan kekayaan alam yang bersifat tetap.

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini harus menjadi modal utama bagi pembangunan Indonesia dan perlu dimanfaatkan secara optimal dengan mengembangkan penguasaan teknologi pemanfaatan yang tepat guna, sumber daya manusia yang unggul dan tangguh, serta harus atas dasar konsep pengelolaan berkelanjutan dan berwawasan konservasi guna menjaganya tetap lestari dan dapat terjaga hingga generasi yang akan datang.

2) Panca Gatra

a) Ideologi

Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi adalah konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi sendiri dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis. Sedangkan ketahanan Ideologi adalah sikap mental bangsa Indonesia akan fondasi ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar dari pemersatu bangsa tentu memiliki peran vital dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, terutama di era globalisasi saat ini.

Dengan keterbukaan informasi di segala aspek kehidupan, globalisasi telah membuat sekat-sekat nasional yang dulu terjaga dan terpelihara dengan baik menjadi terbuka secara luas dan sulit terkendali. Hal ini menyebabkan bangsa Indonesia tidak hanya merupakan warga Indonesia, melainkan juga bagian warga dunia yang terbuka dengan informasi-informasi mancanegara yang membanjirinya namun juga terbuka dengan dampak-dampak perubahan dari luar yang juga ikut mempengaruhinya. Sentimen global telah menjadi kesadaran warga suatu bangsa sebagai bagian dari warga dunia.

Dalam konteks keterbukaan tersebut, tentu pengaruh sistem dan tata ideologi dunia juga telah menjadi bagian dari kesadaran bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Francis Fukuyama yang meramalkan bahwa kapitalisme-liberal merupakan satu-satunya ideologi yang berjaya. Ramalan tersebut tentu sejatinya sudah dapat dilihat dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia. Ekonomi kapitalisme telah secara berangsur-angsur meluas. Privatisasi di berbagai sektor BUMN dan sektor kekayaan alam serta semakin diabaikannya ekonomi kerakyatan dalam sistem perkoperasian sungguh merupakan tantangan yang harus dijawab.

b) Politik

Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik Indonesia yang didasarkan pada cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Sejak masa Reformasi dan era keterbukaan informasi yang melanda Indonesia, tantangan-tantangan di ranah politik menjadi bertambah dan semakin kompleks. Prinsip-prinsip transparansi dalam kebijakan publik/ politik, akuntabilitas, *law enforcement*, partisipasi luas publik, pemerintahan yang bersih, reformasi birokrasi, demokratisasi, dan lain-lainnya telah menjadi norma keseharian dalam diskursus pemerintahan baik di tingkat nasional maupun regional.

Dengan terus menyelenggarakan kehidupan demokratis yang didasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta permusyawaratan perwakilan dengan dasar persatuan dan ketuhanan untuk tercapainya keadilan sosial, ketahanan nasional Indonesia harus dapat menyusun dan membangun konsep kelembagaan maupun penyelenggaraan kehidupan politik yang demokratis, akuntabel, bersih, dan melayani.

c) Ekonomi

Aspek Pancagatra selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakatnya dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Oleh

karenaya, ketahanan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila dan dijiwai oleh semangat gotong royong. Sedangkan Pengertian ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang memiliki kemampuan untuk memelihara stabilitas ekonomi bangsa dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata (Karsono, 1999).

Setelah sistem kapitalisme dunia menjadi norma keseharian bangsa-bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia, ketahanan nasional di bidang ekonomi harus mempertimbangkan kondisi merajalelanya ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh sistem kapitalisme tersebut. Fakta bahwa ketimpangan ekonomi yang semakin meluas tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi daya tahan bangsa ini dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin mengglobal.

d) Sosial-Budaya

Indonesia memiliki aspek sosial budaya yang sangat beragam. Kekayaan aspek ini perlu dijaga dan dilestarikan oleh generasi berikutnya. Di era modern ini, aspek sosial budaya lokal mulai tergerus dengan kebudayaan asing. Untuk meminimalisasi risiko hilangnya aspek tersebut,

keberlangsungan sosial budaya lokal harus diperhatikan oleh seluruh warga negara. Hal tersebutlah yang mendorong perlunya daya tahan negara terhadap aspek sosial-budaya.

Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai oleh kepribadian nasional yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang bersatu, cinta tanah air, berkualitas, serta dapat merespons secara baik dan adaptif penetrasi nilai-nilai maupun budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan tujuan hidup negara.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan ketahanan sosial budaya Indonesia antara lain ialah melalui dengan merekonstekstualisasikan, mendinamisasi, dan menyajikan ulang kebudayaan daerah secara kreatif, realistis, dan mengikuti gerak zaman; menghidupkan kebudayaan nasional yang bercorak integratif dan responsif untuk pembentukan karakter bangsa Indonesia yang dinamis dan tanggap terhadap perubahan zaman; pembentukan integritas nasional sebagai pandu ketahanan nasional di bidang sosial budaya; pengembangan kehidupan beragama yang toleran, terbuka, dan berbudaya; serta pelaksanaan pendidikan nasional yang demokratis

yang bisa membentuk insan-insan berkarakter dan berbudaya yang nasionalis.

e) **Pertahanan & Keamanan**

Ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan didefinisikan sebagai kondisi daya tahan bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara (patriotisme) yang memiliki kemampuan untuk memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, menyelenggarakan pembangunan, serta mempertahankan kedaulatan negara dengan menangkal segala bentuk ancaman.

Pertahanan keamanan adalah upaya seluruh rakyat dalam usaha menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai rasa aman bagi bangsa, negara beserta perjuangannya, dengan Tentara Nasional Indonesia selaku pihak yang bertanggung jawab atas penjagaannya sebagai garda terdepan. Pelaksanaannya dilakukan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan bangsa dalam segenap aspek kehidupan secara terencana, terintegrasi, dan terkoordinasi melalui sistem keamanan rakyat semesta/Sishankamrata (Karsono, 1999).

Dalam menentukan indikator-indikator pengukuran dalam Astagatra tersebut, Lemhanas mengaktualisasikan paradigma nasional. Adapun implementasi dari paradigma nasional tersebut yakni Pancasila sebagai landasan filosofis, falsafah dasar negara

dan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pancasila mutlak menjadi acuan utama dalam implementasi kehidupan nasional. Selanjutnya, paradigma kedua adalah UUD 1945 beserta berbagai amandemennya yang merupakan landasan yuridis di mana Seluruh pasal yang tercantum di dalam UUD 1945 beserta seluruh amandemennya merupakan indikator yuridis yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh setiap elemen kenegaraan.

Secara teknis, implementasi ketahanan nasional dilakukan dengan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati dunia. Untuk menjadikan bangsa yang berdaya saing, maka bangsa Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan, dan akuntabel.

Beberapa permasalahan besar adalah masalah politik yang terkait dengan kesiapan menghadapi globalisasi, politik luar negeri yang bebas aktif, masalah disintegrasi dan otonomi, sistem partai politik dan birokrasi. Permasalahan di bidang ekonomi adalah biaya tinggi dengan adanya pungutan liar dalam transaksi dan kebijakan pertanian yang tidak berpihak pada petani. Pada bidang sosial budaya adalah rentannya klaim-klaim budaya dari negara tetangga.

Setidaknya ada empat sarana untuk mengimplementasikan ketahanan nasional (Srijanti, 2011):

- Implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik; menghadapi globalisasi diperlukan peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional. Di samping itu banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu persoalan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan modernisasi yang tidak tercerabut dari akarnya, sementara untuk kasus disintegrasi hendaknya pemerintah mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik tersebut.
- Implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi; hal-hal yang harus dibenahi dalam bidang ekonomi adalah menata kebijakan fiskal, industri dalam negeri dan swasembada pangan agar tidak terjadi krisis pangan.
- Implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial dan budaya; Dapat dilakukan dengan standardisasi pendidikan serta keterjangkauan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan, toleransi dalam berbagai hal, termasuk agama, serta yang harus segera diimplementasikan adalah jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
- Implementasi ketahanan nasional di bidang hukum. Hal ini dilandasi oleh aspek keadilan, profesionalitas hakim, penegakan hukum secara adil, serta yang harus segera diberantas adalah

kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat dan politisi.

Selanjutnya, kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga Ketahanan Nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Dalam mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan kesadaran setiap warga Indonesia untuk:

- Memiliki semangat perjuangan non fisik berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak kenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
- Sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, sehingga setiap WNI baik individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Oleh karena bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.

Hal tersebut tercermin dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air (Sunarso, 2008).

Apabila setiap WNI memiliki semangat juang, serta sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam masyarakat berbangsa dan bernegara maka akan tercermin keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia. Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan suatu kebijakan umum dan pengambil kebijakan yang disebut Polstranas (Sunarso, 2008).

2. Ketahanan Destinasi Pariwisata

Ketergantungan pariwisata adalah kenyataan bagi semakin banyak kota, wilayah, dan negara di seluruh dunia (OECD, 2020). Pada saat yang sama, sistem pariwisata mengungkapkan banyak kerentanan terhadap lingkungan internal dan eksternal mereka (Ghaderi et al., 2014). Oleh karena itu, tidak mengherankan menemukan sarjana dan praktisi pariwisata menginvestasikan banyak waktu dan energi dalam penelitian yang berfokus pada strategi ketahanan yang akan membantu memastikan tujuan pariwisata bertahan lama dalam menghadapi krisis atau kesulitan serta dalam kaitannya dengan perubahan yang lambat. Untuk lebih memahami pendekatan ketahanan yang berbeda dan lebih memahami hubungannya dengan destinasi sebagai sistem yang kompleks, diperlukan tinjauan literatur seputar sistem pariwisata.

Istilah resiliensi telah banyak diperdebatkan lintas disiplin selama beberapa dekade (Manyena, 2006). Sebagai ekosistem cerdas di

destinasi, fokusnya adalah pada pemahaman ketahanan dari sudut pandang sosial-ekologis di tingkat destinasi/ sistem. Resiliensi dari perspektif ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh Holling (1973), sebagai kemampuan suatu sistem untuk menahan gangguan dan kembali ke kondisi stabil mendekati keseimbangan. Holling & Gunderson (2002) lalu meninjau kembali definisi ini, beralih dari fokus pada menghalau gangguan menjadi menghadapi gangguan yang menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif atau fleksibel. Mereka mendefinisikan ketahanan dari perspektif ekologi yang diperluas sebagai besarnya gangguan yang dapat diserap sistem sebelum mengubah strukturnya. Demikian pula, Walker et al., (2004) yang mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas suatu sistem untuk menghadapi gangguan dan mengatur ulang saat mengalami perubahan agar tetap mempertahankan fungsi, struktur, identitas dan umpan balik yang sama. Sedangkan Carpenter et al., (2001) mendefinisikan resiliensi sebagai cerminan dari kekuatan sistem manusia-lingkungan yang digabungkan. Bodin & Wiman (2004) berpendapat bahwa semakin kompleks suatu sistem, semakin tinggi kerapuhannya, tetapi juga semakin besar potensi perubahan strukturalnya.

Konseptualisasi ketahanan yang lebih baru dalam penelitian pariwisata telah sampai pada pendekatan evolusioner. Pendekatan ini berbelok dari gagasan keseimbangan dan lebih berfokus pada kualitas yang melekat pada destinasi wisata (Davoudi, 2012). Upaya menuju ketahanan evolusioner melampaui pemeliharaan

menuju perbaikan sistem melalui adaptasi dan transformasi berkelanjutan. Pemikiran dan tindakan dalam ketangguhan evolusioner memperluas cakupan sistem melewati resistensi dan pemulihan ke lintasan reorientasi dan pembaharuan (Boschma, 2015). Boschma dan Wink mengamati bahwa ketahanan telah berevolusi untuk dipahami sebagai sifat dari sebuah sistem sehingga mengejar ketahanan destinasi di tingkat sistem sebagai orientasi strategis keseluruhan tidak hanya membantu kelangsungan destinasi namun dengan menggabungkan ketahanan ke dalam jalinan destinasi dapat membantu mengamankan umur panjang sistem melalui saluran keunggulan kompetitif yang diperbarui (Bodin & Wiman, 2004).



Gambar 14. *Tourism Resilience Roadmap*
(ResilientTourism, 2022)

Tujuan utama dalam kajian ketahanan destinasi wisata ialah untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana destinasi dapat mengoperasionalkan ketahanan di tingkat sistem serta

bagaimana infrastruktur dan tata kelola pariwisata yang cerdas dapat digunakan untuk mendukung upaya ketahanan tersebut. Tinjauan literatur tentang peningkatan adaptasi dan membangun ketahanan menarik perhatian pada berbagai kondisi dan prinsip. (Hartman, 2018) menyatukan temuan-temuan ini untuk menawarkan serangkaian enam syarat utama dalam membangun ketahanan destinasi, yakni:

- 1) variasi dan redundansi daya tarik
- 2) konektivitas
- 3) pemerintahan yang polisentris
- 4) kepekaan lingkungan
- 5) pembelajaran dan refleksifitas
- 6) pemikiran dan sistem adaptif.

Setiap kondisi sangat bergantung pada upaya kolaboratif antara pelaku wisata dan dapat diasumsikan bahwa penerapannya mungkin lebih menantang untuk beberapa destinasi dibandingkan yang lain. Selanjutnya Hartman (2018) juga memaparkan bahwa destinasi mungkin menghadapi kesulitan jika sistem pariwisata mereka 'terperangkap' dalam salah satu dari empat perangkap khusus (kekakuan, penguncian, kemiskinan, dan isolasi). Jebakan ini dapat menyebarkan lintasan perkembangan tertentu yang tidak kondusif untuk pembangunan ketahanan destinasi. Destinasi yang menyadari jebakan ini akan meningkatkan pengawasan tingkat

sistem untuk menghindarinya dan memperluas upaya ketahanan mereka.

Hartman (2018) mengusulkan lima pilar destinasi cerdas yang mendukung enam kondisi ini dan karenanya berkontribusi pada ketahanan destinasi, yakni:

1) *Sensing*

Destinasi wisata sejatinya dikelola secara unik untuk wisatawan merasakan kondisi lingkungannya (misalnya kepadatan penduduk, cuaca, lalu lintas, konsumsi energi) karena infrastruktur teknologi yang tertanam di lingkungan fisik mereka dan analisis *big data real-time* mereka. Ini berarti destinasi dapat mengambil sikap proaktif dan menanggapi sinyal peringatan dini. Kemampuan pemantauan dan pelaporan terdaftar sebagai indikator kapasitas adaptif dan juga merupakan dimensi inti dari destinasi wisata.

Sensing tidak hanya terintegrasi ke dalam jalinan tujuan pembangunan destinasi tetapi juga sangat terdistribusi. Observatorium pariwisata memainkan peran penting dalam mendistribusikan kemampuan penginderaan di berbagai pemain destinasi. Observatorium pariwisata sangat penting dalam membangun ketahanan terhadap krisis. Oleh karena itu, penginderaan menyiratkan peningkatan kemampuan untuk mencegah kejadian krisis tetapi juga dapat membantu dalam upaya pemulihan setelah bencana. Mengetahui keberadaan

wisatawan saat terjadi bencana menjadi salah satu masalah terbesar dalam penanggulangan bencana karena mobilitas wisatawan di dalam destinasi. Destinasi dituntut untuk memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk menyusun dan mendistribusikan informasi tersebut.

2) *Opening*

Gagasan tentang destinasi wisata yang terkait erat dengan ekosistem dan struktur tata kelola merupakan aspek penting lainnya untuk membangun kapasitas adaptif. Manajemen destinasi yang cerdas menyiratkan keterbukaan keruangan yang ada di dalam dan di luar pariwisata. Destinasi wisata mendorong konvergensi ruang hunian serta infrastruktur umum dan wisata. Mereka menghubungkan pariwisata dengan mobilitas umum dan sistem utilitas. Kemampuan destinasi wisata untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien dan membuka sumber daya baru juga berguna saat menghadapi krisis atau bencana. Penduduk yang membuka rumah pada saat krisis disarankan dapat memberikan bantuan yang signifikan ketika infrastruktur wisata hancur, atau terisi penuh dan personel darurat perlu diakomodasi (Hajibaba et al., 2016).

Selanjutnya, sebuah komunitas warga yang besar, beragam, dan kaya dipandang penting untuk ketahanan destinasi. Destinasi

wisata perlu secara aktif mencari variasi tersebut dan memungkinkan pembangunan jaringan (M. P. Hall et al., 2018).

3) *Sharing*

Sebagai sebuah sektor yang dibangun dan “ditumpangangi” oleh banyak sektor maupun pihak, pariwisata sejainya perlu memiliki gagasan fleksibel tentang segala informasi kepariwisataan dan juga secara aktif mempromosikan data bersama dan sumber daya lainnya seperti konektivitas Internet dan infrastruktur teknologi inti seperti jaringan sensor. Para pemangku kepentingan akan mempraktikkan keterbukaan dan berbagi melalui data terbuka dan inisiatif inovasi digital. Lebih lanjut lagi, konsep berbagi akan difasilitasi oleh interoperabilitas dan kompatibilitas yang dibangun ke dalam ekosistem digital yang membentuk lapisan teknologi tujuan cerdas. Pembukaan silo organisasi, repositori data dan infrastruktur bersama dengan gagasan berbagi dan kreasi bersama yang meluas memfasilitasi tingkat dan jenis konektivitas baru, yang digambarkan sebagai kondisi penting untuk mencapai ketahanan (Hartman, 2018).

Namun, dalam *smart destination*, konektivitas terjadi tidak hanya di tingkat organisasi atau tata kelola tetapi di semua tingkatan seperti: Tingkat fisik terhubung melalui dan dengan lapisan teknologi (misalnya melalui IoT); teknologi terhubung dalam ekosistem digital, mengizinkan koneksi antar data, dan

juga memungkinkan beragam koneksi di antara berbagai penyedia (ekosistem bisnis); dan, berbagi teknologi dan data (misalnya Wi-Fi gratis dan informasi gratis melalui aplikasi seluler) semakin membangun hubungan baru dengan pemangku kepentingan, terutama di antara wisatawan. Masalah ketahanan yang penting adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama wisatawan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat konektivitas Internet, kualitas *interface* yang tersedia di *smart destination*, dan ketersediaan saluran komunikasi seluler di mana-mana melengkapi destinasi wisata dengan kemampuan yang jauh lebih besar untuk mendorong informasi penting ke tangan pemangku kepentingan.

4) *Governance*

Ketahanan destinasi membutuhkan keseimbangan antara panduan *top-down* dan pendekatan organik yang diatur sendiri. DMO yang tangguh dapat secara signifikan memengaruhi jalannya pemulihan krisis. Demikian pula, tata kelola yang kuat oleh DMO merupakan dorongan penting karena memungkinkan koordinasi tetapi juga mengakui tata kelola destinasi perlu mengikuti tata kelola partisipatif. Tata kelola destinasi wisata yang baik bukan hanya tentang administrasi yang baik tetapi melibatkan transformasi lembaga tata kelola dan proses tata kelola (Carpenter et al., 2001).

Selanjutnya, kemitraan publik-swasta merupakan elemen inti dari pengembangan sebuah destinasi wisata. Dengan demikian, sistem tata kelola polisentris merupakan kondisi penting untuk ketahanan destinasi dan harus tertanam kuat dalam pemikiran pengelola destinasi (Hartman, 2018). Keuntungan utama dari model tata kelola partisipatif dalam pariwisata adalah bahwa para pemangku kepentingan saling mengenal lebih awal dan hubungan komunikasi dan pola kolaborasi sudah terjalin, yang berarti bahwa jaringan pemangku kepentingan dapat lebih mudah berpartisipasi secara aktif ketika adanya tekanan atau guncangan.

5) *Innovating*

Salah satu tujuan eksplisit dari manajemen sebuah destinasi wisata adalah mendorong inovasi terbuka di destinasi tersebut. Tak dipungkiri bahwa sebagian besar destinasi yang menjadi praktik baik menyarankan adanya observatorium khusus yang memungkinkan untuk menjadi pusat perancangan dan eksperimentasi tiap elemen dalam destinasi wisata. Observatorium ini akan mencontohkan budaya inovasi yang menembus tujuan cerdas. Inovasi dan kreativitas adalah elemen fundamental dari ekosistem bisnis digital yang adaptif di destinasi wisata dan secara aktif didukung oleh lapisan teknologi dan data. Inovasi tersebut juga didorong oleh lapisan tata kelola. Misalnya, dalam kasus Seoul, kompetisi dan hadiah

diterapkan untuk mendorong inovasi yang relevan dengan pariwisata (Carpenter et al., 2001). Transfer pengetahuan yang terus dipraktikkan memastikan bahwa tidak hanya informasi tetapi juga pengetahuan dapat menyebar ke seluruh area destinasi, yang diidentifikasi sebagai elemen penting dari kapasitas adaptif oleh Stephenson (2010) dan diidentifikasi sebagai kemampuan belajar.

Hal ini memungkinkan destinasi wisata untuk membangun kemampuan pembelajaran dan reflektivitas yang dicantumkan Hartman (2018) sebagai syarat kelima untuk ketahanan destinasi. Mampu mengembangkan serta mengimplementasikan solusi inovatif secara efisien untuk mengatasi masalah jangka panjang (seperti fenomena *overtourism* atau menangani kebutuhan transportasi segera setelah bencana alam), mampu membangun kemitraan yang positif, serta dapat menyediakan data dan infrastruktur teknologi yang tersebar luas merupakan aspek destinasi wisata yang dapat mendukung ketahanan destinasi itu sendiri.

Kesimpulannya, destinasi wisata secara inheren bertujuan untuk membangun enam kondisi ketahanan (Hartman, 2018). Yang penting adalah ketahanan destinasi wisata perlu dibangun dengan prinsip “berpikir dalam sistem adaptif”. Selain itu, manajemen destinasi membutuhkan pola pikir pariwisata yang cerdas yang merangkul konektivitas teknologi, fleksibilitas, kreativitas, dan

keterbukaan yang perlu menembus semua strategi pembangunan. Komponen-komponen tersebut tidak boleh dipahami sebagai dimensi yang sepenuhnya independen, melainkan sebagai elemen manajemen pariwisata yang saling mendukung, dan secara individu maupun gabungan meningkatkan ketahanan suatu destinasi.

3. *Destination Management Organization*

Sebagai sebuah wilayah yang memiliki karakteristik pengembangan khusus, mengembangkan sebuah destinasi wisata tentunya membutuhkan perlakuan dan tata kelola khusus. Ini berkaitan dengan bagaimana pengelola destinasi wisata mengakomodasi seluruh kepentingan dari para *stakeholders* yang memiliki andil di destinasi tersebut. Selain itu, pengelola destinasi wisata juga berlaku sebagai unit bisnis yang perlu memperhatikan bagaimana dinamika pasar pariwisata baik skala nasional maupun global sehingga produk wisatanya dapat terpasarkan dengan baik. Oleh karenanya, sistem manajemen destinasi yang baik merupakan hal yang vital keberadaannya.

Merujuk kepada definisi dari UNWTO (2019) manajemen destinasi terdiri dari manajemen terkoordinasi dari semua elemen yang membentuk tujuan wisata. Manajemen destinasi mengambil pendekatan strategis untuk menghubungkan elemen-elemen yang terkadang sangat terpisah ini untuk pengelolaan destinasi yang lebih baik. Manajemen gabungan dapat membantu menghindari fungsi

yang tumpang tindih dan duplikasi upaya sehubungan dengan promosi, layanan pengunjung, pelatihan, dukungan bisnis, dan mengidentifikasi kesenjangan manajemen yang tidak ditangani.

Manajemen destinasi memerlukan koalisi dari banyak organisasi dan kepentingan yang bekerja menuju tujuan bersama, yang pada akhirnya menjadi jaminan daya saing dan keberlanjutan destinasi pariwisata. Peran Destination Management Organization (DMO) atau organisasi pengelola destinasi harus memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di bawah strategi yang koheren dalam mengejar tujuan bersama ini.

Meskipun DMO biasanya melakukan aktivitas pemasaran, kewenangan mereka menjadi jauh lebih luas, untuk menjadi pemimpin strategis dalam pengembangan destinasi. Ini adalah unsur penting untuk sukses di setiap tujuan wisata dan banyak tujuan sekarang memiliki DMO untuk memimpin.

Dari fokus pemasaran dan promosi tradisional, trennya adalah menjadi organisasi terkemuka dengan mandat yang lebih luas yang mencakup perencanaan strategis, koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam struktur tata kelola yang memadai dengan integrasi berbagai pemangku kepentingan yang beroperasi di tempat tujuan di bawah tujuan bersama. Tujuan di mana organisasi semacam itu belum ada semakin membuat atau berencana untuk membuat DMO sebagai entitas organisasi untuk memimpin.

Apa yang dilakukan organisasi manajemen tujuan (DMO) adalah mewakili suara tujuannya kepada calon pengunjung. Ini bekerja dengan mitra perdagangan perjalanan untuk memberikan informasi kepada wisatawan tentang tujuan sebelum mereka memutuskan ke mana harus pergi berlibur.

Lalu, mengapa harus ada DMO? Alasan utamanya ialah karena destinasi selalu mencari cara untuk menonjol dari persaingan, tetapi untuk melakukannya, mereka membutuhkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Dan itulah yang dimiliki semua DMO yang sudah mapan. Sebuah organisasi manajemen tujuan bekerja dengan dewan pariwisata dan konvensi dan biro pengunjung. Ini memiliki rekam jejak yang terbukti untuk membangkitkan kesadaran akan tujuan di antara wisatawan dan pelancong, itulah sebabnya semua tujuan harus peduli dengan DMO (Fasa et al., 2022).



Gambar 15. ITDC (*Indonesia Tourism Development Corporation*) sebagai salah satu DMO yang berhasil mengembangkan Nusa Dua dan Mandalika (Ramadhian, 2021)

Destinasi tidak selalu mendapat perhatian, pendanaan, dan investasi yang adil dari pemerintah dan perusahaan yang dapat menyebabkan kurangnya pariwisata dan peluang pertumbuhan. Namun, destinasi merupakan bagian penting dari ekonomi dunia. Organisasi manajemen destinasi (DMO) ada karena alasan ini: untuk menciptakan kemakmuran ekonomi di masyarakat melalui promosi, perencanaan strategis, dan upaya pemasaran yang menarik wisatawan sambil memastikan bahwa pengunjung ini memiliki pengalaman yang tak terlupakan.

DMO juga menyatukan organisasi yang melayani semua aspek pengalaman pengunjung – mulai dari penyedia penginapan, operator objek wisata, restoran, dan pengecer – sehingga mereka dapat berbagi wawasan tentang apa yang membuat komunitas mereka menonjol sebagai tujuan wisata. Destinasi dengan DMO yang kuat akan lebih kompetitif, memiliki visibilitas yang lebih tinggi, dan memiliki performa ekonomi yang lebih baik daripada destinasi yang tidak memiliki DMO. Perencanaan yang cermat ini memastikan keberhasilan tujuan wisata yang strategis dan berjangka panjang. Koordinasi mendalam ini bergerak melampaui pemasaran, dan merupakan alasan mengapa fungsi DMO baru-baru ini disebut sebagai manajemen, bukan pemasaran.

Sejalan dengan pernyataan di atas, DMO merupakan organisasi pengelola destinasi yang keberadaannya memiliki banyak peran yang antara lain (Fasa et al., 2022):

1. Manfaatkan potensi unik destinasi wisata

Setiap destinasi memiliki sesuatu yang berbeda dan unik untuk ditawarkan. DMO menonjolkan eksklusivitas itu untuk menggambarkan tujuan sebagai daya tarik yang lebih baik daripada yang lain.

2. Melakukan riset pasar

Mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan melakukannya adalah sebuah seni, dan DMO adalah ahlinya. Organisasi-organisasi ini dapat melakukan riset pasar melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang mereka untuk lebih meningkatkan status destinasi di tahun-tahun mendatang.

3. Menerapkan strategi pemasaran destinasi

Untuk destinasi, sangat penting untuk terlihat secara *online* untuk memandu calon pengunjung. Organisasi manajemen destinasi berfokus pada strategi pemasaran untuk mempromosikan acara, produk, layanan, *landmark*, dan atraksi wisata di destinasi.

DMO bertanggung jawab untuk mempromosikan industri pariwisata mereka melalui kampanye iklan strategis yang menjangkau khalayak sasaran dengan pesan atau informasi tertentu. Konten tujuan strategis ini berupa media sosial, agunan

cetak, acara *co-sponsor*, *hosting influencer*, bekerja dengan kamar dagang lokal, dan lain sebagainya.

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan

Di abad ke-21, ekonomi yang berkelanjutan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Karena perjalanan menjadi dapat diakses oleh lebih banyak orang di semua kelompok pendapatan dan budaya, destinasi harus mempromosikan pariwisata dengan cara agar pertumbuhan ekonomi mereka tetap berkelanjutan. Dan itulah yang dilakukan DMO.

5. Menarik investasi

Setiap destinasi harus menjadi yang terbaik, dan itu termasuk memasarkan komunitasnya sendiri untuk menarik investor. Oleh karena itu, DMO adalah salah satu cara paling efektif bagi destinasi untuk memasarkan diri mereka sendiri dengan cara yang tepat untuk menarik lebih banyak investasi secara layak. Ini membutuhkan pendekatan kolaboratif dari pemangku kepentingan publik dan swasta.

6. Melibatkan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kondisi yang lebih menguntungkan

DMO membawa semua orang ke jalan menuju pariwisata yang berkelanjutan dan sukses. Mereka tidak hanya melayani wisatawan, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara pengunjung dan bisnis lokal; mereka dapat membantu

mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk lokal.

Lalu, bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah DMO? Laterilawa (2013) menjabarkan indikator keberhasilan kinerja DMO di antaranya adalah:

a) Organisasi

Indikator untuk mengetahui kinerja pengorganisasian dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Persepsi wisatawan dan masyarakat terhadap peranan dan kontribusi DMO
- Survey dukungan masyarakat terhadap keberadaan DMO
- Perbandingan pengorganisasian antar DMO dalam suatu destinasi.

b) Pemasaran

Indikator untuk mengetahui kinerja pemasaran dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Reaksi wisatawan terhadap *destination branding* dan *visual icon* destinasi yang dipromosikan DMO

- Kesesuaian implementasi visi dan misi terhadap destination branding
- Pemahaman dan respon preferensi ekspektasi pengalaman berwisata
- Pengeluaran/ anggaran total pemasaran.
- Realisasi target market yang dicapai.
- Efektifitas dan produktivitas pengemasan produk wisata.
- Tingkat hubungan kerjasama antara destinasi pariwisata dengan usaha perjalanan wisata (operator perjalanan wisata).

c) Kualitas Pelayanan dan Pengalaman Berwisata

Indikator untuk mengetahui kinerja penilaian kualitas pelayanan dan pengalaman berwisata dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Penilaian kepuasan wisatawan terhadap pelayanan dan pengalaman berwisata.
- Solusi yang dilakukan terhadap permasalahan pelayanan dan pengalaman berwisata.
- Validasi standar pengukuran kualitatif dan kuantitatif pelayanan dan pengalaman berwisata.

- Performansi produktivitas proses penyampaian pelayanan dan pengalaman berwisata.

d) Penelitian dan Informasi

Indikator untuk mengetahui kinerja penilaian penelitian dan informasi dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Ketersediaan anggaran penelitian dan monitoring
- Jumlah penelitian yang dilakukan.
- Variasi dan validasi metodologi penelitian yang digunakan.
- Keberlanjutan dan kesinambungan program perencanaan dengan implementasi serta pendampingan.
- Proporsi keterlibatan wisatawan dalam penelitian.

e) Pengembangan sumber daya manusia

Indikator untuk mengetahui kinerja pengembangan sumber daya manusia dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Survey persepsi tenaga kerja terhadap program pendidikan dan pelatihan yang pernah dilakukan.
- Survey persepsi wisatawan terhadap kualitas kompetensi dan performansi tenaga kerja.
- Evaluasi jumlah dan kualitas program pendidikan dan pelatihan yang pernah dilakukan.

- Penilaian kapabilitas output dan outcome penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- Penilaian dan kesesuaian kebutuhan tenaga kerja.
- Tersusunnya data base informasi jenjang karier bagi tenaga kerja.

f) Sumber dana

Indikator untuk mengetahui kinerja pengaturan keuangan dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Evaluasi jumlah investasi yang terealisasi
- Teridentifikasinya besaran investasi yang terserap dalam pengembangan destinasi pariwisata.

g) Pengelolaan pengunjung

Indikator-indikator untuk mengetahui kinerja pengelolaan pengunjung dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Survey tanggapan wisatawan terhadap ketersediaan dan kualitas program pengelolaan pengunjung (zonasi, daya dukung, media dan sarana interpretasi, regulasi penetapan harga, dll)

- Survey tanggapan implikasi program pengelolaan pengunjung terhadap kenyamanan berwisata baik positif dan negatif.
- Terbentuknya mekanisme pengelolaan pengunjung yang optimal berdasarkan kemudahan akses, penggunaan fasilitas, serta penyampaian informasi.

h) Pengelolaan aktivitas pariwisata berkelanjutan

Indikator untuk mengetahui kinerja pariwisata berkelanjutan dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Survey reaksi wisatawan terhadap program pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian (konservasi).
- Penilaian dampak perilaku wisatawan terhadap kerusakan yang ditimbulkan.
- Penilaian efektifitas program pengelolaan pengunjung terhadap peningkatan kepuasan pengunjung.
- Evaluasi implikasi pengelolaan pengunjung terhadap peningkatan kualitas lingkungan.

i) Pengelolaan krisis

Indikator untuk mengetahui kinerja pengelolaan krisis dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Survey respon wisatawan terhadap citra destinasi pariwisata terkena krisis.
- Survey persepsi wisatawan terhadap implikasi resiko krisis.
- Program kerjasama dalam dan luar negeri untuk pencegahan dan penanggulangan pengelolaan krisis.
- Dokumentasi dan ketersediaan data base informasi pencegahan dan penanggulangan krisis.
- Ketersediaan rencana tindak pengelolaan krisis.
- Keseimbangan informasi pencegahan dan penanggulangan krisis.

j) Kontribusi terhadap Masyarakat

Indikator untuk mengetahui kinerja kontribusi terhadap masyarakat dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Kemerataan manfaat bagi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.
- Wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal
- Masyarakat setempat memiliki peluang yang sama dalam kegiatan ekonomi pariwisata dengan penduduk pendatang;

- Kegiatan pariwisata yang dirasakan oleh penduduk lokal sebagai *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-welfare*.

k) Kontribusi terhadap Lingkungan

Indikator untuk mengetahui kinerja kontribusi lingkungan dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Menjamin perlindungan terhadap kesinambungan kualitas lingkungan hidup disekitar daerah wisata
- Memastikan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan
- Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisasi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

l) Kontribusi terhadap ekonomi

Indikator untuk mengetahui kinerja kontribusi ekonomi dalam DMO dapat diperoleh dari:

- Peningkatan pendapatan pemerintah lokal melalui PAD
- Peningkatan pendapatan masyarakat di destinasi pariwisata
- Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Keberadaan DMO sebagai unit organisasi pengelola wilayah yang secara khusus dikembangkan sebagai destinasi pariwisata sejatinya merupakan perwujudan nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata di suatu daerah sekaligus sebagai agen dalam upaya penguatan ketahanan destinasi pariwisata tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno dalam acara Kick Off program penguatan Destination Management Organization dan Destination Governance (DMO-DG) menyatakan bahwa fungsi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi DMO sangat krusial dan sangat sentral. Hal ini karena dapat menyatukan berbagai komponen untuk membangun, menata, mengontrol, mempromosikan suatu destinasi yang bertanggung jawab, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat pendekatan orkestrasi dan integrasi sistem di destinasi untuk pembangunan di sebuah wilayah atau daerah. Oleh karenanya, penguatan kedudukan dan fungsi DMO merupakan salah satu program strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mempercepat revitalisasi destinasi dan pemulihan pariwisata pascakrisis pandemi.

4. Konsepsi Sistem Manajemen Organisasi

Dewasa ini, di masa di mana kecenderungan orang untuk pergi berwisata semakin besar dan masif, keberadaan sebuah sistem manajemen kepariwisataan dalam berbagai lingkup pengembangan

akan memainkan peran penting dalam merencanakan perjalanan yang sempurna. Sistem manajemen pariwisata memungkinkan pengguna sistem atau dalam konteks ini wisatawan untuk mengakses semua detail seperti kondisi geografis destinasi wisata, keterjangkauan destinasi wisata, penawaran produk industri wisata, dll. Tujuan utamanya adalah untuk membantu sebuah organisasi pariwisata yang dapat memahami dan mengakomodasi keseluruhan keinginan wisatawan. Sistem ini juga harus dapat digunakan untuk profesional dan bisnis perjalanan. Sistem manajemen pariwisata harus menyertakan solusi untuk melacak pengunjung, menganalisis tren, target pemasaran, dan pengelolaan hubungan pengunjung (Matthew & Rao, 2016).

Menurut International Organization for Standardization, Sistem manajemen adalah cara suatu organisasi mengelola bagian-bagian yang saling terkait dari bisnisnya untuk mencapai tujuannya. Tujuan ini dapat berhubungan dengan sejumlah topik yang berbeda, termasuk kualitas produk atau layanan, efisiensi operasional, kinerja lingkungan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan lain sebagainya. Secara garis besar, terdapat empat elemen utama dalam sistem manajemen yaitu: *plan* (merencanakan), *do* (melakukan), *check* (memeriksa), dan *act* (menindaklanjuti).

Tingkat kerumitan sistem akan tergantung pada konteks spesifik tiap organisasi. Beberapa organisasi terutama yang lebih kecil mungkin hanya berarti memiliki kepemimpinan yang kuat dari

pemilik bisnis, memberikan definisi yang jelas tentang apa yang diharapkan dari setiap karyawan individu dan bagaimana berkontribusi pada tujuan organisasi secara keseluruhan tanpa perlu dokumentasi yang ekstensif. Sementara untuk bisnis yang lebih kompleks, mungkin memerlukan dokumentasi dan kontrol yang ekstensif untuk memenuhi kewajiban hukum dan tujuan organisasi.

Sutono, dkk mengemukakan sebuah model yang akan menjadi panduan dalam mengevaluasi sistem manajemen berbasis organisasi dalam sebuah lingkup pengelolaan destinasi wisata (Sutono, et al., 2022). Dalam model tersebut, 5 hal utama yang perlu dimiliki oleh sebuah organisasi pengelola destinasi wisata adalah sebagai berikut:

- Sinergi

Sinergi adalah suatu gagasan baru yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan suatu gagasan baru yang dilandasi oleh pola pikir atau konsep yang baru. Selanjutnya, Bennis dan Biederman (1998) mengartikan kerjasama yang sinergistik bila kerjasama tersebut bersifat kolaboratif atau *creative collaboration* dengan komitmen yang kuat untuk kepentingan organisasi. Selain itu, Hampden-Turner (1990) menyatakan bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu proses berbagai aktivitas yang berjalan bersama hingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi merupakan hasil dari suatu hubungan

dialogis antara berbagai pengetahuan yang berbeda dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan pengetahuan baru.

- Integrasi

Secara etimologis, integrasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yakni *-integrate; integration-* yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi yang berarti menyatu-padukan; penggabungan atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh; pemaduan (Echols & Shadily, 2005). Integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat dan harmonis antara anggota kesatuan tersebut (Muspiroh, 2013). Integrasi dalam banyak bidang keilmuan diartikan sebagai suatu bentuk penyatuan elemen-elemen yang berbeda karakter dan klasifikasinya berdasarkan konsep, paradigma, dan unit.

- Transaksi

Transaksi dapat diartikan sebagai perpindahan barang, jasa, informasi, pengetahuan dari satu tempat (komunitas) ke tempat (komunitas) lain atau pemindahan barang dari produsen ke konsumen, atau pemindahan barang dari satu individu ke individu yang lain. Selanjutnya, transaksi adalah pertukaran

barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang memengaruhi ekonomi atas bisnis (Skousen et al., 2007). Selain itu, transaksi dapat diartikan sebagai pertukaran yang melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam, dan lainnya atas dasar keinginan masing-masing atau atas dasar ketetapan hukum yang berlaku (Wiyono, 2015).

- Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva riil ataupun aktiva finansial, keputusan dari aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan merupakan keputusan dari investasi (Martono & Harjito, 2010). Selain itu, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Investasi dapat dianggap sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana (Sunariyah, 2011).

- Edukasi

Edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahannya (self-direction), aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru (Craven & Hirnle, 2013). Notoatmodjo (2003) menganggap edukasi atau pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk memengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoatmodjo, 2003). Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu usaha dalam menumbuhkembangkan pendidikan secara sistematis dan berkualitas perlu terus diupayakan hingga tujuan proses pendidikan tercapai secara optimal. Pendidikan memiliki arti penting bagi individu dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa.

Dari penjabaran kelima elemen di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya model SITIE berorientasi pada 5 hal berikut: Sinergi berfungsi sebagai peran sentral dalam menggabungkan berbagai stakeholders pariwisata ramah muslim; Integrasi berfungsi dalam penyelarasan data, informasi, dan komunikasi pariwisata halal; Transaksi berperan sebagai titik pertemuan terjadinya transaksi rantai pasok pariwisata halal; Investasi berperan untuk mengaktifkan peluang bisnis pariwisata halal; dan Edukasi

berperan sebagai diseminasi dan sertifikasi pengetahuan pariwisata halal terapan.

5. *Digital Maturity*

Di Bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa dewasa ini seluruh sektor seakan “dipaksa” untuk turut beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pariwisata. Digitalisasi aktivitas pariwisata secara pasti dilakukan mulai dari pemberian informasi kepada calon wisatawan (yang tentunya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusannya), pola pemesanan dan penyusunan agenda perjalanan, pembentukan pengalaman dalam diri wisatawan, hingga proses evaluasi dan timbal balik dari wisatawan yang telah berkunjung. Hal ini secara naluriah menjalar menjadi sebuah kebiasaan dan sistem baru dari hasil adaptasi sektor pariwisata dengan kemajuan teknologi, hingga akhirnya tak terpisahkan.

Namun, yang perlu diantisipasi selanjutnya ialah bahwa proses digitalisasi yang diperlukan oleh industri pariwisata tidak berhenti sampai disitu saja. Dibutuhkan kecakapan dan kebiasaan sumber daya manusia yang adaptif pula dalam rangka pengelolaan industri yang sudah berubah tersebut. Para pekerja di sektor kepariwisataan sedianya perlu memiliki keahlian tambahan berupa keterampilan dan kondisi melek teknologi sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan mengakomodasikan kompleksitas perubahan dari

proses digitalisasi sektoral yang terjadi. Dari fenomena tersebut maka muncullah konsep *Digital Maturity* (kematangan digital). Sutono dalam bukunya yang berjudul “Digital Maturity: Manajemen SDM pada Theme Park” memaparkan bahwasanya dalam mengantisipasi kemajuan teknologi digital yang tak hanya membawa pengaruh positif namun juga negatif dalam pembangunan sebuah sektor, dibutuhkan topangan sumber daya manusia unggul yang juga adaptif (Sutono, et al., 2021). Oleh karenanya, segala kebutuhan mengenai manajemen sumber daya manusia yang terorganisasi di sebuah lembaga pengelolaan tersebut menjadi fokus utama dari konsep kematangan digital.

Sutono, et al., (2021) mendefinisikan kematangan digital sebagai proses integrasi dan implementasi bertahap dari proses organisasi, manusia, dan sumber daya lainnya ke dalam proses digital dan sebaliknya. Dalam proses mencapai tingkat kematangan digital yang maksimal, organisasi harus mengandalkan strategi digitalisasi dengan KPI yang memungkinkan mereka mengevaluasi implementasi. Jika organisasi tidak memiliki strategi digitalisasi, ini memerlukan risiko yang terkait dengan penerapan keputusan tidak efektif yang berdampak negatif pada organisasi.

Prasyarat lain untuk mencapai tingkat kematangan digital tertinggi adalah ketersediaan infrastruktur yang diperlukan serta struktur dan unit yang relevan. Mereka dapat memberikan proses transformasi digital dalam organisasi. Komponen penting dari tingkat

kematangan digital tertinggi adalah faktor manusia, yang meliputi kemauan manajemen dan staf, serta keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mendigitalkan organisasi. Dengan demikian, memaksimalkan aspek-aspek di atas merupakan proses pencapaian kematangan digital (Sutono, et al., 2021).

Selanjutnya, AON memaparkan bahwa konsepsi kematangan digital suatu organisasi/ lembaga dibangun di atas dua pondasi: teknologi dan kepemimpinan digital. Pondasi teknologi berfokus pada penggunaan dan fungsionalitas teknologi *cloud*, sedangkan pondasi kepemimpinan digital mencakup elemen-elemen mendasar layaknya budaya digital, kepemimpinan, kemampuan dan bakat. Organisasi/ lembaga perlu menguasai teknologi dan kepemimpinan untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari manfaat transformasi digital.

Survei Deloitte yang dilakukan pada Tahun 2020 mengungkapkan korelasi antara kematangan digital perusahaan dan kinerja keuangannya setelah proyek transformasi digital. Studi ini menggunakan 'tujuh pivot digital' untuk menentukan kemajuan organisasi menuju kematangan digital. Pivot tersebut antara lain:

- Infrastruktur yang fleksibel dan aman
- Penguasaan data
- Cerdas secara digital, jaringan bakat terbuka
- Keterlibatan ekosistem

- Alur kerja cerdas
- Pengalaman pelanggan terpadu dan
- Adaptasi model bisnis

Berikutnya, ditemukan fakta bahwa organisasi yang lebih matang secara digital jauh lebih mungkin secara signifikan melebihi rata-rata organisasi/ unit bisnis lainnya dalam industri terutama pada metrik keuangan dibandingkan dengan organisasi yang kurang matang secara digital. Misalnya, unit bisnis dengan kematangan digital yang lebih tinggi menghasilkan pertumbuhan pendapatan tiga kali lebih tinggi daripada perusahaan dengan kematangan digital yang rendah.



Gambar 16. Perbandingan Unit Bisnis dengan berbagai level kematangan digital

(Dieffenbacher, 2022)

Kematangan digital mengukur seberapa siap suatu organisasi untuk memahami dan beradaptasi secara konsisten terhadap permintaan pelanggan (yang dalam konteks ini wisatawan) yang tercipta dari perubahan teknologi yang sedang berlangsung. Perusahaan dengan tingkat kematangan digital yang lebih tinggi sejatinya otomatis

mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mereka mendapatkan keuntungan dari investasi sebelumnya dan digitalisasi yang meningkat. Mereka memiliki penawaran, proses, pemasaran, kemampuan beradaptasi, visi, dan budaya yang unggul. Unit bisnis/ organisasi dengan kematangan digital yang tinggi juga akan mendapat hasil yang cukup signifikan karena mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk memperkirakan dan memahami permintaan pelanggan dan menambahkan nilai digital (*digital value*) lebih cepat daripada organisasi dengan kematangan digital yang lebih rendah.

Kematangan digital juga merupakan proses bertahap yang membutuhkan waktu untuk tumbuh di seluruh organisasi. Sebuah organisasi sejatinya tidak tahu akan jadi apa setelah menjadi dewasa secara digital, dapat dianalogikan selayaknya seorang anak kecil yang tidak tahu akan seperti apa mereka saat dewasa. Hanya sebagian kecil anak yang benar-benar mencapai ambisinya. Begitu juga halnya dengan transformasi digital. Namun, kematangan digital tidak datang secara alami seperti kematangan fisik.

6. *Smart Destination*

Penggunaan teknologi secara ekstensif sedang berlangsung di sektor pariwisata. Hal ini mendorong tumbuh kembangnya pendekatan *smart destination* dalam pengembangan pariwisata. Inisiatif *smart destination* dilakukan dalam upaya membangun ekosistem pariwisata yang layak. Teknologi membantu dalam

mengelola pariwisata serta dampaknya dengan lebih baik. *smart destination* dapat berperan sebagai agen perubahan positif untuk destinasi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif (UNWTO, 2018). Pengembangan *smart destination* tidak hanya selalu berkaitan dengan penerapan teknologi dalam penyelenggaraannya, namun juga dengan pelayanan informasi dan komunikasi secara real time, interkoneksi, serta meningkatkan sinergi antar pelaku pariwisata. Alhasil, *smart destination* dapat menjadi solusi statis dan strategis dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata terutama dalam tujuannya untuk meningkatkan ketahanan destinasi tersebut. *Smart destination* adalah tujuan wisata yang secara inovatif dibangun dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi yang menjamin pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan, dapat diakses oleh semua orang, yang memfasilitasi interaksi dan integrasi pengunjung dengan lingkungannya, meningkatkan kualitas pengalaman di tempat tujuan, dan meningkatkan kualitas hidup penghuni (Lopez de Avila, 2015).



Gambar 17. Visualisasi Konsep *Smart Destination*

(HelloLampPost, 2022)

Menerapkan konsep *smartness* ke dalam destinasi pariwisata membutuhkan para pemangku kepentingan yang saling terkait secara dinamis melalui platform teknologi, dimana informasi yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata dapat saling bertukar secara seketika. Platform terpadu ini memiliki banyak *touch point* yang dapat diakses melalui berbagai perangkat *end user* yang akan mendukung penciptaan dan fasilitasi pengalaman pariwisata secara *real-time* dan dapat meningkatkan efektivitas seluruh pengelolaan sumber daya pariwisata, baik pada tingkat mikro maupun makro. Pada dasarnya, *smart destination* memanfaatkan:

- Lingkungan teknologi (contoh: *internet of thing*, sensor, dll);
- Kecepatan respon pada tingkat makro dan mikro (contoh: *intelligent services*, dll)
- End-user devices in multiple touch-points (smart phone, dll)
- Menyatukan para pemangku kepentingan dengan menggunakan platform dinamis seperti sistem syaraf.

Tujuan utama *smart destination* adalah memanfaatkan sistem untuk meningkatkan pengalaman wisata dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya untuk memaksimalkan daya saing dan kepuasan konsumen sekaligus menunjukkan kesinambungan dalam jangka waktu yang panjang (Buhalis & Amaranggana, 2014).

Smart destinations pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, menyediakan platform/ model cerdas

untuk menyatukan dan mendistribusikan informasi di dalam destinasi, memfasilitasi pengalokasian sumberdaya yang lebih efisien, mengintegrasikan pemasok kepariwisataan pada tingkat makro dan mikro, agar keuntungan yang didapat oleh masyarakat lokal dapat dipastikan (Buhalis & Amaranggana, 2014).

Smart destination merupakan ekosistem yang sebagian besar dikembangkan melalui penggunaan teknologi yang efektif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup warga yang dicapai melalui sistem dan layanan terintegrasi yang efisien. Ruang lingkup *smart destination* dapat dilihat pada model di halaman selanjutnya sebagai berikut:



Gambar 18. *Smart Destination Model*

(Giffinger et al., 2007)

Deskripsi singkat tentang komponen dari Smart Destination Model adalah sebagai berikut:

1. *Smart Mobility (Transport & ICT)*

Mengacu pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan mobilitas perkotaan & dampak lingkungan yang rendah, terdiri dari: *Local Accessibility, international accessibility, Availability of ICT-infrastructure, Sustainable, innovative, and safe transport systems.*

2. *Smart Governance (Participation)*

Mengacu pada strategi dan kebijakan politik, termasuk perencanaan kota yang diperluas yang memungkinkan produksi bersama layanan public diantaranya; *Participation in decision-making, Public and social service, Transparent governance, Political Strategies & Perspectives.*

3. *Smart Economy (Competitiveness)*

Smart Economy dalam konteks daya saing destinasi wisata merupakan cara pandang sebuah transaksi ekonomi yang holistik, bertanggung jawab dan transformatif yang mengarah kepada fleksibilitas dengan mengedepankan proses inovasi dengan cara meningkatkan konektivitas melalui teknologi informasi. *Smart Economy* secara umum dapat membantu pertumbuhan dalam hal; *Innovative spirit, Entrepreneurship, Economic image & trademarks, Productivity, Flexibility of*

labour market, International embeddedness, Ability to transform.

4. *Smart People (Social and Human Capital)*

Mengacu pada kehidupan sosial, dengan tingkat kualifikasi *Level of qualification, Affinity to lifelong learning, Social and ethnic plurality, Flexibility, Creativity, Cosmopolitanism or Open-mindedness, and Participation in public life.*

5. *Smart Living (Quality of Life)*

Smart Living merupakan hal penting dalam membangun *Smart Destination*. *Smart Living* selalu mengacu pada kualitas hidup dalam lingkungan yang layak huni dan aman. Hal tersebut terdiri dari infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari. *Smart Living* memiliki orientasi yang sangat kuat terhadap; *Cultural facilities, Health conditions, Housing quality, Education facilities, Touristic attractivity, Social cohesion.*

6. *Smart Environment (Natural resources)*

Smart Environment juga merupakan komponen yang fundamental dalam membangun *Smart Destination*. Hal ini mengacu pada kepedulian terhadap sumber daya alam dan *planetary culture*. Esensi penting dalam *Smart Environment* terfokus pada; *attractivity of natural conditions, reduction of CO2 emissions, environment protection, the use of renewable*

energy sources, monitoring on energy consumptions, and sustainable resource management.

Secara efektif, menganalisis persimpangan antara kondisi ketahanan destinasi dan maksud dan tujuan pariwisata cerdas, dapat memberikan wawasan tentang bagaimana infrastruktur dan tata kelola pariwisata cerdas dapat digunakan untuk mendukung ketahanan destinasi.

7. Ekonomi Hijau dan Pariwisata

Dalam membangun korelasi strategis antara pariwisata sebagai sektor ekonomi kreatif yang potensial dan pariwisata dalam perannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, maka perlu dipahami irisan dari kedua konteks tersebut melalui pendekatan konsep ekonomi hijau. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau secara sederhana sebagai kegiatan ekonomi yang rendah karbon, hemat sumber daya dan inklusif secara sosial (UNEP, 2017). Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta ke dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan energi dan efisiensi sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.

Investasi hijau ini perlu diaktifkan dan didukung melalui pengeluaran publik yang ditargetkan, reformasi kebijakan, dan perubahan perpajakan dan regulasi. Lembaga-lembaga PBB secara

serius mempromosikan jalur pembangunan yang memahami modal alam sebagai aset ekonomi kritis dan sumber manfaat publik, terutama bagi masyarakat miskin yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam. Gagasan ekonomi hijau tidak menggantikan pembangunan berkelanjutan namun justru menciptakan fokus baru pada ekonomi, investasi, modal dan infrastruktur, pekerjaan dan keterampilan, serta hasil sosial dan lingkungan yang positif di seluruh dunia khususnya Asia dan Pasifik.

Peran ekonomi hijau, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta efisiensi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan ialah pembentukan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan global yang bertujuan untuk meningkatkan proses produksi dan praktik konsumsi untuk mengurangi konsumsi sumber daya, produksi limbah, dan emisi di seluruh siklus hidup penuh proses dan produk. Di sisi lain, efisiensi sumber daya mengacu pada cara-cara di mana sumber daya digunakan untuk memberikan nilai kepada masyarakat dan bertujuan untuk mengurangi jumlah sumber daya yang dibutuhkan serta emisi dan limbah yang dihasilkan per unit produk atau layanan. Ekonomi hijau memberikan pendekatan ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus utama pada investasi, lapangan kerja dan keterampilan.

Tiga bidang utama mendasar yang menjadi fokus dalam pembahasan ekonomi hijau secara global adalah sebagai berikut:

- 1) Advokasi pendekatan ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui forum regional, subregional dan nasional
- 2) Demonstrasi pendekatan ekonomi hijau dengan fokus utama pada akses ke keuangan hijau, teknologi dan investasi
- 3) Dukungan kepada negara-negara dalam hal pembangunan dan pengarusutamaan kebijakan ekonomi makro untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau

Dalam menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta dalam proses aktualisasi ekonomi hijau secara lebih spesifik dan reguler, isu kesetaraan dan kesamarataan merupakan hal yang menjadi pokok untuk dibahas, terutama dalam penegakkan *goal* pembangunan berkelanjutan nomor 10 yakni pengurangan ketimpangan/ ketidaksetaraan. Dalam konteks ekonomi, kesetaraan pembangunan juga akan erat kaitannya dengan *goal* nomor 1 juga yakni memberantas kemiskinan di segala lini. Hal inilah yang melatarbelakangi timbulnya konsep ekonomi inklusif yang saat ini telah digaungkan oleh banyak negara dan banyak organisasi dunia.

Menurut Ali dan Zhuang, istilah “ekonomi inklusif” tidak memiliki definisi yang diterima secara luas. Konsep tersebut dengan jelas mencakup inklusi dan pembangunan ekonomi, dan memandang inklusi sebagai proses sekaligus tujuan pembangunan ekonomi

inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan kesempatan ekonomi yang sama (Ali & Zhuang, 2007). Ini berfokus pada menciptakan peluang ekonomi dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang di masyarakat di semua tingkatan, tidak hanya untuk orang miskin. Dengan cara yang sama, pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang menekankan peluang yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi tersedia secara bebas untuk semua, terutama masyarakat miskin (Gupta et al., 2015).

Pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki beberapa elemen, yang meliputi pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas lapangan kerja, pembangunan pertanian, pembangunan industri, pembangunan sektor sosial, pengurangan kesenjangan wilayah, perlindungan lingkungan, dan pemerataan pendapatan. Di antara elemen-elemen ini, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan mendapat perhatian paling besar dalam studi empiris, baik eksplisit maupun implisit, pertumbuhan ekonomi inklusif (Rini & Tambunan, 2021).

Di Indonesia, banyak reformasi telah dilakukan sejak krisis keuangan Asia 1997-1998. Pemerintah telah memulai transformasi kelembagaan, menjadikan negara ini salah satu negara demokrasi paling bersemangat di kawasan ini. Dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik, Indonesia telah mengalami banyak kemajuan. Reformasi luas telah dilakukan di semua bidang tata kelola,

termasuk di sektor keuangan, dan strategi pembangunan baru telah diadopsi untuk pembangunan ekonomi yang “inklusif” (Rini & Tambunan, 2021).

Dalam laporan baru yang dipublikasikan oleh Chris Benner dan Manuel Pastor (2015), teridentifikasi lima karakteristik yang secara umum dapat merepresentasikan tingkat inklusivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Selanjutnya kelima karakteristik tersebut secara detail diturunkan ke dalam 15 subkategori dan 57 indikator yang terkait. Adapun lima karakteristik ekonomi inklusif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi

Orang-orang dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi dan memiliki suara yang lebih besar atas masa depan mereka. Orang dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pasar sebagai pekerja, konsumen dan pemilik usaha. Transparansi seputar dan pengetahuan umum tentang aturan dan norma memungkinkan orang untuk memulai bisnis, mencari pekerjaan, atau terlibat dalam pasar. Teknologi didistribusikan secara lebih luas dan mempromosikan kesejahteraan individu dan komunitas yang lebih besar.

2. Ekuitas

Lebih banyak peluang tersedia untuk memungkinkan mobilitas ke atas bagi lebih banyak orang. Semua lapisan masyarakat,

terutama kelompok miskin atau kurang mampu secara sosial, mampu memanfaatkan peluang tersebut. Ketimpangan menurun bukannya meningkat. Orang memiliki akses yang sama terhadap landasan ekonomi yang lebih kokoh, termasuk akses yang sama terhadap barang, jasa, dan infrastruktur publik yang memadai, seperti angkutan umum, pendidikan, udara dan air bersih.

3. Pertumbuhan

Perekonomian semakin menghasilkan barang dan jasa yang cukup untuk memungkinkan keuntungan luas dalam kesejahteraan dan peluang yang lebih besar. Pekerjaan yang baik dan kesempatan kerja tumbuh dan pendapatan meningkat, terutama bagi orang miskin. Sistem ekonomi berubah untuk kemajuan semua, termasuk dan khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan. Pertumbuhan dan transformasi ekonomi tidak hanya ditangkap oleh ukuran agregat output ekonomi (seperti PDB), tetapi harus mencakup dan diukur oleh hasil lain yang mencakup kesejahteraan secara keseluruhan.

4. Stabilitas

Individu, komunitas, bisnis, dan pemerintah memiliki tingkat kepercayaan yang cukup terhadap masa depan mereka dan kemampuan yang meningkat untuk memprediksi hasil dari keputusan ekonomi mereka. Individu, rumah tangga, komunitas, dan perusahaan cukup aman untuk berinvestasi di

masa depan mereka. Sistem ekonomi semakin tahan terhadap guncangan dan tekanan, terutama gangguan dengan dampak yang tidak proporsional pada masyarakat miskin atau rentan.

5. Keberlanjutan

Kekayaan ekonomi dan sosial dipertahankan dari waktu ke waktu, sehingga menjaga kesejahteraan antar generasi. Kekayaan ekonomi dan sosial adalah nilai sosial dari seluruh rangkaian aset yang berkontribusi pada kesejahteraan manusia, termasuk produksi manusia (manufaktur, keuangan, manusia, sosial) dan modal alam. Dalam hal modal alam, pemanfaatan manusia harus melestarikan atau memulihkan kemampuan alam untuk menghasilkan ekosistem barang dan jasa yang berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus memasukkan biaya dan manfaat jangka panjang, dan bukan hanya keuntungan jangka pendek, dari penggunaan basis aset penuh oleh manusia.

Di Indonesia, Pemerintah sejatinya telah menunjukkan perhatiannya terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemaparan event parallel pada pertemuan tahunan IMF-WB yang diselenggarakan di Bali pada Tahun 2018. Pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/ BAPPENAS memaparkan bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan potensi kemajuan dan kemakmuran ekonomi yang besar, hal ini dapat dilihat dari data bahwa Indonesia menempati posisi kelima

belas dalam perekonomian terbesar di dunia, posisi kelima sebagai pasar berkembang terbesar, serta pertumbuhan konsumsi pribadi yang meningkat sebesar 5% secara konstan (BAPPENAS, 2018).

Namun, meskipun potensinya besar sebagai negara yang menuju kemajuan dan kemakmuran serta tingkat kemiskinan yang selalu menurun, pada nyatanya 72 juta masyarakat masih tercatat dalam kerentanan. Ini berarti masih sangat memungkinkan para masyarakat rentan tersebut untuk kembali jatuh miskin apabila terjadi krisis yang tak diduga. Sedangkan faktor-faktor utama yang dianggap sebagai penyebab ketidaksetaraan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tidak meratanya akses untuk layanan hidup dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, air bersih, dan listrik.
2. Tidak meratanya serapan tenaga kerja karena tenaga kerja yang minim keahlian selalu terjebak dalam pekerjaan yang tidak produktif dan upah minim.
3. Tidak meratanya pendapatan dan aset karena kekayaan dan kesejahteraan yang terkonsentrasi dalam lingkup orang-orang tertentu
4. Minimnya sistem pengamanan sosial bagi masyarakat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketika terserang

sakit, kehilangan pekerjaan, kenaikan harga agregat, dan bencana alam.

Dari kondisi tersebut maka Pemerintah RI melalui Kementerian PPN/ BAPPENAS menyusun sebuah model guna meningkatkan inklusivitas dalam perekonomian Indonesia.



Gambar 19. Model Strategi Pengembangan Ekonomi Inklusif Indonesia

(BAPPENAS, 2018)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah RI dalam membangun ekonomi inklusif terelaborasi ke dalam 3 pilar utama, adapun secara rinci penjabaran mengenai pilar-pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (Pilar 1)

Dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi umum secara konstan, kesempatan tiap masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan

yang layak, serta penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi yang mumpuni.

2. Kesamarataan Pendapatan dan Pengurangan Angka Kemiskinan (Pilar 2)

Dipengaruhi oleh upaya memberantas kesenjangan, ketimpangan, ketidakadilan, serta upaya mengurangi kemiskinan melalui program-program strategis sosial.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Keterbukaan Kesempatan (Pilar 3)

Dipengaruhi oleh upaya peningkatan kapabilitas/ kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dasar, serta inklusivitas dalam sistem keuangan.

Berikutnya, pilar-pilar tersebut diaktualisasi ke dalam strategi-strategi pengurangan kemiskinan, kerentanan, dan ketimpangan yang di antaranya yakni:

1. Memperkuat aspirasi kelompok berpenghasilan menengah melalui:
 - Kemudahan dalam mendapatkan izin bisnis
 - Memperkuat UMKM dan memberdayakan koperasi
 - Meningkatkan keahlian dan sertifikasi pekerja

2. Meningkatkan pendanaan desa untuk mensejahterakan kelompok berpenghasilan rendah melalui:
 - Membangun infrastruktur dasar melalui program *cash for work*
 - Meningkatkan layanan dasar
 - Pengembangan ekonomi lokal
3. Membangun pusat pertumbuhan perekonomian dan industri di luar Jawa melalui:
 - Memperkuat infrastruktur penunjang konektivitas antara pusat ekonomi dengan wilayah pendukung
 - Memperkuat pengembangan produk lokal dan rantai pasok produk untuk ekspor
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk:
 - Memperluas jangkauan pelayanan public yang lebih baik
 - Menstimulasi tumbuhnya inovasi dan kreativitas dari seluruh tingkatan masyarakat.

Pada akhirnya, ekonomi inklusif mengantarkan sebuah wilayah ke dalam bentuk ketahanan terutama ketahanan ekonomi yang baik, serta dipastikan bahwa setiap lini dan lapisan masyarakatnya dapat bertumbuh secara integral dan mandiri sehingga dapat secara kuat

menghadapi apapun potensi krisis yang dimungkinkan akan melanda.

Kembali lagi pada pembahasan mengenai bagaimana korelasi antara implementasi ekonomi hijau dengan pariwisata, pada dasarnya telah terlihat secara jelas bahwa pariwisata merupakan sektor yang harusnya turut menjadi suksesor konsep tersebut, menimbang bagaimana lini konseptualinya yang bersinggungan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Toubes et al., (2021) menjelaskan bahwasanya dewasa ini semakin diakui potensi kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi hijau melalui praktik yang lebih berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan ekowisata. Wisata penghijauan melibatkan kebijakan dan program yang memperhitungkan tidak hanya harapan wisatawan untuk pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, tetapi juga kebutuhan masyarakat yang didukung atau dipengaruhi oleh skema wisata.

Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dan konservasi energi, untuk meminimalkan limbah dan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan untuk penggunaan sumber daya alam seperti air secara berkelanjutan, untuk melestarikan keanekaragaman hayati, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional, dan untuk menghasilkan lokal. pendapatan dan memperkuat masyarakat lokal dengan

maksud untuk meningkatkan mata pencaharian dan mengurangi kemiskinan (UNWTO & UNEP, 2005).

Kontribusi dan pengaruh industri pariwisata terhadap ekonomi hijau mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Dalam pengertian ini, penelitian dan literatur ilmiah telah menghasilkan pengetahuan yang substansial dan berkembang tentang pariwisata dalam ekonomi hijau yang menyoroti tantangan dan peluang yang terbuka bagi ekonomi hijau dan aplikasi spesifiknya.

Lima tantangan utama telah diidentifikasi oleh Toubes et al., (2021) bagi sektor pariwisata untuk memenuhi tujuan ekonomi hijau yang diusulkan. Tantangan-tantangan ini berhubungan langsung dengan lingkungan alam, dan mengingat komponen perilaku manusia yang kuat dalam pariwisata, berbagai kemungkinan interaksi sosial akan membawa manfaat atau potensi kerusakan keanekaragaman hayati darat dan laut. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

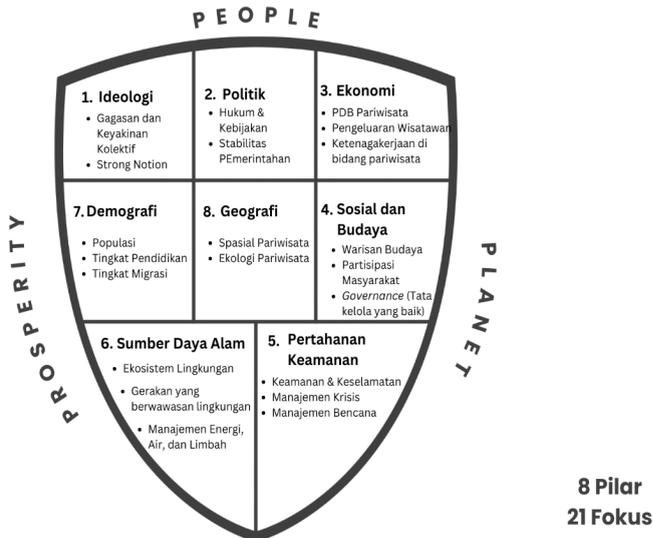
1. Konsumsi dan pengolahan energi serta mengadopsi sumber energi terbarukan
2. Kajian terkait emisi gas rumah kaca dan peran utama pariwisata dalam industri transportasi
3. Pengelolaan limbah yang efisien
4. Konsumsi air yang berlebihan
5. Risiko dan kerentanan yang muncul akibat perubahan iklim

Dengan begitu eratnya kaitan antara bagaimana implementasi pembangunan berkelanjutan, ekonomi inklusif dan ekonomi hijau sebagai turunannya, serta pengembangan pariwisata tentu menjadikan kajian holistik mengenai bagaimana singgungan multikonsep tersebut menjadi bagian terpadu dan integral dan dapat menambah tingkat ketahanan suatu daerah melalui kuatnya daya saing daerah tersebut.

BAB III

PENGUKURAN KETAHANAN DESTINASI PARIWISATA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hal ketahanan destinasi pariwisata, sudah terdapat banyak kajian yang mempelajari tentang bagaimana mempertahankan suatu destinasi pariwisata dan menjadikan destinasi tersebut berkelanjutan. Dalam pembahasan kali ini, akan dibahas mengenai ketahanan pariwisata melalui perspektif Astagatra yang terdiri dari 8 pilar, yakni pilar ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan keamanan, sumber daya alam, demografi, dan geografi.



Gambar 20. Model Ketahanan Destinasi Pariwisata

Sumber: Olahan penelitian (2022)

Metode yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah *desk research*. Data-data yang ditampilkan berasal dari hasil penelitian terdahulu dan dokumen pendukung lainnya seperti laporan yang diterbitkan oleh suatu institusi atau organisasi resmi baik nasional maupun internasional. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif mengenai kaitannya dengan ketahanan destinasi pariwisata.

1. Pilar Ideologi

“Membangun ketahanan destinasi pariwisata adalah membangun **ideologi manusianya.**”

Ideologi sendiri merupakan sebuah sistem gagasan dan cita-cita, terutama yang menjadi dasar teori dan kebijakan ekonomi atau politik di suatu negara. Ideologi didasarkan pada seperangkat keyakinan tentang dunia yang digunakan untuk menafsirkan dan membentuk cara orang hidup dan berpikir (Blackburn, 2005). Ideologi juga sering dihubungkan dengan pemikiran tentang karakteristik utama suatu masyarakat, termasuk peran yang dimainkan oleh masing-masing kelompok sosial dalam masyarakat. Ideologi pun juga dianggap sebagai landasan dan panduan bagi pelaksanaan praktik pariwisata (Nugroho, 2019). Sehingga pada pilar ideologi ini akan melihat bagaimana gagasan, ide, keyakinan, maupun kepercayaan masyarakat dapat mempengaruhi dan menentukan arah pengembangan destinasi pariwisata.

a. Gagasan dan Keyakinan Kolektif

Collective ideas and beliefs atau gagasan dan keyakinan kolektif mengacu kepada keyakinan sistem sosial yang didasarkan pada *general/common truth* yang menjadi cara pandang dalam melakukan praktik penyelenggaraan pariwisata oleh seluruh *stakeholders*. Gagasan dan keyakinan kolektif juga memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi dan menjalankan program-program pariwisata. Pengakuan dan penerapan gagasan serta keyakinan kolektif dapat membantu menciptakan kebijakan dan praktik pariwisata yang lebih efektif.

Gagasan dan keyakinan pun perlu didasari pada filosofi kolektif yang berfokus pada kolaborasi dan kerjasama antara orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menekankan nilai-nilai kerjasama dan solidaritas, gagasan dan keyakinan kolektif memungkinkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar daripada yang bisa mereka capai secara individual (Spicker, 2019). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berkembang dengan lebih baik, karena masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi segala pihak.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya telah menerapkan prinsip gotong royong.

Gotong royong adalah filosofi dan praktik yang menekankan kerjasama kolektif dan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan upaya bersama. Gotong royong dimasukkan dalam budaya tradisional Indonesia untuk mengajarkan cara kerjasama dan toleransi dalam masyarakat. Dalam komunitas Indonesia, gotong royong adalah sebuah ritual yang dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial yang diwujudkan melalui bantuan bersama. Gotong royong juga dapat berarti bahwa sebuah komunitas akan tetap bersatu dan bertekad untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Secara umum, gotong royong adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesetiaan, kerjasama, dan toleransi, yang merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia.

Pengembangan pariwisata khususnya di daerah pun juga erat kaitannya dengan gotong royong. Salah satu penelitian oleh Nerva (2018) menjelaskan mengenai bagaimana masyarakat Desa Pandanrejo, Kota Batu bergotong royong dalam pembangunan infrastruktur dan menjaga kebersihan lingkungan desa demi menunjang kegiatan wisata yang ada. Menurutnya faktor pendukung dari keberhasilan kegiatan tersebut adalah kesadaran masyarakat yang tinggi, kebersamaan, ketepatan waktu pelaksanaan, kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat, serta tanggung jawab. Dengan gotong royong ini memungkinkan

masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengembangan kegiatan pariwisata dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap daerahnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata dan menanamkan ide-ide kebersamaan, kerja sama, dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan bersama.

Ide dan kepercayaan bersama pun juga mendasari bagaimana praktik pariwisata dijalankan melalui penentuan panduan dan struktur sosial yang telah disepakati dan diyakini bersama. Giddens menggambarkan struktur sosial sebagai sistem interaksi yang saling mendasari satu sama lain. Sistem ini berhubungan dengan bagaimana aturan dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia. Nugroho (2019) juga menjelaskan bagaimana ideologi dan struktur sosial yang berbeda akan menghasilkan praktik sosial yang berbeda pula.

Namun, yang perlu dihindari adalah ide-ide yang cenderung totaliter atau secara mutlak menuntut manusia bertindak sepenuhnya sesuai dengan suatu ideologi dan mengingkari kebebasan pribadi manusia serta ruang geraknya (Putranto et al., 2017). Nugroho (2019) pun juga menegaskan bahwa struktur sosial yang telah diyakini dan disepakati bersama tidak dapat bersifat mengekang atau *constraint*, melainkan lebih bersifat memberdayakan atau

enabling. Ia meyakini bahwa seorang individu bukanlah robot yang tidak dapat merefleksikan suatu struktur sosial yang menaunginya. Dalam artian memberdayakan, suatu struktur sosial memiliki peran untuk membuat suatu tindakan menjadi mungkin dan lebih bermakna.

Pada pembahasan selanjutnya juga akan dibahas mengenai bagaimana suatu ide dan keyakinan dimaknai bersama melalui gagasan yang kuat dan mempengaruhi praktik pelaksanaan pariwisata.

b. *Strong Notions* (Ide yang Kuat)

Ide yang kuat memastikan bahwa semua pihak berpikir dalam arah yang sama sebelum memulai proses pengembangan destinasi wisata. Dengan menyeimbangkan kepentingan semua pihak, destinasi pariwisata dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan dengan lancar dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan.

A.Hamid Atamimi pun memandang ideologi dalam kehidupan hukum sebagai “Cita Hukum”, dimana “cita” di sini diartikan sebagai rasa, gagasan, cipta, dan pikiran. Bagi negara pun, gagasan atau Cita Hukum ini berfungsi sebagai dasar suatu tata hukum dan menentukan apakah suatu hukum berlaku adil atau tidak adil, baik atau tidak baik (Putranto et al., 2017). Dalam hal pariwisata, gagasan inilah yang

mendasari beberapa kebijakan mengenai pariwisata khususnya di tingkat nasional hingga daerah.

Nugroho (2019) sendiri mengidentifikasi ideologi dalam praktik pariwisata ke-dalam 2 landasan, yaitu logika pariwisata moderen dan logika pariwisata *post* moderen. Logika pariwisata moderen sendiri merupakan sebuah paham yang berlandaskan pada filsafat moderen. Praktik pariwisata dengan logika ini bertumpu pada pertumbuhan. Nugroho sendiri merujuk logika pariwisata moderen secara spesifik kepada pertumbuhan jumlah wisatawan dan pariwisata masal. Ia memiliki pandangan bahwa logika pariwisata modern melihat manusia sebagai pusat semesta dengan rasio yang dimilikinya. Sedangkan untuk logika Pariwisata Post Moderen sendiri mengacu pada logika kelestarian dan kesetaraan, yang berarti perencanaan pariwisata yang dibuat harus menghindari dampak yang destruktif.

Walaupun Nugroho sendiri memandang kedua logika pariwisata moderen dan post moderen sebagai dua landasan yang berbeda, kedua landasan ini sebenarnya dapat berjalan secara bersamaan. Arah Pengembangan Pariwisata Nasional 2020-2024 pun menggunakan kedua logika tersebut sebagai landasan pelaksanaan praktik pariwisata nasional, yaitu *Quality Tourism*. Arah Pengembangan Pariwisata Nasional

2020-2024 ini bertumpu pada mengembangkan pariwisata yang berkualitas bagi wisatawan sekaligus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Ujung atau tujuan akhir dari strategi *Quality Tourism* adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa logika pariwisata moderen dan post moderen dapat berjalan bersama-sama, yakni gagasan bahwa pariwisata harus terus tumbuh dan pada saat yang sama menerapkan prinsip kelestarian dan kesetaraan.

Rencana Strategis Pariwisata Nasional 2020-2024 pun telah menentukan target capaian yang harus dipenuhi demi terlaksananya *Quality Tourism* tersebut, mulai dari target peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan devisa, peningkatan kontribusi PDB, hingga peningkatan nilai ekspor produk ekonomi kreatif. Terdapat pula upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi target tersebut mulai dari pembangunan infrastruktur, memperkuat promosi pariwisata, hingga peningkatan kualitas SDM.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah menetapkan beberapa peraturan untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan mulai dari Permen Parekraf No.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, hingga Keputusan Menteri Pariwisata No.

296 tentang Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di 10 DPP dan Destinasi Wisata Unggulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat terlihat bagaimana suatu gagasan yang ditetapkan sebagai tujuan bersama dapat mempengaruhi berbagai upaya dan kebijakan untuk memenuhi tujuan tersebut. Kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat nasional pun menjadi dasar dari pembuatan kebijakan di tingkat daerah. Sehingga seluruh kebijakan di berbagai tingkatan birokrasi dapat terintegrasi dan menghindari kebijakan yang bertentangan satu sama lain.

Gagasan-gagasan dari arah pengembangan pariwisata yang menjadi dasar kebijakan dan praktik kegiatan pariwisata di Indonesia ini pun lahir dari ide-ide dan kepercayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sehingga pada dasarnya, ide dan keyakinan bersama dapat berjalan dengan gagasan yang kuat pula. Sehingga praktik pariwisata yang dijalankan dapat sesuai dengan target dan tujuan bersama yang telah ditetapkan.

2. Pilar Politik

“**Harmonisasi** arah politik diyakini menjadi modal dasar dalam membangun Ketahanan Destinasi Pariwisata.”

Sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana suatu ideologi dapat mempengaruhi praktik politik di suatu negara. Setelah ideologi, situasi politik juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan praktik pariwisata. Politik sendiri mengacu kepada bagaimana pemerintahan publik dijalankan dan kebijakan public dilaksanakan.

Terdapat beberapa pandangan yang melihat politik sebagai konsep dasar. Surbakti (1992) telah merangkum berbagai macam konsep dasar politik dari beberapa ahli. Teori klasik politik Aristoteles adalah salah satu teori politik yang menekankan pentingnya pemerintahan berdasarkan hukum dan keadilan. Ia menekankan pentingnya hak asasi manusia dan perlunya melakukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak asasi dan perlunya pemerintah untuk menciptakan keadilan di seluruh negeri.

Terdapat pula teori politik kelembagaan oleh Max Weber. Konsep ini merupakan sebuah teori politik yang lebih menekankan kepada peran institusi dalam mengarahkan perilaku politik. Teori ini menekankan bahwa institusi berperan dalam mempengaruhi bagaimana individu memahami dan bereaksi terhadap situasi politik. Weber menyatakan bahwa institusi politik penting untuk membentuk komitmen individu terhadap norma-norma politik dan mengatur konflik antara pihak-pihak

yang bertentangan. Dengan demikian, institusi politik memainkan peran penting dalam membentuk struktur politik.

Richard Robson juga telah mengembangkan teori politik kekuasaan. Kekuasaan di sini dilihat sebagai interaksi mempengaruhi dan mematuhi. Konsep ini juga melihat bagaimana suatu kekuasaan diperoleh dan dipertahankan. Oleh karena itu, politik sendiri sangat erat kaitannya dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang dalam menetapkan aturan dan kebijakan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh masyarakatnya.

Dalam hal kebijakan pun, pandangan fungsional melihat politik sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh para pelaku politik dalam merancang dan menjalankan kebijakan umum. Lasswell juga menjelaskan proses politik sebagai proses siapa mendapatkan “nilai” apa, dan kapan serta bagaimana individu tersebut mendapatkan “nilai” yang dimaksud.

Dalam konteks pariwisata pun, selain menetapkan ideologi pariwisata yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, situasi politik di suatu negara juga memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.

Oleh karena itu, Pilar politik akan melihat bagaimana pengaruh situasi politik terhadap pengembangan destinasi pariwisata mulai dari kebijakan yang berlaku hingga stabilitas pemerintahan.

a. Hukum dan Kebijakan

Kebijakan dan hukum memiliki peran penting dalam pengembangan destinasi wisata. Hal ini karena kebijakan dan hukum dapat menyediakan peraturan dalam menentukan cara yang sesuai mengenai bagaimana destinasi pariwisata dikembangkan, menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta menjaga lingkungan sekitar.

Kebijakan sendiri merupakan aturan yang menentukan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Tujuan dari kebijakan adalah untuk memastikan bahwa destinasi wisata mencapai tujuannya. Kebijakan dapat berupa peraturan, prosedur, aturan, sistem, dan lain-lain (Sugiarto & Taufik, 2012).

Kebijakan dibuat untuk menjawab berbagai masalah yang muncul dalam suatu sistem sosial, menentukan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terkait mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (Anderson, 1979). Oleh karena hal tersebut, kebijakan pariwisata yang dibuat tentu saja harus dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan riil di lapangan, sekaligus meningkatkan daya saing destinasi pariwisata baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional (Nasution, 2021).

Dalam proses pembuatan kebijakan, perlu ada kesepakatan bersama dan komunikasi antara pembuat kebijakan dan orang yang akan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Disinilah pentingnya peran ideologi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk menerapkan kesepakatan antara pelaku kepentingan melalui ideologi yang sama dan kuat (Anderson, 1979).

Setelah kebijakan dibuat, implementasi kebijakan harus dilakukan dengan benar agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu diperlukan peninjauan kembali secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada masih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, pemerintah kerap melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan.

Kebijakan sendiri pada dasarnya memiliki fungsi yang sama seperti hukum, yakni sebuah aturan yang digunakan untuk mengatur cara bertindak masyarakat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan dibuat sebagai solusi dari permasalahan sosial dan hukum sendiri berperan sebagai instrumen yang dapat dipaksakan untuk melindungi hasil kesepakatan dari kebijakan yang telah diputuskan bersama (Budiman, 2017).

Hukum sendiri merupakan sebuah alat atau sarana untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara guna menjaga dan mengatur ketertiban demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan. Hukum sendiri juga merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai sanksi penyalahgunaan dan pelanggaran kekuasaan melalui berbagai cara (Sugiarto & Taufik, 2012). Dalam hal ini, negara memiliki kekuasaan untuk menentukan peraturan dan hukuman seperti apa yang dapat ditetapkan dan mengikat bagi seluruh warga negara. Dalam hal pelaksanaan wewenang tersebut, negara dapat menggunakan aparatnya seperti polisi, militer, jaksa, hakim, dan petugas Lembaga pemasyarakatan lainnya.

Dalam konteks pariwisata pun, telah terdapat peraturan-peraturan yang mendasari praktik kegiatan pariwisata di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjadi salah satu payung hukum yang mendasari segala kebijakan pariwisata yang ada. Undang-undang ini sendiri mengatur tentang berbagai macam hal seperti hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, hingga pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan UMKM, badan

promosi pariwisata hingga pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Telah dibuat pula peraturan pelaksanaan guna mendukung terlaksananya tujuan yang telah ditetapkan pada UU No.9 Tahun 2010 diantaranya adalah Permen Pariwisata No.18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Perpres No.63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pengendalian Kepariwisataan, serta Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Dalam UU No.9 tahun 2010 pasal 9 ayat (1) pun juga telah menyebutkan perlunya penetapan peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2015 dibuat untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Peraturan ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional dalam periode 15 tahun sejak 2010 hingga 2025. Di dalamnya telah ditetapkan peraturan mengenai penentuan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) hingga pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata.

Selain Undang-Undang No.10 tahun 2009 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, terdapat peraturan-peraturan lain yang juga dapat mempengaruhi praktik

pelaksanaan pariwisata. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Peraturan tersebut telah mengatur mengenai pelestarian situs cagar budaya. Mengingat banyak cagar budaya yang dijadikan sebagai daya tarik wisata, pelaksanaan kegiatan pariwisata harus memperhatikan pula aturan-aturan pelestarian yang sudah ditetapkan untuk menghindari rusaknya situs cagar budaya akibat kegiatan kepariwisataan.

Selain itu, strategi perencanaan maupun pengelolaan destinasi pariwisata yang telah dirancang untuk keberlanjutan pariwisata tidak cukup hanya dengan direncanakan saja. Perlu adanya kebijakan dan hukum yang kuat terhadap strategi-strategi yang ada untuk mengakselerasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut. Kebijakan dan peraturan yang ada mencakup standarisasi proses dan praktik industri pariwisata yang efektif serta sejalan dengan kebijakan-kebijakan lain dari lintas sektor yang berhubungan dengan pariwisata.

Salah satu contohnya adalah aturan yang mengatur mengenai keimigrasian. Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa kunjungan pun dibuat untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, yakni dengan memperbanyak jumlah negara yang dapat menikmati bebas visa. Setelah itu, demi

mendukung kebijakan pemerintah dalam membuka kembali sektor pariwisata pasca pandemi, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-0700.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019. Surat edaran tersebut menambahkan 11 Negara ke dalam daftar negara-negara yang dapat menerima kemudahan imigrasi berupa *Visa on Arrival* atau visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata.

Peraturan-peraturan tersebut telah memberikan kemudahan sekaligus kepastian kepada wisatawan mancanegara akan kemudahan keimigrasian di Indonesia. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Terbukti, menurut Badan Pusat Statistik pada bulan September 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk utama mencapai 538,32 ribu kunjungan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,50% dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada bulan sebelumnya, dan naik 10.768,46% dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada September 2021 (BPS, 2022). Kenaikan jumlah kunjungan yang signifikan tersebut membuktikan bahwa kebijakan dan regulasi yang tepat dapat membantu pencapaian tujuan yang tepat pula.

Selain kemudahan akses untuk memasuki negara, kebijakan dan hukum kepariwisataan juga harus dapat melindungi hak dan keselamatan wisatawan serta para pelaku pariwisata, termasuk para pekerja dan pemilik properti, serta tujuan-tujuan lainnya seperti pemeliharaan lingkungan dan keberlanjutan pariwisata. Selain itu, kebijakan dan peraturan juga harus mencakup pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap semua aspek pariwisata, termasuk pengawasan terhadap kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerusakan iklim.

Kebijakan dan peraturan yang berlaku juga harus didukung dengan mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap pelaku pariwisata menaati standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Mekanisme ini dapat berupa insentif untuk mempromosikan praktik berkelanjutan, ataupun sanksi yang tegas untuk menghukum mereka yang melanggar aturan.

Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan pariwisata, perlu ada kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam industri pariwisata, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan lainnya. Kerja sama ini diperlukan untuk membangun kemitraan yang saling mendukung untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi yang dirancang akan berjalan dengan baik.

Kerjasama juga harus terjalin antara para pelaku pariwisata dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta dengan masyarakat lokal. Kerjasama ini diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak yang terkait dengan pariwisata dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata.

b. Stabilitas Pemerintahan

Stabilitas politik atau stabilitas pemerintahan adalah sebuah istilah kompleks yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi dari suatu pemerintahan melalui berbagai konseptualisasi dan interpretasi. Pada dasarnya, terdapat dua kondisi yang dapat dialami oleh suatu negara atau wilayah, yakni kondisi pemerintahan yang stabil dan kondisi pemerintahan yang tidak stabil.

Kondisi pemerintahan yang stabil adalah keadaan di mana stabilitas politik, sosial dan ekonomi suatu negara terjaga. Hal ini dicapai ketika sistem pemerintahan yang ada mampu menjaga kedamaian dan ketertiban, serta memelihara keadilan dan keseimbangan antar kelompok dalam masyarakat. Stabilitas politik akan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang berkelanjutan. Hal ini akan menciptakan kondisi yang baik bagi pelaku bisnis untuk berinvestasi di suatu negara dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif.

Sebaliknya, kondisi pemerintahan yang tidak stabil merupakan kondisi di mana pemerintah telah digulingkan, atau pemerintahan dikendalikan oleh faksi setelah terdapatnya kudeta, atau terdapatnya ketidak stabilan dan gangguan secara berkala terhadap fungsi dasar pemerintahan untuk mengontrol dan memelihara tatanan sosial. Jika hal ini terjadi, sudah dipastikan bahwa kedamaian dan ketertiban di suatu negara maupun wilayah akan terganggu. Ketidakstabilan politik atau pemerintahan sendiri dapat berbentuk perang internasional maupun sipil, kudeta, terorisme, huru-hara, dan kerusuhan politik (Radu, 2015). Kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain ketidakstabilan ekonomi, kondisi pemerintahan yang tidak stabil juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial seperti ketegangan antar kelompok, tindak kekerasan, dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Kroasia merupakan salah satu negara yang kurang menerima manfaat dari perkembangan sektor pariwisata secara maksimal walaupun negara tersebut telah merencanakan strategi pengembangan dan perencanaan pemasaran untuk sektor pariwisata mereka. Hal ini dikarenakan keadaan politik di negara tersebut yang tidak stabil mulai dari perebutan kekuasaan yang terjadi secara terus-menerus antara partai yang sedang berkuasa dan partai

oposisi, resesi, korupsi hingga regulasi hukum yang tidak terorganisir dengan baik. Selain itu investasi di sektor pariwisata juga tidak kondusif bagi pengembangan infrastruktur. Sistem pengaplikasian visa juga seringkali cukup sulit bagi wisatawan yang berasal dari negara timur tengah dan negara yang jauh (Gregoric, 2014).

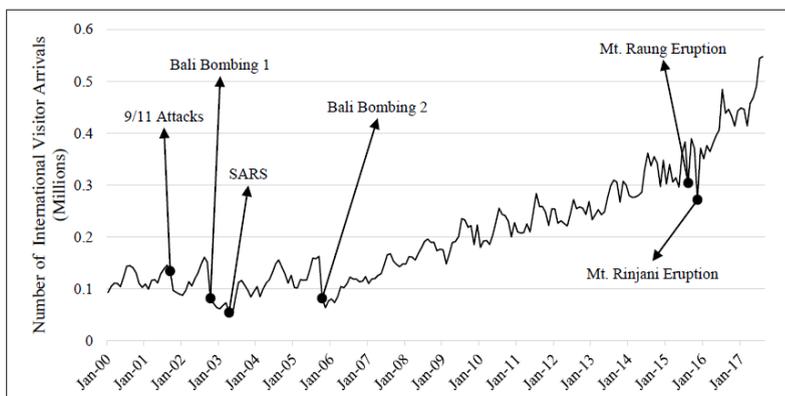
Keadaan-keadaan tersebut, tentu saja akan sangat mempengaruhi sektor pariwisata. Ketidakstabilan yang ada akan menimbulkan pertanyaan dan keraguan mengenai keamanan dari suatu destinasi wisata. Wisatawan akan bertanya-tanya apakah bijak untuk melakukan perjalanan ke destinasi wisata tersebut dalam kondisi yang tidak stabil dan tidak menentu?

Di masa lalu sendiri, telah terdapat ketidak stabilan politik di beberapa negara akibat perang dan invasi yang sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata di negara-negara tersebut. Contohnya adalah invasi yang dilakukan oleh Iraq terhadap Kuwait di tahun 1990 sangat berdampak pada pariwisata internasional tidak hanya di kedua negara tersebut, tetapi juga di seluruh negara timur tengah termasuk Jordan. Cara media menggambarkan suatu konflik atau keadaan politik di suatu negara juga dapat berdampak buruk apabila informasi yang diberikan cenderung memberikan kesan yang buruk terhadap negara yang bersangkutan. Pada

kasus Korea Selatan, citra dari industri pariwisata di negara tersebut sempat mengalami keterpurukan akibat Perang Korea yang berlangsung antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1950. Pada saat itu Kota Seoul sempat dicap oleh pariwisata internasional sebagai “*a dangerous place to visit*” (Ryu, 2005).

Selain perang dan invasi, terorisme juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keamanan dan stabilitas suatu negara. Di Indonesia sendiri, telah terjadi peristiwa terorisme di beberapa wilayah. Salah satu peristiwa yang sempat mengejutkan dunia adalah Bom Bali 1 dan 2. Bom Bali 1 yang terjadi pada 12 Oktober 2002 ini telah menewaskan 203 orang yang mayoritas diantaranya adalah wisatawan mancanegara. Akibat dari peristiwa ini adalah menurunnya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara secara drastis sebanyak 11% dari 5,033,400 kunjungan pada 2002 menjadi 4,467,021 kunjungan pada 2003 (BPS, 2014).

Selain peristiwa di dalam negeri, intervensi eksternal juga dapat memicu turunnya kunjungan wisatawan seperti yang terlihat pada gambar 19 di bawah ini:



Gambar 21. Data Kedatangan Wisatawan Internasional di Bali (Dalam Ribuan)

Sumber: Mangindaan & Krityakierne (2018)

Berdasarkan akibat-akibat yang telah disampaikan di atas, sangat penting bagi destinasi wisata untuk memastikan keadaan politik dan pemerintahan yang stabil guna menciptakan iklim yang aman bagi masyarakat dan wisatawan. Peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pun juga harus dapat membantu menciptakan iklim yang aman, melindungi masyarakat setempat, dan mempromosikan pariwisata yang aman secara menyeluruh. Keadaan politik yang stabil juga dapat mendukung pengembangan pariwisata, termasuk pengembangan infrastruktur, dan promosi pariwisata.

Qatar sendiri merupakan salah satu negara yang sangat mendukung perkembangan pariwisata melalui badan negara dan pemerintahannya. Negara ini merupakan salah

satu negara dengan stabilitas politik dan keamanan paling baik di dunia. Tingkat kriminalitas di negara ini juga berada di level yang sangat rendah. Keadaan tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi sektor pariwisata. Pemerintah Qatar juga sangat mendukung penyelenggaraan event internasional, konferensi dan pertemuan politik yang kemudian sangat berpengaruh baik terhadap citra dari sektor pariwisata mereka (Gregoric, 2014)



Gambar 22. FIFA World Cup Qatar 2022

Sumber: Mohammed Dabbous (2022)

Salah satu event olahraga internasional yang baru saja diselenggarakan oleh Qatar adalah *FIFA World Cup 2022*. Untuk mendukung keberlangsungan acara tersebut, pemerintah Qatar telah mengembangkan berbagai macam infrastruktur dan investasi untuk menunjang segala kebutuhan seperti pertemuan bisnis, konferensi, acara,

insentif hingga transportasi publik. Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 ini sendiri juga merupakan sebuah momentum bagi pemerintah Qatar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Qatar adalah negara yang aman dan nyaman. Hal ini juga sekaligus menepis pemberitaan negatif mengenai Qatar sebagai negara yang konservatif dan membatasi hak-hak manusia dalam berkegiatan.



Gambar 23. *Tourism Working Group G20 2022*

Sumber: Kemenparekraf RI (2022)

Indonesia juga berkesempatan menjadi tuan rumah dan memegang presidensi KTT G20 yang telah dilaksanakan di Bali pada 15-16 November 2022 yang lalu. Konferensi tingkat tinggi ini merupakan sebuah forum strategis dalam membahas isu-isu global yang dihadiri oleh 17 negara keanggotaan G20. Forum ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan menjunjung tinggi

perdamaian dunia. Salah satu *kick-off event* dalam forum G20 ini adalah *Tourism Working Group* yang telah dilaksanakan di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2022 dan di Bali pada 23 September 2022. Pertemuan tersebut merupakan momentum dan simbol dari kebangkitan ekonomi dan kepulihan pariwisata nasional. TWG G20 pun juga telah berhasil memfinalisasi *G20 Bali Guidelines* yang berisikan *5 Line of Actions*. Ke 5 poin tersebut terdiri dari: 1) *Human Capital: Jobs, Skills, Entrepreneurship, and Education*; 2) *Innovation, Digitalization, and The Creative Economy*; 3) *Women and Youth Empowerment*; 4) *Climate Action, Biodiversity Conservation, and Circularity*.

Selain penyelenggaraan acara Internasional, stabilitas pemerintahan harus terus tetap dijaga. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui politik yang inklusif, kebijakan yang konsisten, stabilisasi ekonomi, reformasi hukum dan pemeliharaan keamanan. Pertama, politik yang inklusif dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan kepercayaan dan rasa keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, memastikan bahwa semua suara diberikan sama, mendengarkan masalah yang dihadapi masyarakat, dan menyediakan mekanisme untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Kedua, dalam hal kebijakan yang

konsisten, pemerintah harus dapat menjamin bahwa kebijakan yang telah dibuat tetap konsisten dalam jangka waktu tertentu dan bertanggung jawab. Ketiga, dalam menjaga dan memastikan kebijakan ekonomi yang stabil pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang dapat menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, meminimalkan ketidakpastian ekonomi, dan mendorong inovasi. Keempat, pemerintah harus melakukan reformasi hukum untuk menjamin bahwa hukum yang berlaku tetap relevan dengan situasi saat ini. Hal ini termasuk meninjau dan memperbarui hukum yang telah ada, serta menciptakan hukum baru yang lebih adil dan efektif. Terakhir, Pemerintah harus memastikan bahwa tingkat keamanan di negara terus terjaga, termasuk meningkatkan keamanan di daerah-daerah rawan, meningkatkan penegakan hukum, dan melindungi hak asasi manusia.

3. Pilar Ekonomi

“Orientasi Ketahanan Destinasi Pariwisata harus dalam upaya menumbuh kembangkan *Inclusive Economy* (Ekonomi Kerakyataan).”

Merupakan sebuah pengetahuan umum bahwa sektor pariwisata mampu mendatangkan manfaat ekonomi yang cukup signifikan bagi suatu daerah. Namun, perlu dipastikan juga bahwa manfaat ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh

kalangan masyarakat. Pada pilar ekonomi ini sendiri akan mengukur 3 fokus yang terdiri dari Pendapatan Domestik Bruto Pariwisata, *Tourist Expenditure* (Pengeluaran Wisatawan), dan ketenagakerjaan di bidang pariwisata.

a. Pendapatan Domestik Bruto Pariwisata

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan menjadi suatu bentuk nilai barang dan jasa yang terdapat dalam suatu negara dalam satu tahun sebagai hasil dari faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing yang mengukur jumlah pembelanjaan terhadap barang dan jasa di seluruh pasar dalam perekonomian (Lukito, 2022). Peningkatan jumlah pembelanjaan di suatu negara dapat menimbulkan salah satu dari dua kemungkinan hal yang dapat terjadi yaitu peningkatan jumlah produksi barang dan jasa atau peningkatan harga nilai jual barang dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat memberikan nilai terukur terkait efisiensi peningkatan PDB suatu negara. Peningkatan PDB menjadi indikator penting dalam menilai kekuatan ekonomi suatu negara.

Suatu negara memiliki prioritas pembangunan ekonomi nasionalnya masing-masing khususnya melalui peningkatan PDB. Terdapat lima sektor prioritas yang tercatat memberikan dampak peningkatan pembangunan

ekonomi nasional suatu negara yaitu maritim, energi, pangan, pariwisata dan industri. Pariwisata menjadi salah satu sektor penting penentu pertumbuhan ekonomi yang berkembang secara eksponensial dan terbukti telah memberikan keuntungan berupa penyedia sumber lapangan kerja, penghasil devisa dan pendapatan pemerintah melalui *multiplier effects*, peningkatan neraca pembayaran dan peningkatan kebijakan ekonomi pemerintah dalam upaya mempromosikan pariwisata. Sehingga *Tourism GDP* atau PDB langsung dari pariwisata dapat diartikan sebagai yang nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari keseluruhan aktivitas ekonomi industri pariwisata yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan pengunjung. PDB pariwisata nasional memberikan kontribusi sebesar 10 persen dengan nominal tertinggi di ASEAN serta memiliki tren peningkatan sebesar 4,8 persen hingga 6,8 persen jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa industri lain.

Indonesia menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor utama untuk meningkatkan perekonomian negara melalui PDB, dapat dilihat dari dampak positif pengembangan pariwisata yang tercermin dalam kontribusinya melalui transaksi dalam aktivitas wisata, seperti yang tercatat dalam laporan *World Travel and Tourism Council* (2022) bahwa kontribusi sektor perjalanan dan pariwisata di Indonesia terhadap PDB tercatat sebesar

US\$28.9 Billion dengan persentase PDB sebesar 2.4 persen pada tahun 2021 yang sebelumnya di tahun 2019 sebesar 4.9 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2.2 persen. Didukung dengan adanya data menurut *Statista Research Departement* (2022) bahwa total kontribusi sektor *Travel and Tourism* terhadap PDB global yang meningkat 21,7 persen pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 setelah terjadi penurunan yang sangat signifikan akibat pandemi Covid-19. Kemudian, diperkirakan akan meningkat dengan capaian 10,8 persen pada akhir tahun 2026 berdasarkan data *World Travel and Tourism Council* (WTTC) tahun 2016 (Rasool et al., 2021).

Maka dari itu penting bagi suatu negara khususnya melalui sektor pariwisata untuk meningkatkan kontribusi pada PDB guna memicu peningkatan jumlah pendapatan devisa dan perekonomian negara. Sektor pariwisata dapat berkontribusi langsung terhadap PDB suatu daerah melalui berbagai cara. Pertama, pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan pajak, retribusi, biaya akomodasi, dan biaya transportasi. Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator parameter ekonomi yang memuat jelas kondisi makro ekonomi di suatu daerah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan daerah per kapita. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk fokus pada

kebijakan ekonomi sebagai strategi kunci untuk mempromosikan pariwisata sebagai sumber potensi pertumbuhan ekonomi daerah maupun negara. Kemudian dengan dilakukan pengategorian penyedia produk dan jasa di industri pariwisata seperti contohnya pengkategorian akomodasi yang lebih jelas dapat mempermudah otoritas ekonomi dalam mengukur kontribusi pariwisata terhadap PDB.

Kedua, peningkatan arus wisatawan dapat membantu daerah meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka melalui pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi. Begitu pula sebaliknya, melalui penciptaan strategi pemerintah dalam upaya pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang difokuskan pada destinasi pariwisata dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Berdasarkan data *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) bahwa Indonesia memiliki indikator paling rendah dalam infrastruktur. Contoh yang memegang peranan penting dalam meningkatkan infrastruktur dan menjamin kenyamanan kunjungan wisatawan adalah melalui peningkatan aksesibilitas. Peningkatan aksesibilitas dapat dilakukan guna menunjang kenyamanan wisatawan selama melakukan perjalanan baik pada saat menuju maupun meninggalkan destinasi wisata.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan perbaikan akses fisik jalan, peningkatan jumlah ketersediaan transportasi, sarana prasarana maupun akses informasi destinasi wisata. Melalui peningkatan kualitas aksesibilitas maka dapat menjamin kenyamanan wisatawan hingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan yang tentunya akan memberikan kontribusi ekonomi lebih terhadap pendapatan daerah.

Ketiga, sektor pariwisata tentu memerlukan tenaga pekerja di berbagai bidang. Hal ini tentu saja membantu daerah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan penduduk setempat. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen kunci terciptanya aktivitas wisata yang nyata pada suatu destinasi wisata, baik sebagai penyedia usaha jasa pendukung aktivitas wisata maupun sebagai daya tarik itu sendiri melalui kearifan lokal yang terbentuk dalam suatu masyarakat lokal. Sehingga pemerintah daerah maupun penggerak pariwisata daerah memegang peran penting untuk menggali potensi pariwisata serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia contohnya dalam pemberian kualitas layanan kepada wisatawan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi objek wisata.

Kontribusi pariwisata melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sebagai penyedia usaha jasa di

bidang pariwisata dapat memberikan dampak positif terhadap permasalahan ekonomi melalui pengurangan angka pengangguran pada suatu daerah, sebagaimana pariwisata memegang peran penting dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesempatan berusaha dan memberikan kontribusi melalui pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh tingginya angka pengangguran yaitu pada tahun 2020 sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 tercatat 62 juta pekerjaan hilang dan mengalami penurunan kesempatan kerja sebesar 18,6 persen. Kemudian data WTTC (2022) menunjukkan adanya pemulihan seiring dengan peningkatan kontribusi penyedia pekerjaan pada tahun 2021 sebesar 21,7 persen disertai dengan kembali meningkatnya jumlah pekerjaan dalam sektor perjalanan dan pariwisata sebesar 18,2 juta pekerjaan dari tahun 2020 hingga 2021 dengan kata lain meningkat sebesar 6,7 persen.

Namun, peningkatan kontribusi pariwisata terhadap penyedia lapangan pekerjaan cenderung lebih lambat daripada kontribusi pariwisata terhadap penerimaan PDB. Hal ini disebabkan karena kurangnya kestabilan selama proses pemberhentian dan penerimaan pekerja dalam suatu usaha bisnis pariwisata yang membutuhkan waktu lebih. Terlepas dari hal tersebut, pariwisata dalam suatu daerah tetap dapat memberikan kontribusi dengan membuka

lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal melalui usaha mikro kecil dan menengah oleh kelompok usaha masyarakat secara tidak formal. Sehingga dengan terciptanya UMKM masyarakat seperti usaha kuliner, cinderamata, oleh-oleh dan sebagainya juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan hingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat hingga selaras dengan peningkatan indeks pembangunan manusia pada suatu daerah.

Terakhir, sektor pariwisata dapat menciptakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan daerah, salah satunya melalui kebijakan insentif fiskal. Pariwisata tidak hanya menghasilkan pendapatan pemerintah melalui bisnis dan pajak umum lainnya, tetapi juga melalui saluran industri khusus seperti pembayaran pajak hunian dan keberangkatan. Kemudian pariwisata juga menghasilkan biaya fiskal dalam bentuk pendanaan untuk infrastruktur. Insentif fiskal merupakan bentuk pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi dan sebagai bentuk antisipasi krisis ekonomi global, beberapa contoh kebijakan insentif fiskal yaitu insentif pajak, insentif bea masuk dan keluar, dan subsidi. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara, atau dengan kata lain merupakan bentuk kebijakan pemerintah guna memperoleh dana-dana dan

kebijaksanaan pemerintah dalam membelanjakan dana tersebut untuk pembangunan.

Salah satu contoh dari insentif fiskal ini adalah pengurangan pajak untuk menarik investasi di sektor pariwisata. Insentif fiskal dapat menjadi strategi untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia yaitu berupa pemberian insentif terhadap investor yang akan menanamkan modalnya pada industri prioritas seperti pariwisata, sehingga diharapkan dapat menarik minat investor lokal dan asing. Penerapan kebijakan insentif fiskal ini didasarkan pada kesadaran bahwa untuk menarik investor maka perlu adanya kemudahan, kepastian, efisiensi dan transparansi.

Insentif fiskal dalam penanaman modal terdiri atas insentif perpajakan dan insentif kepabeanan. Insentif perpajakan meliputi *tax allowance*, *tax holiday*, dan *investment allowance*. Sedangkan insentif kepabeanan dapat berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin maupun barang dan bahan untuk pembangunan industri dalam rangka penanaman modal. Beberapa bentuk pemberian insentif fiskal juga berupa kemudahan pengurusan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi dan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan dan kemudahan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian melalui upaya penyempurnaan dan

penyederhanaan proses untuk memperoleh insentif fiskal diharapkan dapat menarik investor dan memanfaatkan kesempatan untuk berinvestasi di industri prioritas salah satunya yaitu dalam industri pariwisata Indonesia.

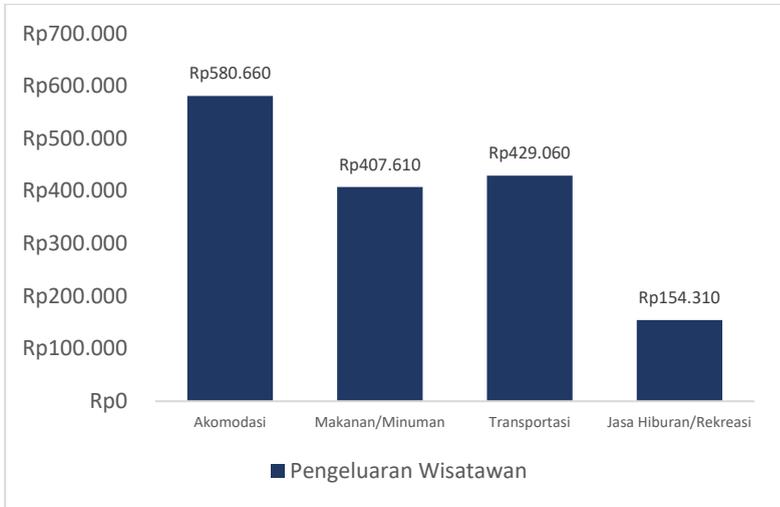
Investasi di sektor pariwisata dapat dianggap sebagai penggerak aktif dalam meningkatkan potensi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini investasi saluran modal, teknologi maupun pengetahuan bagi negara penerima. Salah satu contoh kuat investasi pengetahuan dalam pariwisata adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia penggerak pariwisata. Investasi pengetahuan dilakukan melalui pelatihan tenaga kerja, keterampilan, praktik manajerial dan organisasi khususnya bagi para penggerak pariwisata di setiap daerah. Selain itu, dengan adanya investor perusahaan pariwisata asing dapat meningkatkan infrastruktur terkait pariwisata, sehingga dengan meningkatnya kualitas infrastruktur pariwisata maka sangat memungkinkan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing yang pada akhirnya dapat menjadi bentuk nyata kontribusi pariwisata terhadap perekonomian negara melalui PDB.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memaksimalkan sektor pariwisata daerah maupun negara secara umum guna mencapai pengembangan destinasi wisata yang baik hingga berhasil memberikan PDB yang cukup

signifikan bagi daerah, yang memungkinkan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan membangun kesejahteraan lokal. Keberhasilan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerahnya maka dapat menjadi indikasi ketahanan suatu destinasi dalam memberikan kontribusinya.

b. *Tourist Expenditure* (Pengeluaran Wisatawan)

Tourist Expenditure atau pengeluaran wisatawan adalah segala pengeluaran barang dan jasa oleh wisatawan baik untuk dan selama perjalanan wisata. Pengeluaran wisatawan dapat bervariasi tergantung pada jenis wisata yang mereka lakukan serta mencakup berbagai macam barang konsumsi maupun jasa layanan. Beberapa pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan pada umumnya ditujukan untuk akomodasi, transportasi, makanan, pengalaman, dan barang yang dibeli selama wisata. Dalam hal keberlanjutan dan kualitas kegiatan pariwisata, destinasi harus dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama di destinasi tersebut. Hal ini dikarenakan, semakin lama mereka tinggal, semakin banyak biaya yang mereka keluarkan. Dapat terlihat pada gambar 21, pengeluaran wisatawan paling banyak dikeluarkan untuk keperluan akomodasi.



Gambar 24. Data Pengeluaran Wisatawan Nusantara 2021 berdasarkan Jenis Pengeluaran

Sumber: Badan Pusat Statistika (2021)

Destinasi wisata juga harus memastikan bahwa perputaran ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong wisatawan untuk membeli serta menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh masyarakat lokal. Dengan begitu, pengeluaran wisatawan yang ditujukan kepada pembelian hasil produksi lokal dapat membantu melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat.

Pengeluaran wisatawan yang tinggi juga dapat memberikan banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Pertama, pengeluaran wisatawan dapat memberikan dorongan ekonomi yang sangat dibutuhkan bagi perekonomian lokal. Selain itu, pengeluaran wisatawan juga

dapat dialokasikan untuk kegiatan konservasi dan mendorong pelaksanaan sustainable tourism. Pengeluaran wisatawan yang ditujukan kepada pembelian hasil produksi lokal juga dapat membantu melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat di destinasi.

Pengeluaran wisatawan juga menjadi indikator dalam menilai ketahanan destinasi pariwisata di saat krisis, seperti kemerosotan ekonomi. Destinasi wisata cenderung akan lebih bertahan dalam menghadapi krisis jika mereka memiliki sumber pendapatan ekonomi yang kuat dan beragam. Pengeluaran wisatawan dapat memainkan peran penting dalam hal ini, karena dapat memberikan sumber pendapatan yang tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal. Selain itu, hal ini juga memberikan sumber pendapatan yang dapat diinvestasikan kembali dalam ekonomi lokal dan tetap menggerakkan roda perekonomian mereka sekalipun pada masa krisis.

Tourist Expenditure atau pengeluaran wisatawan dengan kata lain juga dapat disebut *Visitor Consumption Expenditure* (VCE) yang merupakan dasar dari total permintaan wisatawan dalam pariwisata berupa keseluruhan pengeluaran yang digunakan tidak hanya terbatas pada pengeluaran selama melakukan kunjungan saja, tetapi juga pengeluaran sebelum melakukan kunjungan dan setelah melakukan kunjungan, termasuk diantaranya seperti

pembayaran asuransi perjalanan, pembelian jasa *travel guides* dan lain-lain.

Pada dasarnya terdapat tiga jenis pengeluaran secara umum dalam sektor pariwisata yaitu *direct spending*, *indirect spending*, dan *induced spending*. *Direct spending* atau pengeluaran langsung merupakan pengeluaran wisatawan yang secara langsung diterima oleh pengusaha industri pariwisata, contoh pengeluaran wisatawan yang diperoleh pengelola desa wisata melalui kegiatan wisata yang ditawarkan. *Indirect spending* atau pengeluaran tidak langsung merupakan pengeluaran yang diberikan oleh industri pariwisata kepada industri lain yang berkaitan langsung dalam upaya mendukung kegiatan pariwisata, contoh pengeluaran wisatawan yang diterima oleh penyedia makan dan minum serta souvenir dalam kawasan desa wisata. *Induced Spending* atau pengeluaran ikut-ikutan merupakan pengeluaran yang memberikan rangsangan bagi peningkatan pendapatan industri lain yang tidak secara nyata terlihat dan ada kaitannya dengan kegiatan pariwisata, contoh pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran pihak penyedia makan minum dan souvenir kepada penyedia bahan makanan dan minuman maupun bahan dasar pembuatan souvenir.

Di sisi lain, *Tourism Satellite Accounts - Recommended Methodological Framework* (TSA-RMF)

menyebutkan bahwa pengeluaran wisatawan terdiri atas tiga bentuk yaitu: 1) *domestic tourism consumption* atau konsumsi wisata domestik berupa konsumsi atau pengeluaran wisatawan domestik yang merupakan penduduk dalam wilayah ekonomi negara referensi; 2) *inbound tourism consumption* atau konsumsi wisata *inbound* berupa konsumsi atau pengeluaran wisatawan yang bukan merupakan penduduk dalam hal ini dapat disebut wisatawan mancanegara dalam wilayah ekonomi negara referensi dan/atau konsumsi wisatawan mancanegara terhadap penawaran yang disediakan oleh penduduk negara referensi; 3) *outbound tourism consumption* atau konsumsi wisata *outbound* berupa konsumsi atau pengeluaran wisatawan nasional di luar wilayah ekonomi negara referensi terhadap penawaran yang disediakan oleh bukan penduduk.

Di sisi lain, pola pengeluaran wisatawan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat pendapatan wisatawan yang mempengaruhi kemampuan dan minat daya beli, pola konsumsi atau perilaku belanja, harga dan nilai tukar mata uang yang sangat berpengaruh terhadap wisatawan mancanegara. Selain itu, peran serta dan pelayanan yang diberikan oleh pelaku ekonomi dalam destinasi wisata juga kerap mempengaruhi minat beli wisatawan sehingga diupayakan agar dapat selalu memberikan kesan positif kepada wisatawan.

Identifikasi lain dalam aspek sosioekonomi terdapat faktor yang mempengaruhi pola pengeluaran menurut Marcussen (2011), terdiri atas: 1) pendapatan, yang dapat mengindikasikan semakin tinggi pendapatan seseorang yang melakukan perjalanan wisata maka sangat memungkinkan semakin tinggi pula tingkat dan pola pengeluaran wisatawan tersebut; 2) usia, memiliki kemungkinan bahwa wisatawan yang lebih tua lebih cenderung untuk membelanjakan selaras dengan perolehan pendapatan dibandingkan wisatawan dengan usia yang lebih muda, meskipun beberapa peneliti masih belum bisa menyepakati pengaruh faktor usia terhadap pola pengeluaran; 3) paket atau tipe wisata, wisatawan yang mengikuti paket wisata bersama *tour operator* cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan wisatawan yang tidak menggunakan jasa *tour operator*; 4) *travel party size*, meskipun belum terdapat hubungan yang jelas namun kehadiran anak di bawah 15 tahun dalam suatu rombongan wisatawan dianggap berkontribusi dalam meningkatkan pengeluaran wisatawan kaitannya dengan pengalokasian pada akomodasi; 5) lama tinggal, sebagai faktor penentu total pengeluaran maka dapat dipastikan bahwa semakin lama durasi tinggal wisatawan maka semakin besar pula anggaran pengeluaran selama masa tinggal tersebut; 6) tipe akomodasi, tipe akomodasi baik *homestay*, hotel dan lainnya dengan spesifikasi dan rate bintang tertentu

yang dipilih selama tinggal di suatu destinasi juga mempengaruhi jumlah anggaran pengeluaran wisatawan; 7) moda transportasi, penentuan moda transportasi untuk mencapai destinasi dari daerah asal dan sebaliknya, maupun pemilihan moda transportasi selama kunjungan di destinasi juga mempengaruhi anggaran pengeluaran wisatawan; 8) tipe destinasi, pemilihan tipe destinasi dapat mempengaruhi pola pengeluaran wisatawan seperti destinasi *niche tourism* yang ditujukan untuk minat khusus dengan segmen pasar tertentu serta penerimaan jumlah pengunjung yang terbatas maka memerlukan anggaran pengeluaran lebih dibandingkan dengan *mass tourism*; 9) jarak perjalanan, jarak antara daerah asal dengan daerah tujuan wisata tentu mempengaruhi pengeluaran wisatawan selaras dengan pemilihan moda transportasi untuk mencapai daerah tujuan; dan 10) aktivitas, pemilihan aktivitas yang dilakukan selama berwisata tentu membutuhkan pengeluaran yang berbeda, akan membutuhkan lebih banyak pengeluaran bagi wisatawan apabila melakukan aktivitas berbelanja maupun berwisata kuliner.

Selain itu, Olya & Mehran (2017) juga membagi lima faktor yang mempengaruhi pola pengeluaran wisatawan yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, psikologis dan karakteristik perjalanan atau destinasi yang dituju. Secara psikologis dapat dibagi menjadi tiga

karakteristik yang mempengaruhi pola pengeluaran wisatawan yaitu: 1) *personal values*; 2) *motivations*; 3) *personality*.

Selanjutnya, keseluruhan pengeluaran wisatawan yang mengacu pada pengeluaran individu akan dialokasikan ke negara atau daerah tujuan wisata utama meskipun wisatawan tersebut menggunakan maskapai atau layanan jasa operator tur yang berbasis di negara lain, pengeluaran wisatawan akan tetap dialokasikan ke negara tujuan utama. Namun, terdapat pengecualian terhadap beberapa jenis pengeluaran dalam pariwisata yaitu pengeluaran untuk tujuan komersial, investasi atau transaksi jenis modal seperti real estat, mobil, tanah atau lahan dan lain-lain, serta pengeluaran uang tunai atau sumbangan yang ditujukan untuk orang atau lembaga swasta yang tidak mewakili pembayaran barang atau jasa pariwisata.

Oleh karena itu, data pengeluaran wisatawan di suatu negara merupakan agregat penting yang harus bersumber data jelas dan terpercaya sehingga dapat meningkatkan kredibilitas pengukuran dari hasil pemantauan dampak pariwisata terhadap perekonomian nasional dan sektor industri terkait lainnya. Semakin tinggi tingkat pengeluaran wisatawan di daerah tujuan wisata maka dapat memberikan *multiplier effect* bagi sektor perekonomian daerah tujuan wisata dan memicu peningkatan sektor penyedia barang dan

jasa pendukung kegiatan pariwisata. Demikian hal ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mengukur ketahanan suatu destinasi wisata dipantau dari data tingkat pengeluaran wisatawan hingga akhirnya menjadi kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah maupun negara.

c. Ketenagakerjaan di Bidang Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sektor utama dalam upaya penciptaan lapangan atau kesempatan kerja mengingat aktivitas wisata sangat bergantung pada sumber daya manusia. Tercatat dalam data WTTC (2022) bahwa pada tahun 2019 industri travel and tourism telah mendukung 333 juta pekerjaan, 271,3 juta pekerjaan pada tahun 2020 dan 289,5 juta pekerjaan pada tahun 2021 di seluruh dunia. Pariwisata juga menjadi salah satu sektor di banyak negara yang mempekerjakan lebih banyak wanita mewakili antara 60 hingga 70 persen dari tenaga kerja pariwisata serta kaum muda dibanding beberapa sektor lain.

Secara konseptual pekerjaan di bidang pariwisata merujuk pada keseluruhan pekerjaan atau orang yang terlibat sebagai penyedia barang dan jasa khususnya pelayanan yang berkarakteristik pariwisata maupun non-pariwisata di semua perusahaan dalam industri pariwisata. Terdapat dua tipe pekerjaan dalam industri pariwisata yaitu direct employment, pekerjaan yang disediakan dan berkaitan langsung dengan

pariwisata termasuk hotel, travel agent, penerbangan dan layanan transportasi lain, penyedia fasilitas rekreasional, tour guide, penyedia souvenir dan sebagainya yang termasuk dalam industri pariwisata. Indirect employment termasuk keseluruhan pekerjaan dalam bisnis usaha yang menjual atau menyediakan barang dan jasa kepada usaha bisnis di industri pariwisata.

Terlepas dari potensi penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata, kerap dihadapi tantangan dalam menciptakan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, pariwisata yang juga merupakan kegiatan padat karya yang membutuhkan pekerja dalam jumlah besar, hingga kerap menjadi permasalahan bahwa beberapa pekerja pariwisata memiliki keterampilan yang rendah atau bahkan tidak terampil sama sekali berakibat pada penempatan mereka pada kondisi pekerjaan yang rentan seperti kondisi kerja buruk, ketidaksetaraan kesempatan dan perlakuan, kekerasan, eksploitasi bahkan kekerasan seksual. Selain itu, isu lain menurut International Labour Organisation (ILO, 2001), kondisi kerja di bidang pariwisata dapat dinilai memiliki tingkat upah 20% lebih rendah daripada sektor lain, termasuk pertanian. Kelebihan pasokan pekerja yang tidak terampil dalam suatu industri juga menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan antar pekerja dan penekanan upah pekerja.

Permasalahan dan kurangnya upaya penciptaan pekerjaan yang layak bagi para pekerja pariwisata juga dapat tercermin melalui adanya jam kerja yang panjang tidak sesuai dengan upah yang diterima, tingkat turnover yang tinggi serta perlindungan sosial dan hak pekerja yang terbatas. Tingginya tingkat turnover dalam industri pariwisata sebagian besar disebabkan oleh permasalahan prospek karir yang buruk, gaji tidak sepadan, jam kerja yang tidak menentu bagi sebagian pekerja, hingga akhirnya menyebabkan stress fisik juga berpengaruh pada tingkat turnover. Selain itu, meskipun tingkat kesempatan kerja bagi perempuan dalam sektor pariwisata termasuk tinggi, tidak menutup kemungkinan juga terjadinya ketidaksetaraan gender. Perempuan kerap mengalami segregasi dalam hal akses pendidikan dan pelatihan, terlebih lagi rata-rata upah yang diterima tergolong lebih rendah dari pekerja laki-laki dengan keterampilan yang sebanding.

Terlepas dari adanya standar atau kualifikasi khusus untuk meningkatkan kualitas pekerja pariwisata, terdapat standar terukur dan hak-hak dasar dalam lingkungan kerja yang perlu diperhatikan dalam industri pariwisata, seperti jenis pekerjaan yang layak dan sesuai, tingkat upah dan jam kerja yang sesuai dan tidak mengeksploitasi serta beberapa hak yang memungkinkan seperti hak kebebasan berserikat, hak non-diskriminasi, hak suara dan hak akan potensi

pertumbuhan pekerja. Selain itu, untuk dapat mempertahankan suatu destinasi atau usaha bisnis dalam sektor pariwisata maka perlu pengembangan perusahaan yang berkelanjutan dari sisi pekerja guna menekan tingkat turnover dan permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Pengembangan perusahaan yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan kondisi kerja dan produktivitas, mempertahankan kepuasan kerja dan motivasi pekerja, peningkatan kualitas layanan dan kepuasan wisatawan, mengingat tenaga kerja dengan tingkat keterampilan dan kualitas yang tinggi juga dapat memastikan tingkat daya saing perusahaan dan inovasi yang lebih besar, meningkatkan prospek kerja dan memudahkan penyesuaian pasar wisatawan.

Maka dari itu, masalah ketenagakerjaan dan sumber daya manusia dalam industri pariwisata harus dapat diatasi guna mempertahankan suatu destinasi atau usaha bisnis wisata. Sehingga perlu pengukuran kondisi lapangan pekerjaan dan orang-orang yang dipekerjakan dalam industri pariwisata guna dapat memantau tingkat kelayakan kerja dan kesesuaian hak-hak yang diperoleh para pekerja.

Pengukuran lapangan pekerjaan di industri/sector pariwisata meliputi berbagai aspek, termasuk jumlah orang yang bekerja di sektor ini, lokasi mereka, jenis pekerjaan

yang mereka lakukan, tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, serta tingkat pendapatan yang diterima. Data lapangan pekerjaan di sektor pariwisata biasanya dikumpulkan melalui survei lapangan, survey berbasis internet, atau melalui penelitian akademik. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami pola pekerjaan di industri/sektor pariwisata, memprediksi kebutuhan pekerja di masa depan, dan membantu menentukan strategi pembangunan pariwisata. Decent jobs in tourism initiative (DJI) merupakan salah satu contoh inisiatif global yang menyarankan pengukuran lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. DJI menyarankan bahwa semua pengukuran lapangan pekerjaan di sektor pariwisata harus mencakup aspek-aspek yang menyangkut perlindungan hak pekerja, termasuk hak untuk memilih tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta hak untuk berorganisasi secara bebas. DJI juga menyarankan bahwa semua data lapangan pekerjaan di sektor pariwisata harus dikumpulkan dengan cara yang aman, legal, dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya sulit bagi para otoritas dan analis ekonomi pariwisata dalam mengukur dan menganalisis lapangan kerja dalam industri pariwisata secara komprehensif apabila didasarkan pada satu sumber statistik saja, maka perlu adanya integrasi data dari berbagai sumber

statistik untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif, konsisten dan menghasilkan analisis yang lebih akurat. Terdapat tiga kerangka metodologi internasional menurut UNWTO & ILO (2014) dalam mengintegrasikan data untuk pengukuran ekonomi dan dimensi pekerjaan dalam industri pariwisata yaitu melalui The Tourism Satellite Account (TSA), The OECD Employment Module dan The International Recommendations for Tourism Statistics 2008.

TSA akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dampak pariwisata terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, data TSA tidak menyediakan informasi secara spesifik kepada pemerintah maupun analisis ekonomi terkait jenis pekerjaan, pendapatan, kompensasi, jam kerja serta kondisi kerja di industri pariwisata, meskipun informasi tersebut merupakan data penting untuk mengukur dimensi dan kualitas lapangan kerja dalam industri pariwisata. Sedangkan melalui IRTS 2008 akan memberikan data gambaran konsep, definisi dan kategori dasar lapangan kerja dalam industri pariwisata berdasarkan statistik umum dan memberikan pemahaman indikator industri pariwisata yang selanjutnya akan dimasukkan kedalam TSA sebagai bentuk kerangka integrasi data ketenagakerjaan.

Kebutuhan akan data ketenagakerjaan di sektor pariwisata merupakan langkah utama untuk memperoleh pemahaman terkait struktur ketenagakerjaan di industri pariwisata kaitannya dengan penentuan langkah selanjutnya untuk pengambilan kebijakan terkait masalah ketenagakerjaan baik oleh pemerintah, pengusaha, maupun organisasi pekerja yang memiliki peran dalam menerapkan kebijakan dan memastikan intervensi pariwisata yang koheren. Selain itu, melalui data yang diperoleh juga selanjutnya dapat dilakukan analisis secara lebih detail seperti untuk memeriksa konsistensi data keuangan, menjawab peran pariwisata dalam menciptakan, mempertahankan dan mendiversifikasi kesempatan pekerjaan.

Kemudian untuk mempertahankan destinasi atau perusahaan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia menurut UNWTO dan ILO (2014) dapat dilakukan melalui: 1) meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan; 2) meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja dengan mengurangi ketidaksesuaian keterampilan dan pekerjaan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja; 3) mengurangi biaya turnover tenaga kerja yang tinggi; 4) mengevaluasi biaya tenaga kerja; 5) meningkatkan prospek

kerja dengan mengevaluasi struktur tenaga kerja dan kondisi tenaga kerja.

Maka dari itu, guna menjaga ketahanan suatu destinasi wisata dari segi sumber daya manusia maka perlu adanya pengembangan atau perbaikan kualitas tenaga kerja mulai dari pengetahuan dan pelatihan keterampilannya akan bidang yang sesuai, perolehan hak-hak dan upah pekerja yang sesuai, serta insentif pendukung lainnya yang dapat mendukung perbaikan kualitas pekerja pariwisata. Dengan terjaganya kualitas sumber daya manusia sebagai pekerja pariwisata, maka dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan industri pariwisata serta mengatasi isu-isu ketenagakerjaan dalam industri pariwisata.

4. Pilar Sosial dan Budaya

“Ketahanan destinasi pariwisata harus dimulai dari satu tujuan yaitu *People’s Quality of life* (peningkatan kualitas hidup manusia)”

Pengembangan destinasi pariwisata haruslah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, pada pilar sosial budaya ini membahas mengenai 3 fokus yang akan mengukur bagaimana warisan budaya, partisipasi masyarakat, dan tata kelola destinasi pariwisata yang baik berperan dalam ketahanan suatu destinasi pariwisata.

a. Warisan Budaya

Warisan budaya merupakan aset peninggalan dari suatu kelompok sosial yang diwariskan turun temurun dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Namun, tidak semua aset peninggalan dapat dikategorikan sebagai warisan budaya. Warisan budaya merupakan aset peninggalan yang telah diseleksi oleh masyarakat (Logan, 2007).

Warisan Budaya sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu *tangible culture* atau budaya berwujud, *intangible culture* atau budaya tidak berwujud, dan *natural heritage* atau warisan alam. Warisan budaya yang berwujud merupakan aset fisik atau properti kebudayaan yang erat kaitannya dengan karya seni. Properti kebudayaan ini pun terbagi menjadi aset yang dapat dipindahkan atau *movable assets* dan aset tetap yang tidak dapat dipindahkan atau *immovable assets* (Sullivan, 2016). Contoh properti kebudayaan yang dapat dipindahkan adalah buku, dokumen, lukisan, busana, dan artefak lainnya yang dianggap layak dipertahankan untuk masa depan. Untuk properti kebudayaan yang tidak dapat dipindahkan terdiri dari bangunan bersejarah, monumen, kompleks pemukiman masyarakat, hingga instalasi industry. Mengingat peninggalan berwujud merupakan sebuah aset yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh generasi selanjutnya, warisan ini kerap

menjadi simbol dan pengingat akan peradaban masa lalu (Tanselle, 1998). Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Borobudur sebagai warisan budaya dunia.



Gambar 25. Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2018)

Borobudur merupakan salah satu properti kebudayaan yang terletak di kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi budha ini didirikan sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan wangsa Syailendra. Candi ini sendiri merupakan sebuah model alam semesta yang dibangun untuk memuliakan Budha sekaligus tempat ziarah. Hingga saat ini, Borobudur masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan oleh umat Budha. Borobudur pun juga

menyimpan kumpulan pengetahuan mengenai aspek kehidupan masyarakat Jawa Kuno melalui relief-relief yang berada di setiap tingkatan dari candi ini.

Selanjutnya, UNESCO mendefinisikan warisan budaya tidak berwujud sebagai sebuah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan (termasuk instrumen, objek, artefak, ruang budaya) yang diakui oleh komunitas dan kelompok individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Warisan budaya ‘hidup’ ini diwujudkan dalam beberapa domain seperti keragaman Bahasa, pertunjukan seni, praktik sosial seperti ritual dan perayaan, cerita rakyat, pengetahuan mengenai alam semesta, dan keahlian tradisional (Vrdoljak, 2017). Bentuk warisan budaya ini merupakan hasil respons dari kelompok sosial terhadap interaksi mereka dengan lingkungan sekitar dan sejarah mereka (UNESCO, 2003). Hal ini memberikan suatu komunitas identitas dan kontinuitas yang dapat memberikan rasa apresiasi terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia. Warisan budaya yang ‘hidup’ di antara masyarakat ini merupakan sebuah warisan kebudayaan yang tidak dapat disentuh maupun diabadikan di museum, melainkan hanya dapat dirasakan dan dialami melalui media dan situasi tertentu.



Gambar 26. Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Tak Benda

Sumber: Deni Dahniel (2022)

Indonesia sendiri memiliki beberapa peninggalan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Salah satu dari warisan tersebut adalah pencak silat. Pencak Silat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2019 dan merupakan sebuah bagian penting dari budaya Indonesia yang telah ada sejak berabad-abad lamanya. Sejak masa kerajaan, pencak silat telah diajarkan sebagai seni bela diri untuk melindungi diri. Pencak silat tidak hanya mengandung unsur olahraga dan bela diri, tetapi juga mengandung unsur mental, spiritual dan seni. Selain seni pertunjukan, UNESCO juga menetapkan warisan budaya tak benda lainnya seperti batik, keris, gamelan, angklung, dan beberapa warisan lainnya.



Gambar 27. Noken sebagai Warisan Budaya Tak Benda asal Papua

Sumber: Kemenparekraf RI (2020)

Terdapat juga warisan budaya dari Papua yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2012 yang masih belum banyak diperbincangkan, yaitu Noken. Noken adalah jaring atau tas anyaman yang diikat dengan tangan dari serat kayu atau daun oleh masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada umumnya, masyarakat menggantungkan noken di kepala mereka dan menggunakannya untuk membawa hasil perkebunan, tangkapan dari laut atau danau, kayu bakar, bayi atau hewan kecil serta berbelanja. Noken juga sering digunakan untuk perayaan adat, atau diberikan sebagai persembahan perdamaian. Noken sendiri dimaknai sebagai simbol kebersamaan, tolong menolong, pentingnya penghargaan akan kejujuran dan pengakuan atas hak milik

seseorang. Noken juga menjadi identitas sosial bagi setiap suku yang ada di Papua karena setiap suku memiliki ciri khas noken yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Noken ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tidak hanya karena bentuk fisiknya, namun juga karena makna sosialnya.

Untuk tipe warisan budaya yang terakhir adalah warisan alam atau *natural heritage*. Warisan alam atau *natural heritage* merupakan kenampakan alam, formasi geologis dan fisiografis serta wilayah yang melambangkan tahapan utama dalam sejarah bumi terbentuk. Warisan alam juga merupakan wilayah yang mengandung habitat alami yang memiliki peran penting dalam konservasi dan bernilai khas dari sudut pandang sains dan konservasi (UNESCO Institute for Statistics, 2009). UNESCO sendiri memiliki program UNESCO *World Heritage Site* yang bertujuan untuk menginventarisasi dan melestarikan situs-situs penting sebagai warisan dunia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa wilayah yang telah dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO.



Gambar 28. Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Budaya Alam UNESCO

Sumber: Indonesia.Travel (2021)

Salah satu contohnya adalah Taman Nasional Komodo yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. TNK sendiri ditetapkan sebagai situs warisan budaya oleh UNESCO pada tahun 1991 karena taman nasional ini adalah habitat tempat tinggal dari Komodo yang merupakan spesies endemik sekaligus kadal terbesar di dunia yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Hewan ini juga merupakan salah satu hewan purba yang sudah ada sejak 30 juta tahun yang lalu. Selain itu Taman Nasional Komodo juga memiliki kekayaan laut yang beragam mulai dari terumbu karang, berbagai spesies seperti penyu, paus, lumba-lumba, hingga duyung.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat terlihat bahwa warisan budaya merupakan aset dengan nilai penting yang berguna untuk pengetahuan manusia khususnya ilmu sejarah karena dapat memberikan ide yang konkrit. Walaupun

dengan seiring berkembangnya zaman, terdapat teknologi yang dapat mendokumentasikan dan menyimpan segala hal, aktualisasi dari objek-objek warisan budaya masih memiliki peran penting dalam menghubungkan peradaban antar generasi dan memungkinkan orang-orang untuk dapat melihat dan menyentuh masa lalu (Cignoni & Scopigno, 2008). Hal inilah yang membuat banyak wisatawan termotivasi untuk melakukan kunjungan ke tempat lain dengan tujuan mempelajari budaya, sejarah, dan cara hidup masyarakat lokal (Richards, 2003).

Dalam berbagai aspek, fenomena tersebut tentu dapat mendatangkan dampak positif bagi destinasi, terutama bagi Indonesia dengan segala keragaman budayanya. Namun, dengan memperlihatkan dan mengekspos warisan budaya pada dunia, tentu saja akan mendatangkan berbagai resiko dan ancaman bagi aset warisan budaya tersebut. Aset-aset warisan budaya pada dasarnya berada dalam keadaan transformasi kimia yang konstan dan rentan akan kerusakan. Keberadaan wisatawan massal tentu akan mendatangkan potensi kerusakan yang besar pula (O'Keefe et al., 2016).

Oleh karena itu Langkah-langkah preventif perlu dilakukan untuk melindungi warisan budaya, terutama warisan budaya yang difungsikan sebagai daya tarik wisata. Perlindungan aset budaya dan peninggalan sejarah dapat

dilakukan dengan cara membuat regulasi perlindungan aset budaya dan peninggalan sejarah, membangun museum, melakukan restorasi, melakukan pemeliharaan, pengelolaan kunjungan wisatawan, dan interpretasi budaya terutama pada asset-asset yang sensitif untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran wisatawan.

Regulasi perlindungan aset budaya dan peninggalan sejarah dapat melindungi aset budaya dan peninggalan sejarah dari pengrusakan dan penggunaan yang tidak sesuai. Di Indonesia sendiri, pelestarian cagar budaya telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Peraturan ini telah mengatur tata cara melestarikan warisan budaya mulai dari melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya dengan bijak. Peraturan tersebut juga telah mengatur tata cara pencarian dan penetapan cagar budaya. Pembangunan museum dapat menarik wisatawan dan memberikan informasi yang akurat tentang sejarah dan budaya suatu wilayah. Melakukan restorasi aset budaya dan peninggalan sejarah dapat memastikan bahwa aset itu tetap tersimpan dengan baik dan menarik wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Pemeliharaan aset budaya dan peninggalan sejarah juga penting untuk memastikan bahwa aset itu tetap utuh dan tersimpan dengan baik. Dengan meningkatkan edukasi tentang aset budaya dan peninggalan sejarah di suatu wilayah, kita dapat menarik lebih banyak

wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut dan menikmati warisan yang dimiliki.

b. Partisipasi Masyarakat

Pada saat perencanaan maupun pengelolaan destinasi pariwisata, sangat penting untuk memberikan kendali pada masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan kegiatan pariwisata dapat mendatangkan manfaat langsung bagi mereka. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan berarti masyarakat dapat mengontrol penggunaan lahan mereka dan melindungi tradisi lokal yang ada (UNEP, 2005). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat setempat dihargai dan dihormati serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan destinasi pariwisata. Dengan demikian, partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata dapat meningkatkan kualitas destinasi dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan menyenangkan bagi para wisatawan.

Sebaliknya kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaan destinasi pariwisata dapat menimbulkan beberapa masalah seperti masyarakat yang menjadi apatis, hingga timbulnya penolakan terhadap pengembangan pariwisata yang tidak sesuai dengan tatanan

hidup mereka. Hal ini karena peluang ekonomi yang dihasilkan dari pengembangan destinasi pariwisata dapat menyebabkan perubahan lingkungan dan masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan manfaatnya.

Selain itu, sikap apatis dan kurangnya pengetahuan teknis juga dapat menjadi hambatan terhadap partisipasi masyarakat, terlebih lagi sebagian besar masyarakat mungkin masih awam akan istilah-istilah perencanaan pariwisata. Sehingga terdapat ambiguitas terkait keterlibatan masyarakat sejak tahap paling awal perencanaan pariwisata, hal ini selanjutnya menyulitkan para perencana pariwisata untuk mengikuti prinsip partisipasi masyarakat. Akibat dari sikap apatis masyarakat juga dapat berdampak buruk dan berakhir dengan penyalahgunaan kepentingan oleh kelompok tertentu, seperti pengaruh yang tidak proporsional dari kelompok advokasi atau pengelola selain dari masyarakat yang memiliki kepentingan pribadi yang berorientasi pada hasil tertentu. Penyalahgunaan kepentingan dapat dilakukan melalui upaya penyampaian suara atau sentimen mereka atas dasar perwakilan ‘masyarakat’ yang pada faktanya tidak terdapat keterlibatan dari masyarakat sama sekali terkait perencanaan, pengelolaan, maupun pengambilan keputusan.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata juga dapat menimbulkan masalah ketidakmerataan distribusi manfaat dan pendapatan dari pariwisata dalam suatu masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para kelompok tertentu. Hal ini dapat mempersulit terciptanya upaya keberlanjutan sosial-budaya. Pada dasarnya masyarakat sadar akan manfaat dan dampak ekonomi positif yang diperoleh namun karena tidak meratanya manfaat yang diperoleh serta tidak sebanding dengan upaya partisipasi yang sudah dilakukan maka dapat merubah sikap masyarakat yang awalnya euforia terhadap pariwisata menjadi sikap apatis, kesal bahkan antagonisme. Sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan partisipasi masyarakat baik karena faktor eksternal maupun internal dari kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk ikut berpartisipasi.

Pada prinsipnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan khususnya secara sosial dan budaya, dapat dimulai dengan memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi secara aktif dan suportif serta menginvestasikan kendali pengelolaan kepada masyarakat itu sendiri. Hingga pada akhirnya dapat mencapai tingkat partisipasi masyarakat tertinggi. Upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa masyarakat merasa didengar dan pendapat mereka ikut dipertimbangkan

dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian pemantauan terhadap partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui cara formal maupun informal seperti percakapan informal maupun diskusi bersama kelompok. Selain itu, pertemuan rutin juga dapat dilakukan bersama kelompok kepentingan masyarakat dengan harapan masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyuarakan pendapat terkait manfaat dan dampak yang diperoleh dari pariwisata, serta diskusi terkait upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif yang mereka rasakan, maupun masukan terkait pengelolaan kegiatan wisata supaya lebih ideal dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sumber daya. Dalam upaya memastikan teratasinya dampak negatif dari pariwisata, maka penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata.

Pengelolaan dalam upaya partisipasi masyarakat dapat dikembangkan menjadi lebih terintegrasi antara pengembangan pariwisata, pembangunan ekonomi dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai metode yang digunakan untuk mendukung pendekatan partisipatif masyarakat dan menekankan pada pengetahuan lokal hingga memungkinkan masyarakat itu sendiri yang akan membuat penilaian, analisis dan rencana pengembangan. Selain itu, terdapat didefinisikan pula

sebagai sarana atau metode yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi hasil mereka sendiri atau PRA sebagai metode yang dilakukan dengan memobilisasi kelompok untuk membangkitkan partisipasi mereka khususnya dalam pengambilan keputusan tertentu.

Metode PRA ini melibatkan beberapa prinsip, proses komunikasi dan metode untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mengemukakan sudut pandang mereka khususnya dalam pengembangan pariwisata hingga dapat mencapai kemandirian dan kekuatan internal masyarakat. Prinsip utama dalam PRA pada dasarnya tidak memandang masyarakat sebagai objek melainkan sebagai subjek serta menggunakan indikator sosial berdasarkan prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaannya, metode PRA kerap membutuhkan fasilitator dari pihak luar sebagai pendamping yang siap memberikan edukasi namun tetap menempatkan diri sebagai insider, namun program dan perencanaan tetap dilakukan oleh anggota dalam artian masyarakat yang berpartisipasi aktif dan terlibat secara penuh.

PRA sendiri memiliki tujuan untuk melibatkan dan mendukung partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal ini pengembangan pariwisata serta memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan

pariwisata, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemerataan manfaat dan ekonomi masyarakat. Selain itu, melalui PRA masyarakat juga dilatih untuk mengenali potensi dan peluang pada diri individu maupun potensi wisata pada daerahnya serta menganalisa kebutuhan hingga problem solving yang mendukung kemandirian masyarakat.

Penerapan PRA kaitannya dengan pengembangan pariwisata melalui partisipasi masyarakat dapat dicontohkan dalam pembangunan desa wisata. Desa wisata menjadi salah satu wisata berbasis masyarakat melalui pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan dan secara aktif mengajak partisipasi masyarakat di setiap kegiatan pengembangan pariwisata. Mulai dari analisa potensi, menyusun perencanaan, menyusun rencana kerja dan evaluasi bersama. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pariwisata diharapkan tidak hanya pada perolehan kesempatan kerja saja, tetapi hingga capaian partisipasi tingkat tinggi hingga mereka memiliki tingkat kontrol atas aktivitas pariwisata yang dilakukan di daerahnya, contoh yaitu menanggapi semakin tingginya dampak negatif pariwisata terutama pada nilai sosial budaya yang dimiliki masyarakat setempat maka salah satu kepala desa di Desa Pentakosta Selatan di Vanuatu membentuk dewan khusus untuk mengelola kegiatan wisata dan bertanggung jawab untuk menjaga atas integritas budaya

yang dimiliki. Beberapa upaya yang dilakukan adalah seperti mencegah pembuatan film atau acara di desa mereka dan membatasi jumlah kunjungan yang menghadiri acara adat desa sehingga wisatawan tidak hanya menerima pengalaman budaya yang otentik dari desa tersebut tetapi juga menjadi upaya untuk mempertahankan signifikansi budaya dari ritual adat masyarakat desa tersebut.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata merupakan elemen penting selain untuk mempertahankan destinasi dan taraf kesejahteraan masyarakat serta pemerataan manfaat dari pariwisata, tetapi juga untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam pengembangan pariwisata sebagai tuan rumah yang memiliki kendali penuh atas wilayah mereka. Di sisi lain dengan kualitas dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat maka dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya secara sosial budaya saja melainkan ekonomi dan lingkungan sehingga mampu mempertahankan keseluruhan sumber daya dan aset yang dimiliki.

c. *Governance* (Tata kelola yang baik)

Atribut ini akan mengukur kemampuan destinasi pariwisata, baik dari perspektif pemerintahan maupun swasta dalam memberikan arahan dan tata kelola yang efektif,

efisien, dan transparan guna meningkatkan, mengembangkan dan mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable & responsible tourism*). Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua aspek destinasi pariwisata, termasuk infrastruktur, operasional, pembangunan, pemasaran, dan manajemen, dilakukan secara teratur dan tepat waktu.

Kemudian, pemerintah juga harus menjamin bahwa destinasi pariwisata dijaga dan dipertahankan dengan baik dengan menerapkan tata kelola yang menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai budaya, dan lingkungan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua aktivitas yang terkait dengan destinasi pariwisata mematuhi hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

Rendahnya kualitas arahan dan tata kelola dari pemerintah dapat menimbulkan beberapa masalah seperti fasilitas pariwisata yang rendah, infrastruktur yang lemah, biaya yang terlalu tinggi, dan kurangnya promosi pariwisata. Hal ini juga ditunjukkan dengan kurangnya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pariwisata. Rendahnya kualitas tata kelola ini pun juga dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan daerah karena kurangnya peluang pariwisata, kurangnya cita-cita pariwisata, dan kurangnya kemampuan untuk menarik pengunjung. Setelah itu,

destinasi pariwisata akan menjadi sangat rentan dan mudah terancam. Sehingga penting bagi suatu pemerintahan untuk mengambil peran utama dalam membangun kondisi yang kondusif untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pariwisata.

Tata kelola pemerintahan atau pemerintahan yang baik akan berkaitan erat dengan adanya kontribusi terhadap pemberdayaan dan keseimbangan antar pilar pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, terdapat beberapa prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta supremasi hukum yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kaitannya dalam pariwisata terdapat istilah *Good Tourism Governance* yang diadaptasi dari konsep *Good Governance* yang menjelaskan bahwa dalam tata kelola kepariwisataan yang baik memerlukan keterlibatan dari tiga aktor penting yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta guna menciptakan pengelolaan pariwisata yang tepat. Demikian selaras dengan UNDP bahwa aktor penting dalam pengelolaan pariwisata terdiri atas *state, private sector* dan *society*.

Kemudian dalam pengelolaannya terdapat empat fungsi pengelolaan yang dapat diterapkan yaitu *planning, directing,*

organizing, dan *controlling* dari masing-masing aktor yang memegang peran penting. Pemerintah kaitannya dalam pengelolaan pariwisata dapat berperan dalam membina, mengawasi dan mengarahkan setiap rencana pengelolaan. Demikian pula pemerintah daerah yang memiliki fungsi erat kaitannya dalam berupaya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak bagi swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Peran pihak swasta dalam pengelolaan dapat berupa penyedia fasilitas pendukung kegiatan pariwisata seperti akomodasi maupun penyedia jasa yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu masyarakat lokal yang tentu saja memiliki peran penting untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan pariwisata maupun keseluruhan aktivitas wisata.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa pemerintah memiliki peran lain sebagai fasilitator, regulator, mediator, stimulator dan koordinator terhadap pihak swasta dan masyarakat. Demikian pihak swasta yang memiliki peran dalam produksi dan distribusi penyedia jasa pelayanan dalam pariwisata, masyarakat sebagai mitra pemerintah dan swasta untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan pariwisata. Melalui bentuk kolaborasi antar pihak maka dapat menjadi bentuk *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata. *Collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu identifikasi masalah

dan peluang dari kepariwisataan, kedua yaitu diskusi antar aktor untuk penyelesaian masalah dan pemanfaatan peluang untuk pengelolaan pariwisata, ketiga yaitu merencanakan tindakan kolaboratif hingga menghasilkan suatu program atau strategi yang mendukung pengelolaan pariwisata. Sedangkan Morse dan Stephens (2012) juga menjelaskan terdapat empat tahap *collaborative governance* yaitu: 1) *assessment*; 2) *initiation*; 3) *deliberation*; 4) *implementation*.

Kemudian menurut DeSeve (2007) berhasil atau tidaknya tindakan kolaboratif yang dilakukan antar pihak dapat diukur melalui delapan indikator yaitu: 1) *Network structure*, yaitu struktur jaringan pemerintahan kolaboratif yang terlibat tidak ada unsur kekuasaan, dominasi maupun monopoli; 2) *Commitment to a common purpose*, berupa komitmen terhadap tujuan yang terdapat pada misi umum pemerintahan dan tujuan kolaborasi yang terjalin tidak boleh memihak salah satu aktor; 3) *Trust among the participants*, berupa sikap saling percaya sebagai wujud hubungan profesional yang terjalin; 4) *Governance*, berupa aturan yang disepakati bersama serta bagaimana kolaborasi akan dijalankan, kejelasan siapa saja yang terlibat dan tidak terlibat; 5) *Access to authority*, terdapat aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh semua pihak; 6) *Distributive accountability* atau *responsibility*, pembagian tanggung jawab yang jelas pada masing-masing pihak; 7) *Information sharing*, berupa

pembagian informasi yang jelas dan kemudahan akses informasi; dan 8) *Access to resources*, terdapat kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing-masing pihak yang terlibat.

Maka dari itu, dalam upaya mempertahankan suatu destinasi wisata perlu adanya kualitas dan tata kelola kepariwisataan yang baik terlebih dapat terjalin dengan baik antar pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui tata kelola pemerintahan atau kepariwisataan yang baik.

5. Pilar Pertahanan Keamanan

“Pertahanan dan keamanan harus menjadi prinsip fundamental dalam upaya mengembangkan Ketahanan Destinasi Pariwisata.”

Dalam kehidupan sehari-hari, keselamatan dan keamanan atau *safety & security* merupakan sebuah konotasi yang memiliki banyak pengertian. Keselamatan dan keamanan dapat diartikan sebagai tidak adanya keadaan atau faktor yang mengancam kehidupan kita sehari-hari. Terdapat juga pandangan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan suatu keadaan yang “diberikan” oleh struktur pemerintahan kepada masyarakat melalui aktor sosial seperti anggota militer dan polisi.

Lambat laun, pemahaman akan keselamatan dan keamanan semakin berkembang dari yang awalnya merupakan sebuah

keadaan yang ditentukan oleh negara, menjadi nilai dan tujuan yang dimiliki masyarakat. Kita hidup dalam masyarakat sosial yang memandang bahwa keamanan adalah keutamaan tertinggi. Dalam konteks pariwisata, keselamatan dan keamanan juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan daya saing suatu destinasi wisata. Hal ini dikarenakan wisatawan cenderung enggan berkunjung ke suatu daerah yang dianggap berbahaya. Sebuah penelitian di Serbia juga menunjukkan bagaimana peringkat global daya saing Serbia menurun akibat isu keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan sistem keamanan demi mempertahankan destinasi wisata dari berbagai ancaman yang kapan saja dapat terjadi.

Namun, perlu diketahui juga bahwa tidak akan ada individu maupun institusi yang dapat mencapai keselamatan dan keamanan yang absolut. Akan selalu ada ancaman yang dapat kapan saja menimpa seorang individu bahkan institusi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem dan strategi pertahanan untuk mempertahankan keselamatan dan keamanan tersebut.

Pilar pertahanan keamanan ini sendiri terdiri dari 3 fokus yang akan membahas mengenai bagaimana destinasi pariwisata dapat memonitor, mencegah, dan menangani potensi kejahatan, keselamatan, hingga krisis yang mungkin terjadi di destinasi pariwisata.

a. Manajemen Keamanan dan Keselamatan

Terdapat berbagai macam bentuk ancaman yang dapat menyerang seorang individu maupun destinasi secara keseluruhan. Bentuk perbuatan kriminal atau kejahatan yang paling umum terjadi di destinasi wisata adalah perampokan, penipuan, hingga penyerangan dan pelecehan seksual. Namun, perlu diingat bahwa tindak kriminalitas bukanlah satu-satunya tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan di destinasi wisata. Terdapat beberapa tindakan yang mungkin saja tidak dianggap sebagai tindakan illegal atau tindak kejahatan, namun tetap dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika terdapat seorang wisatawan yang merasa terganggu oleh orang lain, walaupun orang tersebut tidak secara terang-terangan melakukan pelanggaran hukum, namun perbuatan yang dilakukan sampai pada titik mengganggu kenyamanan personal. Walaupun begitu, mengingat pasti terdapat perbedaan budaya antara wisatawan dan masyarakat lokal, kemungkinan terdapatnya benturan budaya besar terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya batasan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pihak keamanan destinasi juga perlu menerapkan SOP mengenai bagaimana menangani situasi-situasi tertentu (Niemisalo, 2014).

Selain gangguan personal, terdapat juga keadaan yang sama sekali tidak dianggap sebagai perbuatan kriminal maupun tindak kejahatan, namun dapat mengancam nyawa masyarakat, yakni *overcrowd*. Pada tahun 2022 sendiri, terdapat beberapa tragedi *overcrowd* yang telah mengguncang dunia, salah satunya adalah tragedi Itaewon, di Korea Selatan pada 29 Oktober 2022. Tragedi ini terjadi pasca perayaan *Halloween* di Itaewon yang merupakan sebuah distrik populer di Seoul dan menewaskan kurang lebih 158 orang, dan 196 orang lainnya terluka. Hal ini terjadi karena melonjaknya jumlah pengunjung yang datang dan berkumpul di area tersebut. Dilaporkan lebih dari 100,000 orang berkumpul di area yang relatif sempit. Terdapat banyak pengunjung yang terkena henti jantung akibat berdesak-desakkan, dan penumpukan. Pihak keamanan sendiri juga mengalami kesulitan dalam mengatur dan mengurai kerumunan karena jumlah personel keamanan yang tidak seimbang dengan jumlah kerumunan, yakni 137 personel.

Di Indonesia sendiri juga terdapat tragedi *overcrowd* yang menewaskan kurang lebih 135 orang dan 583 orang lainnya terluka. Tragedi ini terjadi pasaca pertandingan sepakbola di Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kerusakan terjadi karena sekitar 3,000 orang pendukung memasuki lapangan dan timbulnya bentrok antara pihak

keamanan dan pendukung. Gas air mata yang ditembakkan pun memicu keadaan menjadi tidak kondusif karena para pengunjung mulai berlarian untuk mencari jalan keluar. Penumpukan pun terjadi di gerbang pintu 14 dan menyebabkan para pengunjung sesak nafas akibat kekurangan oksigen. Selain itu, terdapat juga pemberitaan mengenai terdapatnya kemungkinan tiket yang dijual lebih dari kapasitas yang seharusnya.

Tragedi-tragedi di atas menunjukkan bahwa *overcrowd* dapat memicu kerumunan yang sulit untuk dikontrol sehingga berpotensi menimbulkan kericuhan. Sehingga dalam manajemen keselamatan dan keamanan, sangat penting untuk menerapkan *carrying capacity* atau batas daya tampung di destinasi wisata. *Carrying capacity management* sendiri juga merupakan suatu sistem manajemen keselamatan dan keamanan yang digunakan untuk mengatur jumlah pengunjung yang boleh masuk ke suatu destinasi pariwisata dan memastikan bahwa jumlah maksimum tidak melebihi kapasitas yang aman. Sistem ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa jumlah pengunjung yang datang tidak akan membahayakan destinasi dan masyarakat lokalnya

Destinasi pariwisata juga harus memiliki manajemen keselamatan dan keamanan untuk memonitor, mencegah,

melaporkan, dan menanggapi kejahatan, keselamatan, dan bahaya kesehatan baik yang ditujukan untuk pengunjung maupun masyarakat lokal. Manajemen keselamatan dan keamanan pariwisata melibatkan penerapan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan wisatawan dan melindungi mereka dari potensi bahaya. Dalam hal memonitor, destinasi wisata harus memiliki sistem untuk memantau segala kegiatan yang sedang berlangsung di destinasi tanpa melanggar privasi seseorang. Hal ini dapat dilakukan melalui pemasangan kamera pengawasan di beberapa area tertentu, dan melaksanakan patroli rutin. Dengan pemantauan tersebut, pihak keamanan dapat memiliki kesempatan untuk mengetahui adanya ancaman lebih cepat. Ketika pihak keamanan melihat situasi dan kondisi yang mulai tidak kondusif, pihak keamanan dapat mengambil tindakan untuk mencegah memburuknya situasi tersebut. Rekaman CCTV juga dapat digunakan sebagai bukti pendukung yang konkrit ketika tindak kejahatan telah dilakukan (Tarlow, 2014).

Dalam hal mencegah, destinasi wisata dapat melakukan penilaian risiko dan mengembangkan kebijakan, prosedur, dan protokol keselamatan berdasarkan penilaian tersebut. Destinasi wisata juga dapat melatih staf dan wisatawan tentang masalah keamanan, bagaimana sikap dan reaksi yang harus dilaksanakan ketika ancaman terjadi. memantau dan menanggapi insiden keselamatan; dan mengembangkan

rencana dan protokol darurat. Selain itu, manajemen keselamatan dan keamanan pariwisata juga mencakup kegiatan seperti membentuk komite keselamatan, memantau kondisi keselamatan di kawasan tersebut, dan memberikan saran dan informasi perjalanan kepada wisatawan.

Selain itu destinasi pariwisata juga sebaiknya memiliki sistem deteksi kebakaran, sistem pemantauan, dan sistem pengiriman informasi. Sistem ini dapat membantu dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan pengunjung dan masyarakat setempat, serta memonitor aktivitas kriminal dan kejahatan. Sistem ini juga akan membantu dalam mencegah dan mengidentifikasi kejadian berbahaya sebelum mereka berkembang menjadi masalah signifikan. Sistem ini juga akan membantu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar destinasi pariwisata.

b. Manajemen Krisis

Manajemen krisis pada dasarnya erat kaitannya dengan manajemen resiko, namun kedua konsep tersebut bagaikan dua sisi koin yang berbeda. Manajemen krisis sendiri lebih bersifat reaktif terhadap suatu permasalahan, sedangkan manajemen resiko lebih bersifat preventif atau pencegahan. Pengelola destinasi wisata tentu saja memiliki tanggung jawab dalam mencegah suatu krisis untuk terjadi. Namun, seperti halnya tidak ada tingkat keamanan yang absolut, tidak

semua krisis dapat dicegah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan tindakan-tindakan reaktif untuk menangani dan menghadapi krisis yang sewaktu-waktu dapat terjadi di destinasi wisata. Krisis sendiri dapat dianggap menjadi sebuah krisis ketika sebuah situasi atau peristiwa telah diketahui oleh publik secara masal. Menurut Tarlow (2014) kondisi-kondisi yang dianggap sebagai krisis pariwisata antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:

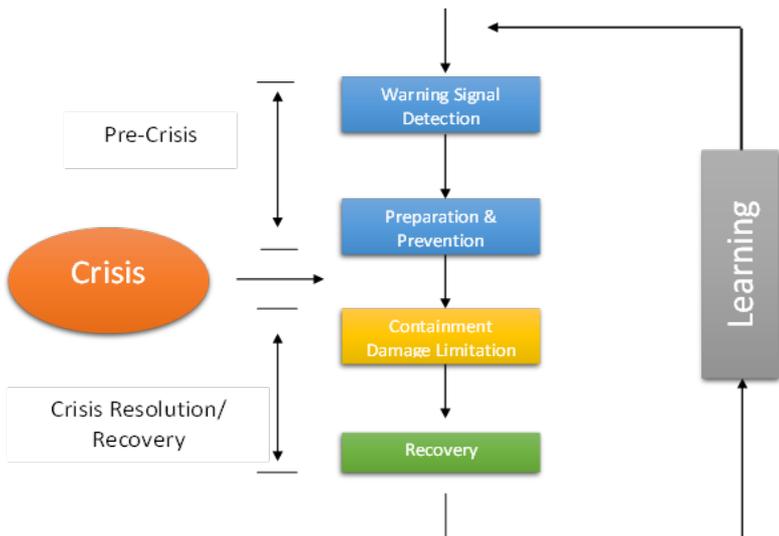
- Konflik dan perang internasional
- Aksi terorisme
- Krisis pangan dan Kesehatan
- Korupsi dan skandal pemerintahan
- Krisis ekonomi dan lingkungan

Untuk mengurangi risiko dan ancaman krisis tersebut, pengelola destinasi pariwisata harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa destinasi tetap aman bagi semua orang, dan tidak hanya bagi para turis saja. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan menganalisis berbagai macam kemungkinan ancaman resiko dan krisis yang mungkin saja terjadi di destinasi wisata. Setelah itu, pengelola juga perlu menganalisis kelebihan, kelemahan dan kekurangan yang dimiliki destinasi wisata.

Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apa saja ancaman yang besar kemungkinannya sulit untuk diatasi oleh destinasi wisata. Dengan demikian, pengelola dapat mengelompokkan jenis-jenis ancaman berdasarkan ancaman yang paling beresiko tinggi hingga ancaman dengan resiko rendah. Pengelompokkan tersebut akan membantu pengelola dalam merencanakan tindakan preventif atau pencegahan bagi setiap level ancaman. Hal tersebut juga dapat membantu pengelola untuk menentukan prioritas dalam mengatasi ancaman apabila terjadi konflik pada saat yang bersamaan (Santana, 2004).

Selain, tindakan pencegahan, destinasi wisata juga memerlukan tindakan-tindakan reaktif untuk menangani krisis yang terjadi diluar perkiraan pengelola. Untuk melatih reaktivitas dari setiap orang yang terlibat, pengelola dapat membuat skenario acak dan menyusun berbagai macam reaksi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Pelatihan ini dapat mengasah reaksi setiap orang dalam menghadapi keadaan yang berbeda dan mengurangi tingkat kepanikan apabila krisis terjadi. Penting juga untuk membangun kesiapan emosi, psikologi, dan teknis dari pengelola destinasi wisata dalam menghadapi situasi-situasi tertentu yang kompleks.

Pada dasarnya, proses penanganan krisis adalah proses pembelajaran. Dimana, melalui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, pengelola dapat melakukan evaluasi mengenai efektivitas penanganan krisis yang telah dilakukan. Seperti yang terlihat pada gambar 26, fase *pre-crisis* adalah fase di mana deteksi akan terjadinya krisis diperingatkan, setelah itu destinasi wisata akan memasuki fase persiapan dan pencegahan. Ketika krisis terjadi, pengelola akan melakukan pertahanan dan usaha pengurangan dampak dari krisis yang terjadi. Setelah krisis berakhir, destinasi wisata akan memasuki fase pemulihan. Berikut merupakan gambaran dari fase penanganan krisis yang diadaptasi dari Pauchant and Mitroff 1992.



Gambar 29. Fase Manajemen Krisis

Sumber: Adaptasi Mitroff and Pauchant (1992)

Pada fase pemulihan, pengelola destinasi wisata juga harus memiliki perencanaan pasca krisis. Hal ini dikarenakan, ketika suatu krisis terjadi akan memberikan gambaran yang negatif bagi destinasi wisata. Sehingga strategi pemasaran diperlukan dalam mengembalikan reputasi destinasi wisata. Walaupun begitu, terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu lama, ataupun meninggalkan kesan negatif yang begitu mendalam bagi masyarakat. Sehingga, terkadang cukup sulit untuk mengembalikan reputasi destinasi wisata pasca krisis terjadi.

Baru-baru ini, dunia tengah diguncang oleh pandemi COVID-19 yang mengancam Kesehatan banyak orang. Dalam mengatasi krisis Kesehatan ini, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa tindakan mitigasi dan pemulihan.

KEBIJAKAN BIDANG PARIWISATA MERESPON PANDEMI COVID-19



Gambar 30. Kebijakan Bidang Pariwisata Merespon Pandemi COVID-19

Sumber: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021)

Kebijakan bidang pariwisata dalam merespon pandemi COVID-19 pun terbagi menjadi 3 tahap, yakni pengelolaan krisis dan dampak pandemic COVID-19, melakukan akselerasi dan upaya pemulihan, serta persiapan pasca pandemi COVID-19. Dalam rangka pemulihan sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki beberapa langkah strategis pemulihan.

Pertama, dilakukan revitalisasi destinasi pariwisata dan peningkatan kepercayaan pasar wisatawan dengan meningkatkan rasa aman dalam berkunjung ke destinasi wisata. Salah satu program dalam strategi ini adalah percepatan program vaksinasi dan penciptaan *herd immunity*

pada destinasi prioritas serta perluasan sertifikasi CHSE. Langkah kedua adalah melanjutkan pembangunan sesuai RPJMN. Pembangunan ini termasuk penyelesaian pembangunan 5 Destinasi Super Prioritas hingga revitalisasi Bali dan destinasi unggulan lainnya. Pemulihan Permintaan Domestik dengan cara menyesuaikan regulasi perjalanan domestic. Pemerintah juga memperkuat produk-produk ekonomi kreatif serta produk wisata bernilai tambah seperti MICE dan wisata olahraga. Kementerian Parekras juga melakukan promosi untuk meningkatkan minat wisatawan domestik dalam melakukan perjalanan di dalam negeri serta membeli produk-produk lokal. Langkah terakhir adalah Pemulihan Permintaan Internasional dengan cara menyusun rute zona destinasi prioritas aman berwisata, penyesuaian regulasi visa dan perjalanan internasional, hingga penerbangan langsung ke destinasi utama dengan pasar wisatawan terpilih.

c. **Manajemen Bencana**

Selain ancaman krisis, Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang sangat rawan akan bencana. Telah banyak literatur yang membahas mengenai pengertian dari bencana atau *disaster* itu sendiri. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa krisis dan bencana merupakan suatu kejadian tidak terduga yang mengancam dan merubah tatanan hidup manusia. Terdapat juga pengertian bahwa

bencana merupakan suatu kejadian yang lebih mengarah kepada peristiwa alam yang mengejutkan dan memberikan tingkat resiko serta ketidakpastian yang lebih tinggi. Beberapa akademisi berargumen bahwa krisis merupakan suatu peristiwa yang lebih bisa dikontrol dan diprediksi, sedangkan bencana merupakan peristiwa yang sangat sulit untuk diantisipasi karena peristiwa alam cenderung berada diluar kendali manusia (Ritchie, 2008). Oleh karena itu, diperlukan rencana mitigasi dan pengurangan bahaya serta potensi bencana di tingkat nasional, regional, lokal dan individu.

Weichselgartner (2001) pun telah menegaskan kembali mengenai implikasi mitigasi bencana alam sebagai berikut:

- Mitigasi bencana alam harus menekankan kepada pendekatan sosial daripada pendekatan fisik,
- Pendekatan mitigasi juga harus menekankan pada tindakan proaktif dibanding reaktif,
- Tindakan mitigasi perlu berfokus pada struktur internal dalam masyarakat daripada kekuatan eksternal,
- Pengurangan kerentanan terhadap bencana harus diintegrasikan sebagai bagian dari kebijakan dan program yang sedang berjalan,
- Kebijakan dan program ini harus terus-menerus ditinjau, dievaluasi, dan dimodifikasi,

Hal pertama yang perlu dilakukan destinasi wisata adalah melakukan inventarisasi dan analisis potensi bahaya dan pemetaan bencana. Pemetaan ini akan membantu dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap bencana dan potensi bencana yang mungkin terjadi (Weichselgartner, 2001). Ini juga memungkinkan perencanaan yang lebih tepat untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi. Di Indonesia sendiri, bencana yang paling sering terjadi adalah gempa bumi, gunung meletus, tsunami, hingga badai (Ritchie, 2008).

Analisis mengenai siapa dan apa saja yang berpotensi terdampak dari suatu bencana alam yang mungkin terjadi juga diperlukan. Analisis ini berupa identifikasi dan pengukuran mengenai seberapa banyak jumlah populasi masyarakat dan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan di daerah rawan bencana hingga apa saja infrastruktur yang mungkin terdampak dan bagaimana ketahanan infrastruktur tersebut dalam menghadapi bencana (Weichselgartner, 2001).

Selanjutnya, diperlukan pengembangan instrumen pemantauan dan sistem informasi untuk memonitor kondisi dan perkembangan bencana di seluruh Indonesia. Pemantauan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal bencana sehingga dapat dilakukan peringatan serta pemberian rekomendasi tindakan yang tepat untuk mengahadapinya. Oleh

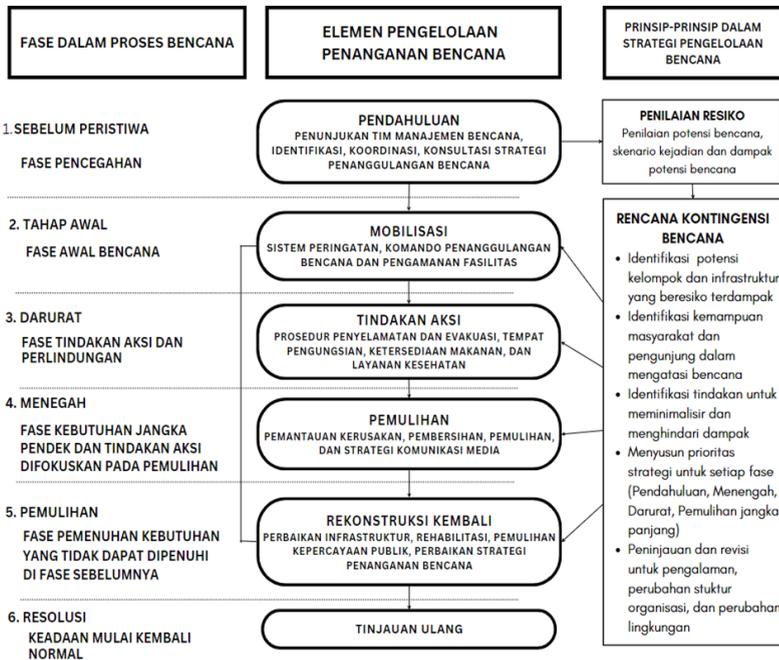
karena itu diperlukan badan organisasi atau komite penanganan bencana tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional. Akan sangat baik apabila setiap daya tarik wisata di tingkat regional memiliki komite pencegahan dan penanganan bencana tersendiri (Faulkner, 2001).

Pengembangan dan penyebaran informasi mengenai cara-cara mencegah dan bertahan hidup ketika terjadi bencana juga diperlukan. Hal ini termasuk mengajarkan keterampilan untuk mengurangi risiko bencana, seperti membimbing anak-anak untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana, mengajarkan cara mengukur dan mengurangi risiko bencana, dan mengajarkan cara untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari bencana (Chan et al., 2022).

Perlu juga untuk membangun jaringan pengamanan dan infrastruktur, termasuk pembangunan fasilitas evakuasi dan sarana komunikasi, serta meningkatkan kapasitas dan kesiapan masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi bencana. Sistem evakuasi juga perlu direncanakan dan dipetakan dengan baik. Pengelola destinasi wisata harus memastikan adanya personel darurat dan peralatan standar keamanan tersedia dalam jarak 20 km; pompa bensin dan unit pembangkit listrik darurat tersedia; hingga didirikannya hidran, titik air, otoritas perlindungan bencana, dan layanan bantuan medis (Weichselgartner, 2001).

Terakhir, diperlukan dukungan finansial dan teknis dari pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pengurangan bahaya bencana di seluruh Indonesia. Dukungan ini dapat berupa bantuan untuk membangun infrastruktur, memberikan bantuan keuangan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, dan meningkatkan kapasitas dan kesiapan masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi bencana.

Sama halnya dengan krisis, peristiwa bencana alam juga memiliki fase pemulihan. Fase ini termasuk perbaikan infrastruktur, penyuluhan korban bencana alam, hingga pengembalian kepercayaan public terhadap destinasi wisata. Pengembalian kepercayaan ini dapat dilakukan melalui komunikasi media masa hingga pemasaran. Destinasi wisata juga perlu memastikan bahwa tidak ada informasi keliru yang beredar mengenai bencana yang terjadi. Selain itu, komite penanganan bencana juga perlu mengevaluasi ulang pelaksanaan penanganan bencana untuk memperbaiki strategi pencegahan dan penanganan bencana di kemudian hari (Chan et al., 2022).



Gambar 31. Fase Penanganan Bencana di Destinasi Pariwisata

Sumber: Faulkner (2001)

6. Pilar Sumber Daya Alam

“Ketahanan destinasi pariwisata harus dipastikan dapat beorientasi pada *Sustainable Tourism Development* (Pengembangan Pariwisata yg Berkelanjutan)”

Pengembangan destinasi wisata, khususnya di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan ini pun juga menimbulkan beberapa isu kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan kegiatan pariwisata. Upaya-upaya pencegahan demi pelaksanaan pariwisata yang berkelanjutan

sustainable tourism) pun perlu digaungkan. Oleh karena itu, pada pilar sumber daya alam ini membahas mengenai 3 fokus yang akan mengukur sejauh mana kesiapan dan usaha yang dilakukan oleh destinasi pariwisata dalam melindungi dan mencegah kerusakan yang mungkin terjadi pada sumber daya alam di destinasi pariwisata.

a. Ekosistem Lingkungan

Ekosistem lingkungan merupakan sebuah jaringan yang berisikan komponen biotik maupun abiotik yang saling terhubung dan berinteraksi dengan satu sama lain. Ekosistem dapat dibedakan dari dimensi geografisnya, seperti gurun, gunung, lautan, atau geografis yang terisolasi, seperti danau atau sungai. Seluruh perhutanan dapat dikategorikan sebagai ekosistem, begitu juga sebuah kolam kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekosistem memiliki berbagai variasi ukuran. Dimensi dan sebaran suatu ekosistem dapat berbeda-beda, tergantung pada keberadaan dan dimensinya, ekosistem diklasifikasikan sebagai makro-ekosistem dan mikro-ekosistem.

Keseluruhan aktivitas pariwisata sendiri mulai dari keberangkatan pengunjung dari daerah asal hingga sampai ke daerah tujuan wisata sangat berpengaruh kepada ekosistem, baik dari faktor abiotik maupun biotik. Hubungan pariwisata dengan ekosistem dapat dikatakan kompleks. Pada

pengembangan pariwisata dapat menciptakan dampak negatif yang lambat laun dapat merusak ekosistem seperti penipisan sumber daya alam, polusi serta kerusakan fisik ekosistem. Di sisi lain, pariwisata memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif bagi ekosistem dengan berkontribusi kepada perlindungan dan konservasi lingkungan yang juga dapat meningkatkan kesadaran terhadap nilai yang terdapat dalam ekosistem (Sunlu, 2003).

Pembangunan pariwisata serta kegiatan wisata yang menyebabkan peningkatan konsumsi pada suatu destinasi wisata dapat menyebabkan penipisan sumber daya alam. Pada beberapa kasus, terjadi tekanan pada sumber daya alam yang disebabkan oleh kegiatan pariwisata di daerah yang sumber dayanya sudah langka. Penipisan sumber air, sumber daya lokal dan degradasi tanah dilihat sebagai pengaruh pembangunan dan kegiatan pariwisata terhadap ekosistem (Mkono & Hughes, 2020).

Meningkatnya pembangunan fasilitas pariwisata juga telah memberi dampak negatif pada lahan. Hutan adalah salah satu kawasan yang sering mengalami dampak negatif dari pariwisata berupa penggundulan hutan yang disebabkan oleh kayu bakar pengumpulan dan pembukaan lahan. Satwa liar sebagai penghuni hutan juga merasakan dampak dari pengembangan pariwisata. Kegiatan pariwisata pun juga

berkontribusi besar dalam pembiayaan konservasi di beberapa area lindung (UNEP, 2005). Namun, pada saat yang sama kegiatan pariwisata yang melampaui kapasitas atau perilaku pengunjung yang tidak dapat terkontrol berpotensi dapat mengancam keberlangsungan hidup dari satwa-satwa yang ada di destinasi pariwisata (Leung et al., 2018). Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi flora dan fauna di destinasi pariwisata khususnya di area yang dilindungi. Pada Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2010 telah mengatur tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Menurut peraturan tersebut, pengusahaan pariwisata hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kegiatan yang ada pun hanya terbatas pada mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya. Bahkan pada kawasan suaka margasatwa tidak diperkenankan untuk membangun sarana kepariwisataan.

Oleh karena itu, diperlukan penilaian dan pengukuran terhadap kondisi ekosistem lingkungan destinasi wisata. PBB sendiri telah membuat kerangka kerja statistik atau *System of Environmental Economic Account* (SEEA) untuk mengatur data tentang habitat dan bentang alam hingga

mengukur dan melacak perubahan yang terjadi pada ekosistem (United Nations, 2021). Penilaian dan pengukuran ini juga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana dampak kegiatan pariwisata terhadap kondisi lingkungan yang ada. Penilaian ini melihat ekosistem lingkungan sebagai sumber daya atau “stok produk” dari bisnis pariwisata. Sehingga perlu dilakukan inventarisasi mengenai kondisi awal ekosistem sekaligus pemantauan terhadap setiap perubahan yang disebabkan oleh kegiatan pariwisata. Melalui penilaian ini dapat diketahui berapa jumlah kerusakan yang telah terjadi akibat kegiatan pariwisata.

Pengelola destinasi wisata juga harus dapat memastikan tidak terdapat spesies hewan liar yang diperoleh, dikembangbiakkan atau ditawan, kecuali oleh pihak yang berwenang dengan perlengkapan dan kegiatan yang telah diatur dengan layak. Oleh karena itu, diperlukan juga pencatatan data terkait perubahan jumlah flora dan fauna. Pencatatan ini berguna untuk mengetahui apakah spesies tersebut bertambah dan berkurang secara alami, ataukah terdapat faktor lain yang mempengaruhinya. Data yang adapun dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan di kemudian hari.

UNWTO (2018) sendiri juga telah membuat *Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism*. Kerangka kerja tersebut telah merekomendasikan Langkah-langkah dalam mengukur keberlanjutan pariwisata di suatu destinasi mulai dari perhitungan spesies hewan langka, perhitungan penggunaan air dalam kegiatan wisata, hingga perhitungan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan wisata. Data-data yang dihasilkan melalui perhitungan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan demi keberlanjutan destinasi wisata.

Di samping banyaknya dampak buruk yang disumbang oleh industri pariwisata kepada ekosistem, pariwisata juga dapat berkontribusi untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Industri pariwisata dapat berkontribusi kepada konservasi lingkungan dengan kontribusi keuangan. Pariwisata dapat berkontribusi langsung pada konservasi kawasan dan habitat sensitif. Pendapatan dari biaya masuk dan sumber serupa dapat dialokasikan secara khusus untuk mendanai perlindungan dan pengelolaan kawasan sensitif lingkungan. Biaya khusus untuk pengoperasian taman atau kegiatan konservasi dapat dikumpulkan dari wisatawan atau operator tur (Iranlu, 2004; Larm et al., 2018).

Selain dari sisi materi, kontribusi pariwisata yang dapat dilakukan adalah peningkatan dalam pengelolaan dan

perencanaan. Pengelolaan lingkungan yang baik dari fasilitas pariwisata dan khususnya hotel dapat meningkatkan keuntungan bagi ekosistem. Namun hal ini memerlukan perencanaan yang matang untuk pengendalian pembangunan, berdasarkan analisis sumber daya lingkungan daerah terkait.

Oleh karena itu, konsep *ecotourism* atau ekowisata hadir sebagai jawaban akan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian (Wearing & Neil, 2009). Pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan lingkungan, konservasi dan pemulihan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Karena daya tariknya, situs-situs yang masih asli dan kawasan alami diidentifikasi sebagai sesuatu yang berharga dan kebutuhan untuk menjaga daya tarik tersebut tetap hidup dapat mengarah pada penciptaan taman nasional dan taman margasatwa. Wearing & Neil, (2009) juga telah merekomendasikan pengelolaan wisatawan atau *visitor management* dalam pelaksanaan kegiatan wisata di kawasan lindung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah:

- Pembatasan jumlah kunjungan. Pengendalian jumlah kegiatan wisata dan pergerakan pengunjung di dalam

kawasan lindung dapat membatasi dampak terhadap ekosistem dan membantu menjaga integritas dan vitalitas dari sebuah situs. Batasan tersebut juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap sumber daya. Batasan harus ditetapkan setelah analisis mendalam terhadap kapasitas maksimum pengunjung yang berkelanjutan.

- Perencanaan pencegahan. Pengelola juga harus memiliki perencanaan dalam mencegah adanya kerusakan lingkungan. Dengan merencanakan pengembangan pariwisata sejak dini, kesalahan yang bersifat merusak dapat dicegah sehingga dapat menghindari kerusakan bertahap aset lingkungan yang signifikan bagi pariwisata.
- Transportasi ramah lingkungan. Pemilihan transportasi yang ramah lingkungan pun juga penting. Penggunaan transportasi yang ramah lingkungan dapat membantu mobilitas pengunjung di dalam kawasan sekaligus melindungi area lindung dari kerusakan akibat polusi yang tidak ramah lingkungan.
- Arahan bagi pengunjung. Sebelum memasuki dan memulai kegiatan wisata, akan sangat baik apabila wisatawan diberikan arahan mengenai karakteristik

kawasan yang akan dikunjungi dan apa saja peraturan yang berlaku.

- Kerjasama dengan komunitas. Pengelola destinasi wisata perlu mengajak masyarakat lokal untuk dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan wisata.

Pariwisata juga memiliki potensi untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap lingkungan dan menyebarkan kesadaran akan masalah lingkungan dengan cara mendekatkan manusia dengan alam. Konfrontasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan nilai alam dan mengarah pada perilaku dan kegiatan sadar lingkungan untuk melestarikan lingkungan. Peningkatan kesadaran akan perlindungan lingkungan ini juga dapat disematkan dalam aktivitas wisata yang ditawarkan kepada wisatawan (Prasetyo & Ahmad, 2021; Türker et al., 2014). Aktivitas-aktivitas tersebut diantaranya namun tidak terbatas pada:

- *Soft Adventure*. Jenis kegiatan ini merupakan aktivitas petualangan yang tidak membutuhkan keahlian spesifik dan beresiko rendah. Contoh dari aktivitas wisata ini adalah *hiking* dan *snorkelling*.
- Budaya & Kuliner. Kegiatan wisata budaya dan kuliner dapat menjadi alternatif wisata yang dapat dikembangkan di area sekitar kawasan lindung.

Aktivitas ini dapat meningkatkan interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal melalui kelas kuliner, dan kegiatan kebudayaan lainnya.

- *Wildlife-watching*. Kehidupan liar dari flora dan fauna yang ada di kawasan lindung dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Edukasi mengenai spesies-spesies langka dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap spesies-spesies tersebut. Namun kegiatan ini harus tetap direncanakan dengan baik agar tidak mengganggu habitat hidup dari flora dan fauna tersebut.
- *History & Archeology*. Beberapa kawasan lindung mungkin saja menawarkan monument dan arsitektur bersejarah. Aset-aset tersebut juga dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata namun tidak dapat dijadikan sebagai aktivitas utama.
- *Birdwatching*. Di beberapa kawasan, terdapat beberapa spesies burung yang unik dan tentu saja menarik minat pecinta burung. Jenis aktivitas ini merupakan salah satu potensi aktivitas ekowisata yang dapat dikembangkan.
- *Beach related*. Dalam hal kegiatan wisata pesisir, pengelola harus dapat menghindari aktivitas wisata masal karena terdapat beberapa area pantai yang masuk ke dalam area lindung.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata dapat berkontribusi dalam pelaksanaan *Sustainable Development* melalui strategi perencanaan pengelolaan destinasi yang berwawasan lingkungan, penetapan aturan berperilaku bagi pengunjung hingga melakukan inventarisasi dan pemantauan habitat, lanskap, serta flora dan fauna yang ada di destinasi pariwisata. Langkah-langkah ini ditempuh agar kegiatan pariwisata dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan ekosistem lingkungan yang ada sekaligus memonitor kondisi dari ekosistem itu sendiri. Pemantauan kondisi ekosistem pun juga dapat berfungsi sebagai sistem peringatan apabila terjadi pengurangan kualitas dan kerusakan terhadap ekosistem lingkungan. Dengan pengelolaan aktivitas dan edukasi yang tepat, barulah kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi destinasi wisata sekaligus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

b. Gerakan yang Berwawasan Lingkungan

Green Actions atau Gerakan Berwawasan Lingkungan merupakan sebuah aksi yang mengajak setiap individu untuk mengaplikasikan gaya hidup hijau atau gaya hidup yang ramah lingkungan (*green lifestyle*). Berbeda dengan pengelolaan sumber daya lingkungan yang pada

umumnya dilakukan oleh pengelola destinasi wisata dan cenderung kompleks, gerakan ini lebih mengacu kepada aksi-aksi nyata yang dapat dilakukan oleh semua orang pada saat ini juga. *UN Sustainable Development Goals-13* pun juga mengangkat topik perubahan iklim dengan tajuk “*Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impacts.*” Gerakan ini mengajak semua orang untuk mengambil langkah darurat dalam melawan dampak dari perubahan iklim.

Terdapat beberapa rekomendasi aksi yang telah direkomendasikan oleh *Global Goals*, diantaranya adalah:

- Donasi (besar atau kecil) kepada instansi amal gerakan perubahan iklim
- Daur ulang kertas, gelas, plastik, logam dan alat elektronik lama
- Menjadikan sisa makanan menjadi bahan kompos yang dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus mendaur ulang nutrisi
- Memilih dan menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali seperti tas untuk berbelanja dan botol air minum.
- Membeli barang-barang yang ramah lingkungan (*Eco-Friendly*)
- Mengurangi konsumsi dengan berkomitmen sebagai vegan selama satu minggu sekali

- Mengurangi penggunaan dan menghindari pencetakan kertas dengan menggunakan alat-alat elektronik sebagai pengganti

Pasar pariwisata yang beragam dan kapasitas wisatawan yang berpengaruh secara sosial merupakan aset untuk dapat mempromosikan gerakan-gerakan tersebut. Penggunaan teknologi modern dan sosial akan sangat membantu pencapaian *Sustainable Development Goals* dengan mudah begitu orang menyadari dampak dari perubahan iklim. Sebuah unggahan edukasi yang dilakukan oleh wisatawan di media sosial dapat dengan efektif menciptakan kesadaran akan gaya hidup yang bertanggung jawab kepada khalayak masa yang lebih besar.

Di Indonesia sendiri telah dilakukan beberapa gerakan yang berwawasan lingkungan di destinasi wisata. Salah satu contohnya adalah Gerakan Bersih Pantai dan Laut yang dipelopori oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Gerakan ini mengajak para relawan untuk melaksanakan pembersihan pantai dan laut dari sampah secara serentak di sepanjang pesisir Indonesia dengan 74 titik lokasi aksi. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam menjaga sumber daya alam, dan membangun sinergitas serta kolaborasi antar pihak terkait (*stakeholders*).

Selain itu terdapat salah satu pulau wisata di Indonesia yang terbebas dari kendaraan bermotor, yakni Gili Trawangan yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pulau ini mengajak wisatawan untuk menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan dengan menerapkan larangan penggunaan kendaraan bermotor (Murdana, 2011). Wisatawan dapat berkeliling pulau dengan berjalan kaki atau menggunakan kereta kuda khas Lombok, yakni Cidomo.

Salah satu *resort* di Bali juga menerapkan konsep *Eco-friendly* yang dapat menginspirasi wisatawan untuk melaksanakan gaya hidup yang berwawasan lingkungan. *Resort* ini memiliki prinsip untuk melakukan intervensi lingkungan seminimal mungkin dan memastikan bahwa setiap flora dan fauna yang ada tidak terganggu. Arsitektur bangunan dari *resort* ini pun dibuat menyatu dengan alam dan memastikan tidak ada pohon yang ditebang pada saat pembangunan berlangsung. Selain itu, *resort* ini juga menghimbau para tamunya untuk mengurangi penggunaan plastik dan mempromosikan pendekatan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Konsep dari *resort* ini pun membuktikan bahwa kegiatan pariwisata dan kehidupan kita sehari-hari dapat berjalan berdampingan, tanpa merusak alam sekaligus memberikan manfaat bagi satu sama lain.

Pariwisata juga membutuhkan *green jobs* untuk menciptakan *green economy*. *Green jobs* atau pekerjaan

ramah lingkungan merupakan pekerjaan yang berkontribusi dalam melestarikan atau memulihkan lingkungan. *International Labor Organization (ILO)* mendefinisikan *green jobs* sebagai penciptaan lapangan pekerjaan yang layak secara ekonomi dan dapat mengurangi konsumsi energi dan bahan baku (dematerialize economy), mengurangi emisi gas rumah kaca (decarbonize economy), mengurangi limbah dan polusi, melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan (ILO, 2017). Di Indonesia sendiri proyek *green jobs* telah dilaksanakan sejak Agustus 2010. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan kapasitas konstituen ILO dan mitra nasional dalam meningkatkan koherensi kebijakan di tingkat nasional. Pekerjaan-pekerjaan yang termasuk ke dalam *green jobs* mencakup industri energi yang dapat diperbaharui (*renewable energy*), transportasi, industri dasar dan daur ulang, pertanian, dan kehutanan. Keberadaan *green jobs* ini pun juga dapat mendukung pelaksanaan *green actions* karena memungkinkan suatu individu untuk menjadikan pelestarian lingkungan sebagai pekerjaan formal.

c. Manajemen Energi, Air, dan Limbah

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dengan konsumsi sumber daya yang cukup besar mulai dari konsumsi sumber daya energi hingga air bersih. Sektor

pariwisata pun juga berkontribusi dalam produksi limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Hal ini pun mendatangkan berbagai macam dampak bagi lingkungan sekitar.

Industri perhotelan dan akomodasi merupakan salah satu sektor pariwisata yang cukup banyak mengkonsumsi energi listrik untuk keperluan operasional. Perjalanan wisatawan dari tempat asal menuju destinasi wisata yang cenderung bergantung pada transportasi udara dan transportasi pribadi pun juga meningkatkan konsumsi bahan bakar fosil dan berpotensi meningkatkan polusi udara. Selain itu konsumsi energi dalam jumlah besar tersebut dapat berdampak pada meningkatnya emisi karbon dan CO₂ (Margosi et al., 2022)..

Selain sumber daya energi, sektor pariwisata juga cukup banyak mengkonsumsi ketersediaan air bersih untuk keperluan rekreasi seperti kolam renang dan spa. Selain itu konsumsi air bersih juga digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti air minum, *laundry*, keperluan dapur, hingga sistem pendingin udara (Wuleka Kuuder et al., 2013). Konsumsi air dalam jumlah besar ini dapat menimbulkan masalah seperti kekurangan air terutama di destinasi wisata yang terletak di pulau kecil. Hal ini dikarenakan daratan yang dikelilingi oleh lautan membuat ketersediaan air bersih cukup sulit untuk didapatkan (IRENA, 2014). Konsumsi air

bersih itu pun mengarah kepada pembuangan air sisa konsumsi. Limbah air dari akomodasi pariwisata memiliki karakteristik yang mirip dengan limbah campuran rumah tangga, karena terdiri dari campuran berbagai bahan, termasuk bahan organik dan bahan berbahaya. Bahan berbahaya tersebut dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan ketika proses pembuangan. Air limbah yang dibuang langsung ke perairan dapat mencemari laut dan danau di sekitar destinasi dan berpotensi merusak ekosistem serta habitat flora dan fauna yang tinggal di perairan tersebut (Andini & Arida, 2019).

Limbah yang dihasilkan oleh sektor pariwisata juga cukup menjadi perhatian khusus. Sebanyak 35 juta ton limbah padat per tahun dihasilkan oleh industri pariwisata dalam skala global (Conservation International, 2003). Di daerah dengan konsentrasi kegiatan wisata yang tinggi pembuangan limbah adalah masalah serius dan pengelolaan yang tidak tepat dapat menjadi perusak utama lingkungan alam, sungai, daerah pemandangan, dan pinggir jalan. Wisatawan dapat menghasilkan sampah padat per kapita hingga dua kali lipat dibandingkan penduduk setempat (IFC, 2007). Misalnya, kapal pesiar di Karibia diperkirakan memproduksi lebih banyak lebih dari 70.000 ton sampah setiap tahunnya. Limbah padat dan pembuangan sampah sembarangan dapat menurunkan kualitas air dan garis pantai

serta menyebabkan kematian hewan laut (UNEP, 2007). Di daerah pegunungan, wisatawan yang melakukan kegiatan pendakian menghasilkan banyak sekali sampah. Pendaki meninggalkan sampah, tabung oksigen, dan bahkan peralatan berkemah.

Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengelolaan sumber daya dan limbah yang baik untuk meminimalisir dampak yang disebabkan oleh pelaksanaan pariwisata.

Berdasarkan pernyataan Menteri ESDM RI yang disampaikan pada forum “*Katadata Future Energy: Tech and Innovation 2021*”, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Sumber-sumber energi tersebut berasal dari arus laut, panas bumi, bioenergi, angin, air, hingga matahari. Potensi energi yang dapat dibarukan tersebut mencapai 417.8 GW. Namun hanya 2,5% dari total potensi tersebut yang telah dimanfaatkan. *International Renewable Energy Agency* atau IRENA telah merekomendasikan beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam memanfaatkan sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui khususnya bagi wisata kepulauan. Selain memanfaatkan *renewable energy*, teknologi yang direkomendasikan oleh IRENA (2014) juga memperhitungkan penghematan alokasi dana.

Teknologi-teknologi tersebut diantaranya:

- *Solar Water Heating (SWH)*. SWH merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan panas matahari untuk menghangatkan air rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan air panas seperti *jacuzzi* dan *hot shower*. Teknologi ini dapat menggantikan dan mengimbangi biaya penggunaan pemanas air yang umumnya menggunakan listrik elektrik atau gas.
- *Solar Air-Conditioning (SAC)*. Sistem SAC merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan energi termal atau panas bumi untuk keperluan pendingin atau pemanas ruangan. Teknologi ini pun dapat mengimbangi biaya penggunaan jasa pendingin atau pemanas di destinasi wisata kepulauan yang umumnya menggunakan listrik dan diesel.
- *Sea Water Air Conditioning System (SWAC)*. Sistem SWAC merupakan teknologi yang memanfaatkan air dingin dari kedalaman laut untuk menyediakan layanan *Air Conditioning* di kamar dan fasilitas hotel. Walaupun teknologi ini cenderung membutuhkan modal awal yang lebih besar dari sistem SAC, namun sistem ini lebih sepadan dan secara keseluruhan lebih ekonomis apabila suatu daya tarik wisata dekat dengan sumber daya perairan yang dalam dan memiliki permintaan akan sistem pendingin yang cukup tinggi.

- *Solar Photovoltaic systems. Solar PV* merupakan sistem kelistrikan yang terdiri dari panel-panel yang disinari cahaya matahari untuk menghasilkan listrik arus searah, yang kemudian diubah menjadi listrik arus bolak-balik melalui inverter. Sistem ini memungkinkan hotel untuk memenuhi kebutuhan listrik melalui pembangkit listrik di tempat dan mengurangi pembelian listrik dari pembangkit diesel.

Dalam hal pengelolaan limbah air, telah terdapat beberapa daya tarik dan destinasi wisata di Indonesia yang dapat menjadi percontohan. Salah satunya adalah kawasan *Waterbom Bali* dan Kawasan Nusa Dua. *Waterbom Bali* bekerja sama dengan *Bali Water Protection Program* sebagai salah satu donatur. Daya tarik wisata ini memanfaatkan tumbuhan sebagai partisi antar wahana. Sehingga, limpasan air dari wahana dapat menjadi konsumsi tersendiri bagi tumbuhan tersebut. Penghematan air dilakukan dengan menyaring air dengan pemasangan tap dengan laju aliran rendah yang diatur waktunya di seluruh area. Sehingga dapat menyiram tanaman pada waktu yang tepat, saat air tak mudah menguap (Lyons, 2015).

Kawasan Nusa Dua Bali pun juga telah menerapkan sistem pengelolaan air limbah terpadu yang disebut "*Lagoon*" dengan luas 30 hektar. Sistem

pengelolaan air limbah ini mampu menampung dan mengolah limbah sebanyak 4000-7000 m³/hari dan digunakan sebagai air irigasi sebanyak 1000-2000 m³/hari. Pencemaran lingkungan dari kegiatan pariwisata pun dapat ditekan karena tidak terjadi pembuangan limbah air langsung dari kawasan wisata dan perhotelan ke lingkungan sekitar. Limbah air yang dihasilkan oleh kawasan wisata dan perhotelan ditampung ke dalam *Lagoon*. Air irigasi yang dihasilkan oleh *Lagoon* pun dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman dan perawatan lainnya di sekitar kawasan (Andini & Arida, 2019).

Selain limbah air, sektor pariwisata juga berkontribusi sebagai penghasil limbah padat dan cair yang cukup besar. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terdapat peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah seperti UU No 18 Tahun tentang pengelolaan sampah, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari, hingga Pedoman Pengelolaan Sampah Wisata Alam di Kawasan Hutan oleh KLHK pada tahun 2019. Peraturan-peraturan tersebut telah menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh destinasi wisata agar dapat mengelola sampah dengan baik mulai dari: menyediakan sarana tempat sampah sesuai dengan jenis dan ukurannya, edukasi kepada wisatawan mengenai tanggung

jawab mereka terhadap sampah yang akan mereka hasilkan dan tata cara membuang sampah secara bijak, usaha mengurangi sampah di destinasi wisata, pencatatan dan pelaporan harian mengenai jumlah sampah yang dihasilkan berdasarkan jenisnya baik dalam bentuk padat maupun tidak padat, hingga sistem daur ulang atau *reuse, reduce, recycle* untuk sampah-sampah yang telah dikumpulkan. Terlebihnya, pengukuran mengenai waste management atau pengelolaan limbah di destinasi wisata dapat disesuaikan dengan keadaan di masing-masing destinasi pariwisata.

Praktik untuk efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah pada industri pariwisata pun juga dapat dilakukan melalui pengelola daur ulang sebagai berikut:

1. *Reduce* (meurangi): Menciptakan limbah sesedikit mungkin dengan tidak memproduksinya sejak awal, tidak memesan berlebihan, pilih produk dengan kemasan kecil atau kemasan yang dapat dikembalikan, menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali seperti *tumblr*.
2. *Reuse* (penggunaan kembali): Mempertimbangkan limbah barang tertentu agar dapat digunakan kembali, dijual, atau disumbangkan kepada orang lain yang dapat menggunakannya.

3. *Recycle* (daur ulang): Limbah yang ada harus dapat didaur ulang dengan baik agar dapat mengubah limbah sampah menjadi produk yang baru
4. *Recover* (Pemulihan): Ketika limbah sudah tidak dapat didaur ulang kembali, cari cara untuk memproduksi energi dari limbah sampah.
5. *Disposal* (Pembuangan): sampah/produk sisa dari proses recovery yang umumnya berupa abu atau material sisa lainnya dibawa ke TPA untuk diolah dan diproses agar tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan air yang efektif dapat membawa keuntungan bagi destinasi wisata sekaligus memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan sekitar. Selain itu, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa terdapat segmen pasar wisatawan yang mempertimbangkan komitmen dan kontribusi destinasi wisata terhadap lingkungan. Pengelolaan energi, air dan limbah ini pun juga perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap destinasi wisata yang berbeda.

7. Pilar Demografi

Pada pilar demografi ini terdapat 4 atribut yang akan mengukur kuantitas, kualitas, dan mobilisasi penduduk di destinasi pariwisata (Gunawan, 2005).

a. Populasi

Dalam pengembangan pariwisata, komposisi jumlah penduduk dapat berpengaruh dalam keberlangsungan kegiatan pariwisata itu sendiri. Tingkat kepadatan penduduk di suatu destinasi yang terlalu padat dapat berdampak pada tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial. Kondisi ini sangatlah tidak ideal bagi pengembangan destinasi pariwisata. Sebaliknya, jika kepadatan penduduk terlalu rendah juga dapat mengakibatkan kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pariwisata di destinasi.

Thomas Robert Malthus pada tahun 1798 berpendapat bahwa jumlah penduduk bila tidak dibatasi dapat menyebabkan perkembangan yang sangat pesat dan akibatnya memenuhi bagian permukaan bumi dengan cepat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan produktivitas bahan makanan (Lai & Cheung, 2016). Disisi lain manusia memerlukan bahan makanan untuk bisa hidup. Jika laju pertumbuhan penduduk tidak dikontrol, manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan yang berakibat timbulnya kemiskinan serta kemelaratan. Sama halnya dengan destinasi, jika tidak dikelola sesuai dengan batas yang telah ditentukan maka

destinasi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk lokalnya. Oleh sebab itu, maka diperlukan upaya untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, namun pengontrolan laju pertumbuhan penduduk justru menimbulkan persoalan baru dimana akan terjadi tingginya jumlah penduduk usia tua. Semakin banyak usia tua dalam sebuah populasi secara signifikan dapat merusak potensi pertumbuhan ekonomi (Shin & Choi, 2015).

Pertumbuhan populasi dan angkatan kerja menjadi faktor penting dalam ketahanan destinasi pariwisata. Jumlah tenaga kerja yang besar menyebabkan peningkatan jumlah produksi, sedangkan besarnya pertumbuhan penduduk mengartikan bahwa ukuran domestiknya lebih besar. Pada dasarnya pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif ataupun negatif bergantung pada kemampuan sistem perekonomian suatu wilayah dalam memanfaatkan tenaga kerja produktif. Dalam Studi yang lain ditemukan bahwa peningkatan usia dimana pekerja memasuki angkatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun untuk mewujudkan ini tentunya harus didorong pada tingkat kebijakan (Roa & et.al., 2011).

Tingkat kepadatan penduduk yang ideal sendiri berada pada angka 50-100 orang/Km². Namun, setiap daerah tentu saja memiliki kriterianya masing-masing. Contohnya

pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan ambang batas penduduk berdasarkan ketersediaan air. Perhitungan ambang batas penduduk dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar populasi penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan air permukaan lokal. Ketersediaan air wilayah DKI Jakarta diketahui mencapai 283.250.615 m³/tahun. Dari ketersediaan air tersebut, dilakukan perhitungan ambang batas penduduk melalui pendekatan kebutuhan air layak untuk penduduk. Baik untuk wilayah daratan dan kepulauan digunakan pendekatan asumsi yang sama sebagai metropolitan. Hal ini dikarenakan sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu berasal dari daratan utama DKI Jakarta sebagai penduduk metropolitan. Memperhatikan fakta tersebut, dapat diperkirakan bahwa gaya hidup dan budaya konsumsi terhadap air atau pangan sebagai penduduk metropolitan pun akan terbawa selama melakukan kegiatan wisata.

Hasil perhitungan menunjukkan ambang batas kemampuan ketersediaan air permukaan DKI Jakarta hanya mampu mendukung \pm 1.940.000 jiwa. Ambang batas penduduk untuk wilayah daratan adalah 1.921.582 jiwa, sementara untuk wilayah Kepulauan Seribu adalah 18.347 jiwa. kondisi jumlah penduduk tahun 2019 adalah 10.467.630 jiwa (menurut kajian Kajian D3TLH Provinsi DKI Jakarta 2019), perbandingan ambang batas dengan

populasi saat ini menunjukkan hanya sekitar 18,5% penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan air permukaan (berdasarkan data debit air wilayah DAS dari PU tahun 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di wilayah tersebut sudah sangat tinggi.

Tabel 1. Data Ambang Batas Jumlah Penduduk DKI Jakarta berdasarkan Ketersediaan Air

Wilayah Administrasi (Kota/Kabupaten)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Populasi Eksisting 2018 (jiwa)
Jakarta Timur	810.575	2.916.020
Jakarta Utara	515.119	1.797.290
Jakarta Selatan	283.342	2.246.140
Jakarta Pusat	156.641	924.690
Jakarta Barat	155.905	2.559.360
Kepulauan Seribu	18.347	24.130
TOTAL	1.939.929	10.467.630

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (2021)

Solusi yang dapat dilakukan adalah distribusi penduduk terutama pada area-area dengan beban kebutuhan air rendah. Di sisi lain, diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang agar distribusi penduduk tidak menyebabkan penurunan kinerja jasa lingkungan hidup secara signifikan. Bila tidak dilakukannya tindakan hal ini akan mempengaruhi kegiatan berwisata khususnya di Kepulauan Seribu. Luas

kepulauan yang kecil dan tingginya minat pariwisata di wilayah Kepulauan Seribu merupakan ancaman tersendiri bagi penduduk lokal. Oleh karena itu, Kepulauan Seribu hanya dioptimalkan untuk pemenuhan dasar kegiatan domestik. Kebutuhan air untuk lahan di wilayah Kepulauan Seribu dinyatakan tidak ada, sebagaimana mengikuti asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Lahan Kepulauan Seribu diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan ruang permukiman dan fasilitas kepariwisataan. Inilah yang mendasari perhitungan kebutuhan air untuk kedua hal tersebut diakomodir dalam kebutuhan air domestik. Alternatif perhitungan status daya dukung dan daya tampung Kepulauan Seribu dilakukan dengan cara tabular berdasarkan jumlah penduduk dan data debit wilayah DAS Kepulauan Seribu. Kelemahan cara tabular tidak dapat menampilkan sebaran wilayah yang diindikasikan daya dukung airnya terlampaui.

Selain jumlah penduduk secara umum, komposisi jumlah penduduk berdasarkan usia juga memiliki pengaruh. Apakah penduduk dengan usia kerja atau produktif mendominasi total jumlah penduduk secara keseluruhan? Ataukah penduduk dengan usia non-produktif lebih mendominasi total penduduk di destinasi? Oleh karena itu, pengukuran populasi penduduk di suatu destinasi perlu

dilakukan untuk mengetahui kesiapan destinasi dalam menyediakan sumber daya manusia bagi kegiatan pariwisata.

b. Tingkat Migrasi

Pengukuran tingkat migrasi di destinasi pariwisata dilihat dari berapa banyak masyarakat yang melakukan perpindahan keluar destinasi maupun menuju destinasi wisata. Perpindahan penduduk atau migrasi dapat membawa pengaruh yang positif dan negatif bagi destinasi pariwisata. Migrasi akan menjadi negatif atau tidak baik bagi destinasi wisata apabila tingkat perpindahan penduduk tidak proporsional. Maksud tidak proporsional di sini adalah ketika perpindahan penduduk yang keluar dari destinasi sangat tinggi dan mengakibatkan berkurangnya jumlah sumber daya manusia bagi pengembangan pariwisata di destinasi tersebut. Hal ini umum terjadi pada destinasi pariwisata yang berada di pedesaan atau wilayah terpencil. Terdapat beberapa faktor dari fenomena ini. Pertama, kondisi perekonomian yang rendah membuat penduduk di daerah tersebut melakukan migrasi untuk pemenuhan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, minimnya pilihan lapangan pekerjaan di daerah pedesaan membuat generasi muda cenderung mencari pekerjaan di perkotaan dengan lapangan kerja yang lebih bervariasi (Todaro & Smith, 2013). Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mengalami pengurangan penduduk

paling besar akibat migrasi, yakni 5,8 juta penduduk (BPS, 2020). Menurunnya jumlah penduduk ini dapat berpotensi dalam berkurangnya modal sosial, atau jumlah tenaga kerja dan mengurangi produktivitas suatu daerah.

Migrasi juga dapat menjadi tidak proporsional apabila perpindahan penduduk yang masuk ke suatu destinasi sangat tinggi dan mengakibatkan kepadatan penduduk di suatu destinasi pariwisata. Selain itu, tingginya tingkat migrasi masuk ke suatu daerah yang tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan pekerjaan juga dapat mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran di daerah tersebut (Todaro & Smith, 2013). Menurut hasil survei sosial ekonomi nasional 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan presentase penduduk migran seumur hidup tertinggi di Indonesia, yakni 46.4% yang berarti hampir dari setengah populasi penduduk di Kepulauan Riau lahir di luar provinsi ini. Hal ini juga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Kepulauan Riau, yakni 9,91% pada Agustus 2021 dan 8,23% pada Agustus 2022. Angka tersebut lebih tinggi dari Tingkat Pengangguran Nasional yang berada pada angka 6,49% di 2021 dan 5,86% di 2022. Bahkan tingkat pengangguran di DKI Jakarta masih lebih rendah dari Kepulauan Riau, yakni 8,50% pada Agustus 2021 dan 7,18% pada Agustus 2022 (BPS, 2020). Sebuah

penelitian oleh Kurniawan & Syafitri (2018) telah mempelajari apa saja faktor yang mempengaruhi status penduduk migran yang menganggur di Kepulauan Riau. Berdasarkan penelitian tersebut, pengalaman lama kerja, pendidikan, dan jenis kelamin merupakan variabel-variabel yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap status pengangguran migran di Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan industri cenderung melihat pengalaman lama kerja sebagai tolak ukur dari kompetensi seorang pekerja. Sedangkan untuk faktor Pendidikan, lapangan pekerjaan di Kepulauan Riau cenderung menerima pekerja dengan pendidikan yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan semakin tinggi tingkat edukasi seseorang, akan semakin besar kemungkinannya untuk menjadi pengangguran.

Namun, migrasi atau perpindahan penduduk juga dapat memberikan dampak yang positif dengan proporsi yang tepat. Perpindahan penduduk usia produktif ke suatu daerah dapat membantu pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah. Hal ini akan sangat membantu daerah-daerah yang cenderung memiliki tingkat populasi penduduk yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program transmigrasi sebagai upaya dalam mengatasi tidak meratanya proporsi kepadatan penduduk di Indonesia. Pada mulanya, program ini dibuat

untuk mengatasi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Sehingga, para pekerja dari pulau Jawa di kirim ke pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi untuk mengelola sumber daya yang terdapat di pulau-pulau tersebut. Walaupun program ini menerima banyak kritik dari daerah-daerah tujuan transmigrasi, pada dasarnya konsep dan tujuan dari program ini memiliki manfaat bagi ketahanan daerah maupun nasional. Manfaat tersebut diantaranya adalah mendukung ketahanan dan penyediaan pangan, mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah di Indonesia, hingga solusi bagi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu, migrasi sendiri juga memiliki pengaruh lain terhadap penyelenggaraan pariwisata. Penduduk yang melakukan perpindahan dan tinggal di luar tempat mereka lahir dapat mengundang kerabat dari kampung halaman mereka untuk datang berkunjung. Menurut survei yang dilakukan oleh UNWTO (2015) pada tahun 2014, sekitar seperempat dari perjalanan internasional adalah untuk mengunjungi teman dan kerabat. Griffin (2013) berpendapat bahwa keputusan wisatawan untuk mengunjungi teman dan kerabat merupakan pendorong dasar bagi sebagian besar pariwisata global. Munoz et al. (2017) menyatakan bahwa manfaat ekonomi yang tercermin dari mengunjungi teman dan kerabat mempengaruhi perkembangan sosial dan

budaya. Jenis wisatawan ini biasanya meluangkan waktu untuk pergi ke festival, mengunjungi atraksi wisata, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu secara tidak langsung meningkatkan kualitas hidup warga sekitar dan membuat lokalitas lebih menarik dan otentik.

Pengalaman imigran dengan perjalanan intra-regional penting ketika menjadi tuan rumah dari wisatawan dengan motif perjalanan *Visiting Friends/Relatives* (VFR) atau mengunjungi teman/kerabat (Griffin & Dimanche, 2017). McLeod & Busser (2014), serta Duval (2004), menyarankan bahwa perjalanan VFR harus dianggap sebagai bentuk pariwisata yang sama sekali berbeda. Bagi Williams & Hall (2000) perjalanan VFR merupakan perpanjangan dari migrasi dan pariwisata, sedangkan bagi M. Hall & Müller (2018) fenomena rumah kedua yang menghubungkan pariwisata dan migrasi menunjukkan bahwa kedua fenomena tersebut menjadi tumpang tindih. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana migrasi dapat menyebabkan kepadatan di suatu daerah. Kepadatan ini juga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dari wisatawan dan masyarakat akibat laju pertumbuhan penduduk yang berlebihan.

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, migrasi dapat mendatangkan manfaat positif bagi destinasi wisata. Namun laju perpindahan penduduk yang tidak terkontrol

atau tidak proporsional dapat menimbulkan masalah-masalah baru di destinasi atau daerah tujuan migrasi. Oleh karena itu analisis tingkat migrasi di destinasi wisata perlu dilakukan agar strategi pengembangan destinasi wisata dapat dilakukan secara tepat.

c. **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan merupakan atribut yang sangat penting dalam demografi pariwisata. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dapat membantu meningkatkan literasi dan keterampilan teknis. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, keahlian dan kinerja yang dibutuhkan khususnya dalam bidang pariwisata.

Nelson Mandela dalam sidang UNESCO, 2005 menyatakan bahwa *“Education is the most powerful weapon to improve people quality of life”*. Dari pernyataan ini dapat ditarik asumsi bahwa kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan.

Menurut beberapa penelitian, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pengembangan destinasi pariwisata. Sumber

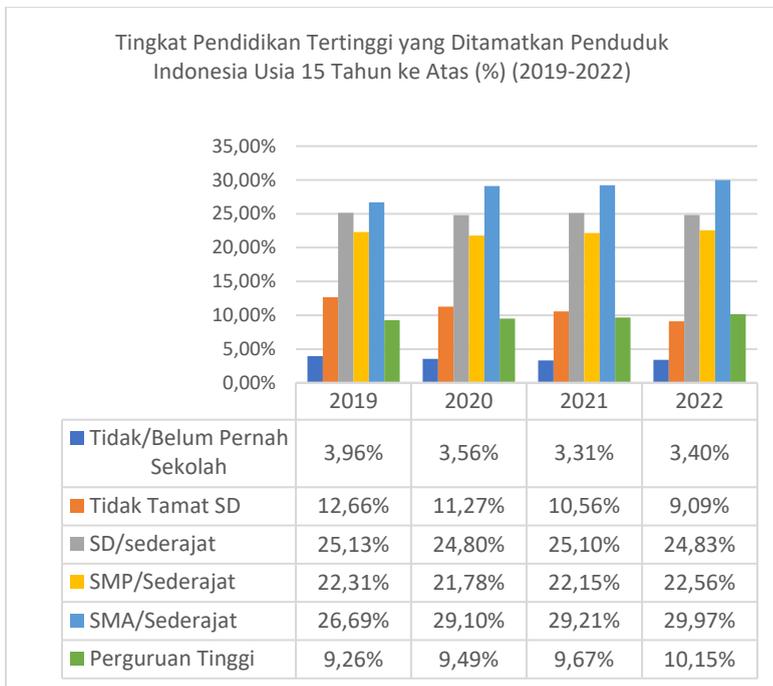
daya manusia yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kualitas layanan, produktivitas, hingga efisiensi pelaksanaan kegiatan pariwisata (Sanchez-Canizares et al., 2011). Hal ini juga dapat membantu mengurangi potensi terjadinya kerugian akibat masalah operasional atau *human error*.

Kualitas pelayanan sendiri juga merupakan salah satu kunci dari daya saing suatu destinasi wisata (Sutono, 2016). Terlihat dari bagaimana Sumber Daya Manusia secara spesifik menjadi salah satu sub pilar dalam *Travel & Tourism Development Index framework* yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF). Pilar sumber daya manusia dalam indeks tersebut memiliki 9 indikator yang salah satu diantaranya adalah rata-rata lama sekolah yang diterima oleh penduduk dengan umur di atas 25 tahun.

Evaluasi mengenai tingkat pendidikan yang didapatkan seseorang di suatu destinasi wisata telah menjadi indikator bagi beberapa penelitian maupun penilaian dalam mengukur kualitas tenaga kerja yang ada. Selain itu, mayoritas perusahaan hotel dan akomodasi cenderung mencari pekerja dengan kualifikasi pendidikan formal khususnya di bidang hospitaliti dan pariwisata (Sanchez-Canizares et al., 2011). Oleh karena itu, pengukurun tingkat pendidikan masyarakat di suatu destinasi pariwisata perlu

dilakukan untuk melihat kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata.

Menurut Badan Pusat Statistik sendiri tingkat rata-rata lama sekolah penduduk dengan umur 15 tahun ke atas berada pada angka 9,08 tahun. Bagi penduduk diatas 15 tahun yang telah berhasil menyelesaikan jenjang Perguruan Tinggi pun juga tergolong sangat rendah, yakni 10,15% dari total penduduk di atas 15 tahun.



Gambar 32. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Indonesia Usia 15 Tahun ke Atas (%) (2019-2022)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019-2022)

Namun, tingkat pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia cenderung tidak merata. Masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung menerima pendidikan yang lebih rendah dibanding masyarakat yang tinggal di perkotaan. Padahal banyak destinasi wisata di Indonesia yang berada di daerah pedesaan. Hal ini pun berpotensi dapat menjadi masalah bagi pengembangan pariwisata di daerah.

Di Indonesia sendiri jumlah penduduk dengan latar belakang pendidikan tinggi pariwisata masih tergolong sedikit. Bahkan perguruan tinggi dengan bidang pariwisata juga belum tersebar secara merata di Indonesia. Padahal ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui proses belajar di perguruan tinggi pariwisata dapat digunakan untuk membangun sistem pengelolaan pariwisata secara terpadu, mendorong inovasi serta memperbaiki praktek-praktek di dunia industri pariwisata di era globalisasi (Sutono, 2016).

Pendidikan pariwisata sendiri pada umumnya dilakukan melalui pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang dapat menunjang penguasaan keahlian terapan yang lebih spesifik (Sutono, 2020). Keberadaan lembaga pendidikan tinggi pariwisata bermutu memiliki posisi yang sangat strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Pendidikan Tinggi

pariwisata akan menghasilkan 1) *Educated and Knowledgeable People* yang sesuai dengan kebutuhan dunia pariwisata, 2) mampu menghasilkan dan melakukan *qualified* dan *applied research* sehingga bermanfaat langsung dalam kehidupan masyarakat, 3) menghasilkan pemimpin yang berkarakter, *valued leaders*. Setidaknya ketiga hal tersebut diyakini akan mampu menghasilkan *Wealth and Growth* suatu negara baik langsung maupun tidak langsung melalui pengembangan industri pariwisata berdaya saing tinggi berkelanjutan (Sutono, 2016).

Peningkatan kekuatan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata yang didukung oleh kemampuan profesionalisme SDM bidang kepariwisataan juga akan berdampak kepada penciptaan ketahanan nasional. Melalui kualitas kurikulum pendidikan pariwisata yang baik akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten, tangguh, dan berdaya saing.

8. Pilar Geografi

“Kondisi geografis disetiap daerah harus selalu dimaknai sebagai modal kuat dalam pengembangan Ketahanan Destinasi Pariwisata”

Keberagaman kondisi geografis di Indonesia merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi pelaksanaan pariwisata

nasional. Dengan keberagaman ini, memungkinkan Indonesia sebagai destinasi pariwisata memiliki variasi atraksi wisata yang beraneka macam. Walaupun demikian, keberagaman tersebut juga memiliki arti bahwa pengembangan pariwisata harus dapat disesuaikan dengan karakteristik geografis setiap daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pilar geografi ini akan mengukur sejauh mana destinasi pariwisata dapat merencanakan, mengembangkan, dan mengelola kawasan pariwisata guna mencegah, memprediksi, dan menanggulangi kemungkinan adanya kerusakan dikemudian hari dari sisi geografis (Liayong Pratama & Maryati, 2021).

a. Spasial Pariwisata

Terdapat beberapa pertimbangan pada saat mengukur analisis keruangan di destinasi pariwisata, diantaranya adalah apakah terdapat strategi pengelolaan tata ruang pariwisata yang telah direncanakan dengan baik dan menyeluruh? Apakah strategi tersebut telah mempertimbangkan prinsip *Sustainable Tourism Development (Planet, People, Prosperity)*? Bagaimana dengan kesesuaian antara strategi pengelolaan yang ada dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku? Yang terpenting, apakah strategi tersebut telah terealisasikan dengan baik? Ataukah hanya menjadi arsip belaka?

Analisis keruangan pariwisata mengukur bagaimana strategi pengelolaan kawasan pariwisata dapat mengintegrasikan tata ruang pariwisata dengan lingkungan yang berbasis *Sustainable Tourism Development (Planet, People, Prosperity)*. Dengan kata lain, strategi ini berusaha untuk menyelaraskan pengembangan tata ruang pariwisata dengan keadaan lingkungan yang ada sekaligus mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat lokal. Tujuan akhirnya tentu saja pelaksanaan pariwisata yang berkelanjutan. Mengapa demikian? Karena pengembangan kawasan pariwisata yang tidak direncanakan dengan baik atau tidak sesuai aturan dapat menimbulkan beberapa masalah dikemudian hari. Beberapa contoh dari masalah tersebut adalah pembangunan yang tidak merata, penggusuran atau pembongkaran akibat penyalahgunaan tata ruang, perusakan aset peninggalan budaya maupun alam, dan masih banyak lagi (Arjana, 2015; Gunasekara, 2008). Dalam penelitian mengenai pengembangan wisata yang tidak terencana di Serbia juga menunjukkan bahwa pembangunan konstruksi wisata yang ilegal di suatu area lindung dapat mengakibatkan tidak hanya gangguan terhadap habitat yang ada, tetapi juga pencabutan status kawasan lindung dari area tersebut (Vesić, 2017). Oleh karena itu pengukuran atribut ini sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana destinasi pariwisata dapat merencanakan pengembangan tata ruang

pariwisata yang bebas masalah dan kerusakan yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Salah satu strategi pengembangan tata ruang pariwisata adalah zonasi spasial yang merupakan dasar dari arah pengembangan destinasi pariwisata dan memiliki banyak sekali manfaat. Umumnya, zonasi kawasan diberlakukan pada kawasan-kawasan yang dilindungi. Peraturan yang ada kerap mengatur area mana saja yang dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, hingga bagaimana wisatawan dapat mengakses tempat tersebut (Williams, 2009).

Indonesia sendiri memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang zonasi tersebut. Salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana wilayah-wilayah yang berada dalam kawasan konservasi dapat dimanfaatkan, termasuk juga dalam konteks pariwisata. Dalam peraturan tersebut, kegiatan pariwisata dapat dilakukan di zona pemanfaatan karena wilayah tersebut memiliki aksesibilitas yang mampu mendukung kegiatan pemanfaatan dan memungkinkan

dibangunnya sarana prasarana untuk menunjang pemanfaatan dan pengelolaan.

b. Ekologi Pariwisata

Perbedaan analisis spasial dan analisis ekologi pariwisata adalah, disaat analisis spasial mengukur konteks keruangan dan kewilayahan dari pariwisata, analisis ekologi pariwisata lebih mengukur kepada daya dukung atau kapasitas dari sumber daya pariwisata tersebut. Ekologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Hubungan ini bersifat interdependensi atau saling ketergantungan karena manusia dan lingkungan sama-sama saling membutuhkan dan memiliki manfaat atau dampak bagi satu sama lain (Darsoprajitno, 2021). Pariwisata sendiri sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagai daya tarik. Terdapat banyak kenampakan alam seperti gunung, sungai, laut, dan kenampakan alam lainnya yang dijadikan sebagai daya tarik utama di beberapa destinasi wisata. Namun, hubungan pemanfaatan ini bukan tidak ada batasnya. Setiap sumber daya pasti memiliki batas pemanfaatan tertentu. Bahkan sumber daya tersebut juga memiliki resiko kerusakan.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Anindhito et al. (2022) mengenai analisis kawasan pariwisata rawan

bencana di Semarang, menunjukkan bahwa dari total 42 objek wisata yang diteliti, 5 diantaranya berada pada kawasan dengan potensi bencana longsor yang tinggi. Selanjutnya, penelitian oleh Nahak et al., (2019) di Kawasan Wisata Pesisir Teluk Kupang juga menunjukkan adanya kerusakan lingkungan di area pesisir akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan Analisis Ekologi Pariwisata untuk mengukur hubungan dan kapasitas daya dukung dari fungsi dan kualitas sumber daya pariwisata yang dapat dimanfaatkan (Bahar & Tambaru, 2011). Tidak hanya itu, sosial budaya dan komunitas masyarakat juga memiliki kapasitasnya sendiri. Kegiatan pariwisata yang terlalu berlebihan dapat mengakibatkan kepadatan dan gangguan terhadap tatanan hidup masyarakat setempat (Darsoprajitno, 2021). Penelitian yang telah dilakukan di Borobudur juga menunjukkan terdapatnya *overcrowd* atau *overtourism* yang dapat menyebabkan beberapa masalah seperti meningkatnya tingkat kemacetan lalu lintas, timbulnya parkir ilegal, hingga kebisingan yang dapat berpengaruh buruk terhadap struktur bangunan Borobudur dan berpotensi mengganggu masyarakat (Sutono, Rachmat, et al., 2021).

Pengukuran daya dukung dapat berguna untuk menghindari dampak negatif yang telah disebutkan sebelumnya dan memaksimalkan manfaat yang dapat diterima masyarakat. Bahar & Tambaru (2011) sendiri telah

melakukan analisis daya dukung wisata bahari di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian tersebut telah menghasilkan perhitungan berapa jumlah wisatawan yang dapat diterima oleh masing-masing pantai yang menjadi objek dari penelitian tersebut. Penelitian oleh (Hidayatullah et al., 2021) juga telah menghasilkan nilai Daya Dukung Kawasan Pesisir yang berisi tidak hanya batas jumlah pengunjung yang dapat diterima setiap harinya, tetapi juga luas area yang dapat digunakan hingga waktu maksimal yang dapat disediakan untuk kegiatan wisata per harinya.

Data-data mengenai potensi rawan bencana dan daya dukung dari suatu kawasan ini sangat penting untuk dimiliki oleh destinasi wisata. Data-data tersebut dapat dijadikan landasan dalam melakukan konservasi lingkungan alam maupun budaya. Pengelola juga dapat menghasilkan strategi pengelolaan yang dapat meminimalisir adanya kerusakan dan menghindari terjadinya bencana, sekaligus mendatangkan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat sekitar. Data-data yang ada juga dapat dijadikan landasan dalam merumuskan perencanaan mitigasi bencana yang nantinya akan dibahas pada fokus pertahanan dan keamanan.

Dalam konteks kebijakan, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 juga telah mengatur tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada umumnya, setiap daerah memiliki Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini dapat menjadi referensi bagi pengelola destinasi wisata dalam melakukan analisis ekologi pariwisata.

Dalam konteks penggunaan lahan, *Statistical Framework to Measure The Sustainability of Tourism (SF-MST)* menyarankan penggunaan peta sebagai alat ukur dan analisis dari perubahan komposisi penggunaan lahan yang mungkin terjadi akibat kegiatan pariwisata. Dalam perencanaan penggunaan lahan, destinasi pariwisata harus mempertimbangkan peraturan yang berlaku terkait perencanaan tata ruang seperti UU No 26 Tahun 2007, PP No 26 Tahun 2008, hingga PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang. Pada umumnya setiap daerah telah memiliki perencanaan tata ruang yang telah diklasifikasikan ke dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan tersebut. Sehingga, pertanyaan dalam atribut ini adalah, bagaimana kesesuaian antara penggunaan lahan untuk pariwisata dengan peraturan tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya? Apakah suatu tempat rekreasi sudah dibangun di atas lahan yang aman, baik secara bencana maupun administrasi?

Penelitian oleh Arifia et al., (2022) menjelaskan tentang bagaimana tingkat sebaran dan kesesuaian lahan yang digunakan untuk wisata alam di Kec. Rancabali, Kab. Bandung berdasarkan faktor fisik lingkungan seperti kemiringan lereng, fungsi lahan, jenis tanah, hingga jenis batuan. Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan lima kelas kesesuaian kawasan wisata. Sebanyak 43% dari total luas wilayah diklasifikasikan ke dalam kelas cukup sesuai dan dipresentasikan dengan warna kuning. Namun, masih terdapat beberapa daya tarik wisata yang masuk ke dalam kelas zona tidak sesuai. Selanjutnya, dalam penelitian oleh (Sutantri & Wijaya, 2021) menunjukkan adanya penurunan luas area persawahan setiap meningkatnya satu unit daya tarik atau sarana dan prasarana pariwisata di Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali.

Permen Agraria/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang juga telah mengatur dokumen perizinan berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Dokumen ini diperlukan untuk melihat apakah pemanfaatan ruang yang sedang direncanakan untuk kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang yang berlaku.

Dapat disimpulkan dalam mengukur ketahanan ekologi dari suatu destinasi wisata dapat ditempuh dengan

melihat kesesuaian antara daya dukung lingkungan serta rencana pemanfaatan ruang dengan keadaan aktual di lapangan.

BAB IV

NILAI MANFAAT PARIWISATA

Pada dasarnya, tujuan akhir dari pengukuran ketahanan destinasi pariwisata adalah untuk melihat bagaimana destinasi pariwisata dapat bertahan, apa yang membuat suatu destinasi kuat dan dapat menghadapi berbagai keadaan serta rintangan. Semua itu tentu saja akan bermuara pada nilai manfaat pariwisata yang akan dirasakan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga lingkungan, sosial, budaya dan pengetahuan.



Gambar 33. Nilai Manfaat Pariwisata

Sumber: Sutono (2022)

1. Nilai Manfaat Ekonomi

Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana ekonomi inklusif berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan, pengurangan ketidaksetaraan hingga memberantas kemiskinan. Pariwisata sendiri pada dasarnya merupakan sebuah jawaban terhadap pelaksanaan ekonomi inklusif. Berdasarkan pilar ekonomi yang telah dibahas sebelumnya juga telah disebutkan bagaimana peran pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, hingga menarik investor. Sektor pariwisata sendiri telah terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan di beberapa negara ASEAN, di mana semakin tinggi peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata, semakin menurun pula tingkat kemiskinan yang terdapat di negara tersebut (Zainuri et al., 2021).

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut dapat berhasil ketika kegiatan pariwisata menjadi inklusif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal. Di Indonesia sendiri hal tersebut seharusnya cukup mudah dilakukan karena banyak daya tarik wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal, sehingga keuntungan dari kegiatan pariwisata di daya tarik tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Konsep desa wisata yang sedang marak digaungkan di berbagai daerah di Indonesia pun juga membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk

dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki menjadi daya tarik wisata. Masyarakat dapat menerima keuntungan langsung dari penjualan *homestay*, rumah makan lokal, aktivitas wisata hingga *souvenir*. Telah banyak pula penelitian yang menyebutkan dampak positif dari pengeluaran wisatawan terhadap perekonomian lokal (Narasoma, 2021; Setiani et al., 2011).

Sekretaris Jenderal UNWTO, Zurab Pololikashvili pun juga menyatakan, “*Tourism is well placed to drive rural development, to ensure a more sustainable future to the benefit of all, leaving no one behind.*” Pernyataan tersebut berarti bahwa pariwisata dapat menjadi penggerak pembangunan desa yang inklusif dan memastikan masa depan yang berkelanjutan serta tidak ada masyarakat yang tertinggal.

Mengingat industri pariwisata merupakan industri yang padat modal, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menarik dan membuka peluang investasi di daerahnya dalam bentuk investasi swasta, investasi publik, hingga promosi produk wisata. Investasi-investasi tersebut nantinya dapat meningkatkan produktivitas di suatu daerah hingga meningkatkan daya saing destinasi pariwisata (Putra et al., 2017).

Melalui pelaksanaannya yang multisektoral, pariwisata juga dapat membuka peluang tidak hanya di sektor pariwisata saja,

tetapi juga di sektor lain. Bisnis pariwisata merupakan sebuah bisnis yang memerlukan sumber daya dan bahan baku dari berbagai macam sumber untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan pengunjung. Contohnya adalah kebutuhan bahan pangan untuk setiap kuliner yang dikonsumsi oleh wisatawan, kebutuhan bahan linen untuk kamar hotel, dan bahan baku lainnya yang digunakan untuk keperluan kegiatan wisata. Selain itu, terdapat juga dampak lanjutan dari pengeluaran sehari-hari yang dilakukan oleh pekerja lokal di sektor pariwisata. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola dan pekerja di destinasi maupun daya tarik wisata ini pun akan menyebabkan *multiplier effect* atau efek berganda.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga berpengaruh besar terhadap peningkatan devisa negara. Hal ini sangat jelas terlihat dari penukaran mata uang asing yang dilakukan oleh wisatawan. Namun, negara sebagai destinasi pariwisata harus memastikan bahwa tingkat kunjungan yang tinggi juga diikuti dengan pengeluaran atau *spending* yang tinggi pula. Jangan sampai, wisatawan yang datang hanya singgah dan tidak memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi destinasi. Rencana Strategis Pariwisata Nasional 2020-2024 sendiri pada dasarnya telah menerapkan kebijakan peningkatan kualitas destinasi pariwisata guna meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat Internasional. Peningkatan kualitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengeluaran

wisatawan khususnya pengeluaran wisatawan mancanegara (Zirulia, 2011).

Namun tidak sedikit pula penelitian yang menyebutkan bahwa manfaat atau pendapatan yang diterima oleh masyarakat lokal dari kegiatan pariwisata masih tergolong rendah (Putra et al., 2017). Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia yang dapat mengelola daya tarik wisata dengan baik. Hal ini menyebabkan beberapa hal seperti menurunnya kualitas pelayanan dan pengalaman bagi wisatawan, hingga *economic leakage* atau kebocoran ekonomi. Kebocoran ekonomi ini dapat terjadi ketika pengelolaan kegiatan pariwisata dilakukan oleh orang lain (*outsiders*) sehingga keuntungan dari kegiatan pariwisata tidak dapat dirasakan oleh masyarakat lokal secara maksimal. Selain *economic leakage*, rendahnya kualitas sumber daya manusia juga dapat menyebabkan masyarakat lokal kalah saing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah (Putra et al., 2017). *Enclave tourism* atau kebobolan pariwisata juga dapat menjadi penyebab rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat lokal walaupun tingkat kunjungan tergolong tinggi. Hal ini dapat terjadi karena wisatawan yang datang berkunjung cenderung hanya singgah dan tidak melakukan transaksi atau mengeluarkan uang di daerah tersebut.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan maupun produk wisata pun perlu memperhatikan beberapa aspek seperti kebijakan pariwisata, sumber daya alam & budaya, infrastruktur pariwisata, hingga lingkungan. Mengingat dunia sedang berada pada masa pemulihan pasca COVID-19, aspek-aspek lain seperti keamanan, keselamatan, dan sanitasi juga menjadi penentu dalam peningkatan daya saing destinasi pariwisata. Selain itu, tingkat edukasi atau pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas pelayanan di destinasi pariwisata (Sanchez-Canizares et al., 2011). Hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga dapat menjaga stabilitas destinasi hingga meningkatkan investasi di sektor pariwisata. Sehingga untuk mencapai nilai manfaat ekonomi yang maksimal, sangat penting bagi destinasi wisata untuk memperhatikan segala aspek dari ketahanan pariwisata yang telah dipaparkan sebelumnya.

2. Nilai Manfaat Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak terbesar dari penyelenggaraan pariwisata adalah dampak lingkungan. Di beberapa daya tarik wisata, pengelolaan aktivitas wisata yang tidak bertanggung jawab cenderung merusak lingkungan. Namun, terlepas dari berbagai dampak negatif yang mungkin saja dan bahkan telah terjadi dari penyelenggaraan pariwisata, penyelenggaraan pariwisata yang bertanggung jawab dapat

mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi lingkungan. Beberapa contoh dampak positif dari penyelenggaraan pariwisata yang berkelanjutan atau *sustainable* adalah meningkatnya kesadaran masyarakat umum akan pelestarian lingkungan hingga perbaikan sistem konservasi melalui pembiayaan yang didapatkan dari keuntungan pariwisata.

Salah satu bentuk wisata yang sangat rawan terhadap kerusakan lingkungan adalah wisata bawah laut. Jenis wisata ini berpotensi merusak ekosistem terumbu karang. Jumlah pengunjung yang terlalu banyak juga dapat mengganggu biota laut lainnya. Namun, salah satu ekowisata di Banyuwangi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pariwisata dapat menyelamatkan ekosistem terumbu karang yang terancam punah.

Pantai Bangsring yang terletak di Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah objek wisata bahari dengan beberapa permasalahan lingkungan di masa lalu. Sejak tahun 1970, para nelayan kerap menangkap ikan menggunakan bom dan racun *potassium sianida* yang menyebabkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem bawah laut di perairan Pantai Bangsring (Abdurrahman et al., 2020). Masyarakat pun mulai menyadari bahwa rusaknya ekosistem bawah laut berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Sehingga sejak tahun 2008 masyarakat berusaha untuk melakukan pemberdayaan terhadap

cara tangkap yang lebih ramah lingkungan. Meskipun begitu, dalam proses pemberdayaan masih kerap terjadi permasalahan seperti masyarakat yang tidak percaya akan keberhasilan cara yang ramah lingkungan tersebut (Kusuma et al., 2017). Kegiatan ekowisata pun diperkenalkan sebagai aktivitas ekonomi baru kepada masyarakat dan terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga membantu perubahan pola pikir masyarakat untuk merubah cara tangkap mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai program pengembangan pelestarian terumbu karang yang dilakukan di area Pantai Bangsring. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, total manfaat ekonomi dari ekosistem terumbu karang di kawasan Pantai Bangsring mencapai Rp 38,2 Miliar dan 60% dari total manfaat ekonomi tersebut berasal dari pemanfaatan kegiatan wisata (Asadi & Andrimida, 2017). Hal ini membuktikan bahwa pariwisata dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan ketika masyarakat mengerti dan merasakan manfaat dari pentingnya aset lingkungan yang mereka miliki terhadap pariwisata, mereka akan berusaha untuk melindungi aset tersebut (Mustika et al., 2020).

Selain itu, melalui manfaat ekonomi yang diterima dari kegiatan pariwisata juga dapat berkontribusi dalam konservasi habitat dan ekosistem yang khususnya berada di wilayah lindung (Job et al., 2017; Larm et al., 2018). Area konservasi ataupun

kawasan lindung seringkali berada di bawah pengelolaan dan pemeliharaan yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pembiayaan dan kurangnya sistem pengelolaan yang baik bagi konservasi di area tersebut. Dengan pengelolaan yang benar, kegiatan pariwisata dapat memberikan tidak hanya insentif ekonomi tetapi juga memperkuat kelembagaan dari pengelolaan kawasan konservasi (Putri et al., 2021).

Kegiatan pariwisata juga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi gaya hidup yang bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui program pengelolaan limbah atau sampah. Di beberapa daya tarik wisata, masyarakat telah mengemas program Bank Sampah atau daur ulang limbah menjadi suatu paket wisata (Lumeno et al., 2022; Rohani & Purwoko, 2020). Paket wisata ini dapat membantu promosi program daur ulang kepada wisatawan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang dapat diimplementasikan oleh wisatawan di kehidupan sehari-hari.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan perencanaan dan pengelolaan yang bertanggung jawab serta berwawasan lingkungan, pariwisata dapat memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Manfaat tersebut berupa meningkatnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk melestarikan lingkungan, memberikan insentif ekonomi dan memperkuat kelembagaan kawasan konservasi, hingga mempromosikan gaya

hidup yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi wisatawan.

3. Nilai Manfaat Sosial

Pada dasarnya, setiap dampak yang dihasilkan oleh pariwisata mengandung unsur-unsur sosial meskipun dampak tersebut tergolong ke dalam dampak lingkungan maupun ekonomi. Hal ini dikarenakan setiap perubahan yang dibawa oleh kegiatan pariwisata dapat mempengaruhi dan merubah cara hidup masyarakat mulai dari perilaku, gaya hidup, nilai-nilai hingga kualitas hidup masyarakat (Saarinen, 2019). Terlepas dari segala dampak negatif yang timbul dari kegiatan kepariwisataan, masih terdapat banyak manfaat sosial yang dapat dirasakan oleh destinasi wisata, khususnya masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut dapat berupa dan tidak terbatas pada meningkatnya solidaritas dan kerjasama diantara masyarakat, penyetaraan peran bagi segala pihak, diversifikasi lapangan pekerjaan, distribusi pengaruh dan kekuasaan, hingga penguatan organisasi.

Di beberapa daya tarik maupun destinasi wisata, kegiatan pariwisata dapat membangkitkan solidaritas dan kerjasama diantara masyarakat lokal (Rohani & Purwoko, 2020). Hal ini dikarenakan budaya gotong royong yang melekat pada struktur sosial mayoritas masyarakat di Indonesia. Gotong royong sendiri terbukti dapat mempermudah pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat daerah (Nerva, 2018; Rohani & Irdana,

2021). Selain itu, keyakinan masyarakat akan dampak positif yang dapat diberikan oleh kegiatan pariwisata juga mempengaruhi semangat masyarakat untuk bekerjasama dalam membangun dan mengembangkan destinasi mereka. Mengapa demikian? Karena pada saat masyarakat merasa sektor pariwisata belum bisa mendatangkan keuntungan yang signifikan bagi mereka, semangat gotong royong cenderung kurang terlihat (Rohani & Irdana, 2021). Oleh karena itu, pengukuran mengenai ideologi yang telah dibahas sebelumnya cukup penting dalam melihat ketahanan suatu destinasi pariwisata. Pilar tersebut mengukur apakah masyarakat telah memiliki gagasan kolektif yang telah diyakini bersama-sama, dan apakah ide-ide tersebut cukup kuat untuk menjadi tujuan bersama yang menggerakkan masyarakat.

Selain meningkatkan solidaritas dan kerjasama, kegiatan pariwisata juga dapat berperan dalam pengurangan ketidaksetaraan. Penyelenggaraan pariwisata membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi dan gender untuk bersama-sama berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata (Murni et al., 2021). Di beberapa daya tarik wisata, pada umumnya generasi muda diberdayakan melalui Karangtaruna ataupun POKDARWIS. Seringkali mereka juga diberdayakan untuk menjadi pemandu wisata lokal. Pemberdayaan masyarakat juga sering dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan

dan pendampingan dengan mengasah dan memanfaatkan keterampilan yang mereka punya (Scheyvens & van der Watt, 2021).

UNWTO sendiri telah bergabung dengan *UN Women*, *the German Development Agency GIZ*, *World Bank* dan *Amadeus* untuk mendukung tujuan ke-5 dari *UN SDGs*, yakni kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh UNWTO, sebanyak 54% dari total pekerja di bidang pariwisata merupakan perempuan. Namun hal ini tidak memungkiri bahwa perempuan yang bekerja di bidang pariwisata kerap kali menerima pendapatan yang kurang layak. Oleh karena itu, UNWTO merancang 5 tujuan tematik yang diharapkan pariwisata dapat memberikan pekerjaan yang layak bagi perempuan, bisnis pariwisata yang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi perempuan, edukasi dan pelatihan untuk memberdayakan perempuan, pemimpin perempuan di sektor pariwisata direpresentasikan dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah pariwisata memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja secara kolektif demi keadilan dan kesetaraan gender.

Beragamnya pilihan pekerjaan yang timbul karena pariwisata juga dapat mempengaruhi tingkat migrasi di suatu daerah, khususnya di daerah pedesaan. Tingkat urbanisasi atau keluarnya masyarakat desa ke kota dapat menurun ketika

pariwisata mendatangkan prospek ekonomi yang positif. Hal ini dapat membuat generasi muda lebih memilih untuk menjalin karir di tempat asal mereka (Cohen, 1984). Tidak hanya itu, penyelenggaraan pariwisata di destinasi pariwisata juga dapat menarik minat masyarakat dari luar daerah untuk datang bekerja di daerah tersebut (Yusrizal & Asmoro, 2020).

Selanjutnya, pariwisata juga memiliki peran dalam pendistribusian pengaruh dan kekuasaan *stakeholders*. Pariwisata merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Semua pihak harus terlibat dalam suksesnya penyelenggaraan pariwisata mulai dari pemerintah, politisi, bisnis industri dan swasta, akademisi, masyarakat, hingga media (*hexa helix*). Penelitian yang telah dilakukan di Desa Gunungmasigit, Kab.Bandung Barat juga telah merancang strategi pemetaan peran dari setiap *stakeholders* yang terlibat demi sukses nya penyelenggaraan pariwisata di desa tersebut (Sutono, Permana, et al., 2022). Pemetaan peran ini dapat menunjukkan bahwa semua orang memiliki perannya masing-masing dalam penyelenggaraan pariwisata dan memastikan bahwa tidak akan ada pihak yang tertinggal.

Kegiatan pariwisata juga dapat memperkuat pelaksanaan organisasi atau kelembagaan sosial. Dengan peorganisasian yang terstruktur dan baik, dapat memastikan keuntungan yang diterima oleh destinasi pariwisata terdistribusikan dengan baik

kepada masyarakat sesuai porsinya masing-masing. Hal ini dapat membantu pengurangan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat (Rohani & Irdana, 2021).

Perlu diingat juga bahwa persepsi masyarakat akan setiap dampak yang dihasilkan oleh pariwisata dapat berbeda-beda. Apa yang dianggap positif bagi sebagian orang belum tentu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lain (Saarinen, 2019). Oleh karena itu, demi mendatangkan nilai-nilai sosial yang dapat bermanfaat dan diterima oleh masyarakat lokal, pelaksanaan pariwisata harus selalu mempertimbangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Sehingga, pelaksanaan pariwisata dapat terhindar dari penolakan oleh masyarakat dan dapat diterima sebagai solusi dari permasalahan sosial mereka.

4. Nilai Manfaat Budaya

Layaknya manfaat lingkungan, manfaat budaya dari penyelenggaraan pariwisata juga tidak terlepas dari berbagai dampak negatifnya seperti kerusakan situs dan warisan bersejarah hingga eksploitasi dan komodifikasi kebudayaan (Shepherd, 2002). Namun, layaknya manfaat-manfaat lain yang telah dijelaskan pada pembahasan kali ini, pariwisata juga mempunyai manfaat yang dapat berpengaruh dalam kebudayaan suatu destinasi pariwisata.

Sama halnya dengan konservasi lingkungan, pariwisata juga memiliki manfaat bagi konservasi budaya. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya berupa namun tidak terbatas pada peningkatan kesadaran akan pelestarian kebudayaan bagi wisatawan maupun masyarakat, mempromosikan kembali kebudayaan lokal yang mulai terlupakan, akulturasi budaya antara wisatawan dan masyarakat hingga insentif pembiayaan konservasi budaya yang berasal dari keuntungan pariwisata.

Dengan semakin berkembangnya zaman, banyak kebudayaan tradisional yang cenderung terlupakan. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu media untuk mengenalkan budaya-budaya tersebut kepada generasi yang lebih muda. Berbagai macam daya tarik wisata telah memanfaatkan kesempatan ini melalui wisata budaya atau *cultural tourism* (Irindu, 2004). Melalui pariwisata juga, telah banyak kebudayaan Indonesia yang eksistensinya tetap terjaga seperti batik, angklung, hingga pencak silat. Tidak hanya pengenalan kepada wisatawan, wisata budaya juga dapat meningkatkan regenerasi kebudayaan kepada generasi yang lebih muda. Regenerasi ini merupakan hal yang penting dalam menjaga eksistensi suatu budaya. Karena jika suatu budaya tidak diturunkan pada generasi penerus, budaya tersebut akan hilang bersama dengan generasi sebelumnya (Immaculata et al., 2019; Sofyan et al., 2021).

Selain berperan sebagai media untuk mengenalkan kebudayaan kepada generasi yang lebih muda, pariwisata juga berperan dalam mengenalkan suatu kebudayaan kepada cakupan masyarakat yang lebih luas. Di Indonesia sendiri telah banyak kebudayaan yang diperkenalkan kepada masyarakat luas hingga mancanegara. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, telah terdapat warisan budaya Indonesia yang mendapat perhatian Dunia dan diakui sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran wisatawan maupun masyarakat bahwa setiap kebudayaan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya patut untuk dijaga dan dilestarikan.

Pelestarian ini juga berlaku bagi aset-aset budaya tak hidup atau aset benda seperti bangunan dan monumen bersejarah. Walaupun telah terdapat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan aset-aset tersebut, kegiatan pariwisata dapat membantu dalam memberikan informasi akan pentingnya menjaga perilaku di situs tertentu melalui interpretasi wisata. Interpretasi wisata dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai informasi yang belum diketahui oleh wisatawan dan dapat meningkatkan empati mereka terhadap suatu situs warisan budaya. Interpretasi juga dapat membantu menghubungkan kembali hubungan wisatawan dengan masa lalu (Cave & Jolliffe, 2012). Sebuah penelitian di Kota Lama Semarang pada tahun 2016 telah memaparkan data mengenai

nilai guna langsung dari kawasan tersebut melalui manfaat pariwisata sebesar Rp 1,2 Triliun (Cininta et al., 2016). Hal ini tentu saja merupakan sebuah manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan pendapatan asli daerah.

Di beberapa daerah, pemerintah melalui Dinas Pariwisata juga kerap melaksanakan program-program untuk mendukung keberlangsungan pelestarian budaya mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, penyaluran bantuan dana dan stimulant bagi pengelolaan objek wisata, hingga pelaksanaan festival untuk mempromosikan kebudayaan lokal kepada masyarakat yang lebih luas (Fitriana et al., 2020; Simamora et al., 2016).

Dari berbagai manfaat budaya yang dapat dirasakan melalui kegiatan pariwisata, perlu diingat juga bahwa masih terdapat potensi pergeseran nilai-nilai budaya yang dapat dianggap negatif bagi Sebagian orang. Oleh karena itu, untuk menjaga keaslian aset budaya, pelaksanaan pariwisata harus dapat direncanakan dengan baik agar terhindar dari eksploitasi dan komodifikasi budaya yang berlebihan.

5. Nilai Manfaat Pengetahuan

Nilai epistemik atau nilai pengetahuan merupakan jenis nilai yang melekat pada pengetahuan, pemahaman, pembenaran, dan rasa ingin tahu (Greco & Pinto de Sa, 2018; Perrine, 2021). Nilai epistemik sendiri mengarah kepada apakah pengetahuan yang

kita dapat cukup bernilai hingga pengetahuan tersebut dapat menjadi landasan bagi apa yang akan kita lakukan selanjutnya (Mišćević, 2016). Sebagai contoh, kita mendapat pengetahuan mengenai cuaca yang baik untuk menanam tanaman, sehingga kita memutuskan untuk melakukan penanaman di waktu-waktu tertentu berdasarkan cuaca yang baik.

Dalam konteks pariwisata, nilai epistemik seringkali dilihat melalui perspektif wisatawan, di mana beberapa kegiatan wisata tertentu dapat merangsang rasa ingin tahu seseorang dan memotivasi wisatawan untuk memenuhi rasa ingin tahu tersebut. Nilai ini telah menjadi indikator bagi beberapa pengukuran kepuasan dan pengalaman wisatawan (Williams & Soutar, 2009). Sedangkan, literatur mengenai nilai epistemik pariwisata dari perspektif *supply* atau perspektif destinasi sendiri tergolong sedikit.

Dalam penyelenggaraan pariwisata, akan sangat mungkin terjadi adanya pertukaran informasi dan pengetahuan antara masyarakat lokal dan wisatawan (Saarinen, 2019). Namun, penerimaan pengetahuan ini tidak hanya semata-mata berasal dari pengunjung yang datang langsung ke destinasi wisata. Penelitian dan studi yang dilakukan oleh akademisi juga dapat memberikan pengetahuan yang bernilai bagi pengembangan destinasi wisata (Pernecky & Zealand, 2010). Penelitian-penelitian mengenai fenomena pariwisata seringkali dilakukan

dari perspektif pemasaran, perencanaan, pengembangan, hingga pengelolaan. Penelitian dengan perspektif pemasaran seringkali membahas mengenai bagaimana perilaku, pengalaman, dan karakteristik pengunjung yang datang ke suatu destinasi. Pengetahuan dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai landasan bagi destinasi untuk menentukan target pasar dan strategi seperti apa yang harus mereka jalankan untuk meraih target tersebut.

Untuk penelitian dengan perspektif perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pada umumnya memberikan informasi mengenai potensi wisata apa saja yang dapat dikembangkan hingga kekurangan dan ancaman yang mungkin saja dihadapi oleh destinasi wisata. Temuan-temuan dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai landasan bagi destinasi wisata dalam menentukan strategi dan menciptakan inovasi-inovasi untuk membuat destinasi wisata lebih baik lagi. Sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai bagaimana pariwisata dapat meningkatkan pemahaman wisatawan dan masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya. Pemahaman-pemahaman tersebut timbul dari pengetahuan bahwa terdapat beberapa hal yang tidak baik untuk dilakukan karena dampak negatifnya, dan terdapat hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dengan manfaat yang lebih bernilai.

Rasa ingin tahu pun tidak hanya dirasakan oleh wisatawan saja. Masyarakat di destinasi pariwisata tentu juga memiliki rasa ingin tahu untuk menjadi lebih baik. Karena tanpa rasa ingin tahu tidak akan ada keinginan untuk mempelajari dan merespon pengetahuan baru yang timbul dari kegiatan pariwisata. Karena seperti yang disampaikan oleh Inan (2012) bahwa kita dapat peduli dan tertarik akan suatu topik tertentu dan oleh karena itu kita ingin mengetahui lebih jauh mengenai topik tersebut.

Pada intinya, pariwisata merupakan sebuah kegiatan yang dapat mengakomodasi interaksi antara berbagai macam kelompok individu untuk menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang bernilai baik bagi wisatawan maupun masyarakat di destinasi wisata.

BAB V

PENUTUP

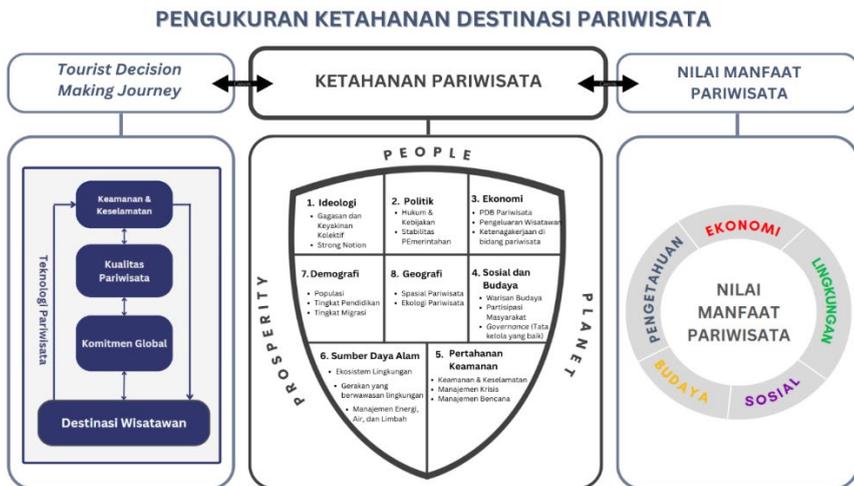
1. KESIMPULAN

Dari apa yang telah dibahas di keempat bab sebelumnya, dapat diketahui dan dinilai seberapa jauh dan seberapa signifikan pengaruh ketahanan sebuah destinasi wisata terutama dalam tujuannya untuk mencapai nilai-nilai manfaat kompleks seperti yang telah dijelaskan di Bab IV. Mengelaborasi konsepsi ketahanan nasional dengan destinasi pariwisata nyatanya berimplikasi cukup luas dan kompleks, karena hal ini akan menyinggung bagaimana bentuk keberlanjutan, daya saing, serta kecerdasan dari destinasi itu sendiri. Begitupun dengan alat/model yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan destinasi yang tentunya perlu melalui pendekatan yang sesuai dan relevan.

Astagatra yang merupakan model pengukuran ketahanan nasional yang dikemukakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI) nyatanya secara komprehensif memiliki nilai-nilai umum namun representatif terhadap segala kepentingan yang diperlukan dalam pembangunan nasional dari segala sektor termasuk pariwisata, dan penjabaran dalam buku ini telah menjadi bukti. Di samping

itu, dari pembahasan yang telah secara rinci tertuang dalam keempat bab sebelumnya, dapat dinilai bahwa Astagatra menjadi jawaban atas kebutuhan akan adanya model/ alat yang dapat mengukur ketahanan destinasi wisata yang sesuai dengan karakteristik destinasi itu sendiri, sehingga tidak akan memunculkan kerancuan ataupun menghasilkan saran/rekomendasi/ hasil evaluasi yang tumpul dan minim kontribus.

Secara sederhana, pendekatan yang dijabarkan dalam buku ini yakni ketahanan destinasi pariwisata berbasis konsep Astagatra dapat divisualisasikan ke dalam satu model utuh berikut:



Gambar 34. Model Pengukuran Destinasi Pariwisata

Sumber: Olahan Penelitian (2022)

Dari gambar di atas, dapat dikatakan bahwasanya bentuk ketahanan destinasi wisata tidak hanya berasal dari sisi internal

dari destinasi tersebut, namun juga hal-hal yang mempengaruhi secara eksternal, yang dalam hal ini terbagi atas proses sebelum terjadinya aktivitas wisata di destinasi melalui proses pengambilan keputusan dalam diri wisatawan terhadap pemilihan destinasi yang akan dikunjungi serta proses setelah aktivitas wisata yang dilakukan yang akan memberikan dampak berupa nilai-nilai manfaat bagi tiap-tiap pemangku kepentingan yang terlibat.

Proses pengambilan keputusan yang secara psikologis akan selalu terjadi dalam diri seorang wisatawan sejatinya dipengaruhi beberapa hal. Adapun hal-hal mendasar yang dianggap berperan dalam pengambilan keputusan dan keyakinan seorang wisatawan terhadap sebuah destinasi wisata (yang dalam hal ini berkonteks negara) ialah bagaimana kondisi keamanan dan keselamatan destinasi tersebut, bagaimana kualitas pariwisata yang diselenggarakan, bagaimana destinasi tersebut mengadopsi komitmen-komitmen kepariwisataan global (seperti kode etik pariwisata global dan *Sustainable Tourism Development Goals*), serta bagaimana kesadaran teknologi dari destinasi tersebut. Hal-hal tersebut nantinya akan berimplikasi pada nilai dari sebuah destinasi dan akan berdampak secara langsung pada ketahanan destinasi itu sendiri.

Secara internal, pengukuran destinasi wisata melalui pendekatan Astagatra tentunya akan berfokus pada delapan pilar

yang selanjutnya melalui penyesuaian dengan konteks destinasi wisata maka kedelapan pilar tersebut diturunkan ke dalam 21 atribut penilaian. Pilar Ideologi berfokus pada bagaimana pengelola destinasi memiliki gagasan/ keyakinan akan upaya membangun ketahanan destinasi. Pilar politik berfokus pada bagaimana dukungan regulasi, hukum, serta stabilitas pemerintahan (atau bisa juga manajemen organisasi pengelola) dalam membangun destinasi. Serta pilar ekonomi yang berfokus pada bagaimana kontribusi pariwisata terhadap pemasukan regional dan nasional, serta faktor penyerapan tenaga kerja.

Berikutnya, kelima pilar diturunkan dari unsur Panca Gatra. Pilar demografi berfokus pada kondisi populasi, tingkat pendidikan serta tingkat migrasi masyarakat. Pilar geografi berfokus pada kondisi dan pengembangan spasial dan ekologi di destinasi. Pilar sosial budaya berfokus pada bagaimana pelibatan masyarakat, tata kelola yang baik, serta upaya preservasi warisan budaya yang ada. Pilar sumber daya alam berfokus pada manajemen lingkungan serta kesadaran akan upaya perservasi lingkungan. Pilar terakhir yakni pertahanan keamana berfokus pada keamanan dan keselamatan termasuk manajemen krisis dan bencana di destinasi.

Dengan seluruh pilar dan atribut yang telah dijabarkan dalam buku ini, tentu harapannya dapat menjadi alat (*tools*) yang dapat secara efektif dan efisien menilai tingkat ketahanan sebuah

destinasi. Implikasi akhirnya ialah terhadap nilai-nilai manfaat (*beneficial values*) yang dapat diterima oleh masing-masing pemangku kepentingan di destinasi baik secara langsung maupun tidak. Adapun nilai-nilai manfaat tersebut antara lain dalam konteks ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan.

2. SARAN

Terakhir, dari kajian yang telah dilakukan dan dibahas secara kompleks di dalam buku ini, maka ada beberapa saran yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait guna memaksimalkan ketahanan destinasi pariwisata. Saran-saran tersebut antara lain:

- a. Akademisi perlu melakukan kajian holistik mengenai strategi pengimplementasian masing-masing pilar maupun turunannya yakni atribut-atribut pengukuran destinasi wisata untuk semua lini kajian bidang kepariwisataan sehingga pengelola destinasi akan terbantu dan memahami seberapa jauh penyesuaian kontekstual yang perlu mereka lakukan. Kajian mengenai bagaimana irisan konseptual dari masing-masing pilar dan atribut dengan disiplin ilmu lain pun diperlukan guna memperluas sanubari keilmuan dalam peningkatan ketahanan destinasi wisata dari lintas disiplin ilmu serta dalam rangka pengembangan konseptualnya.

Terakhir, para akademisi diharapkan dapat menjadi penyuluh dan evaluator bagi pengelola destinasi dan utamanya masyarakat melalui pemberian edukasi.

- b. Pelaku bisnis sejatinya diharapkan dapat menstimulasi terselenggaranya sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di destinasi wisata. Hal ini berkaitan dengan pembahasan pada BAB II yang secara langsung mengkorelasikan secara positif kedua fokus tersebut dengan peningkatan ketahanan destinasi. Para pelaku bisnis juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat di sekitar destinasi wisata sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan antar individu atau rumah tangga yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan ketahanan rumah tangga dan individu itu sendiri. Terakhir dan yang terpenting ialah pelaku bisnis harus memahami dan memastikan bahwa kegiatan bisnis dari unit yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip dari kedelapan pilar ketahanan destinasi sehingga turut menyukseskan upaya untuk mencapai ketahanan destinasi secara utuh.
- c. Pemerintah diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediator dalam penerapan pilar-pilar ketahanan destinasi wisata yang melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah juga perlu memahami penuh seberapa vital konsepsi ketahanan destinasi perlu

dicapai dan mewujudkan pemahaman tersebut ke dalam kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang dapat menyukseskan implementasi kedelapan pilar tersebut.

- d. Masyarakat sebagai tuan rumah di destinasi wisata perlu menjadi aktor yang independen dan secara cerdas meresapi nilai-nilai ketahanan destinasi wisata yang tertuang ke dalam delapan pilar. Penerapan dari skala terkecil dan tersederhana diperlukan bahkan dalam lingkup individu dan rumah tangga. Dari pemahaman tersebut, selanjutnya masyarakat diharapkan dapat meneruskan pemahaman dan kesadarannya terhadap penerapan nilai-nilai ketahanan destinasi kepada wisatawan yang datang. Selain itu, masyarakat sudah seharusnya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata, baik dari proses perencanaan, implementasi, evaluasi, serta pengembangan tahap lanjut sehingga nantinya masyarakat dapat mengelola destinasi wisata dengan swadaya dan swakelola sehingga menciptakan ketahanan mutlak.
- e. Media berperan sebagai sarana informasi yang diharapkan mampu memberikan informasi yang baik secara nasional maupun global kepada seluruh elemen yang akan terlibat berkaitan dengan komitmen yang telah dibentuk oleh seluruh elemen di destinasi wisata bahwasanya ada nilai-nilai yang telah disepakati untuk dicapai guna meningkatkan ketahanan

destinasi tersebut. Media juga berperan sebagai agen publikasi dan promosi nilai kepada khalayak yang lebih luas. Terakhir, media merupakan agen yang nantinya akan mengolektifkan data siklus perkembangan destinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. A., Erwanto, Z., & Fauqho, N. (2020). Pengembangan SEGAR (Sea Garden) dengan Teknologi Puzzle Tetrapod Berbasis Konservasi Ekowisata di Pesisir Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(4), 482–488. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i4.4307>
- Ali, I., & Zhuang, J. (2007). *Inclusive Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications PDF Logo* (97).
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy-Making* (2nd ed.). Holt, Reinhart and Winston.
- Andini, S. A., & Arida, I. N. S. (2019). Pengelolaan Air Limbah Hotel Dan Pemanfaatannya Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan : Studi Kasus Pada Pengelolaan Air Limbah Lagoon, ITDC, Nusa Dua. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2), 339–343.
- Anindhito, B., Ridlo, M. A., & Rahman, B. (2022). Analisis Wilayah Rawan Bencana Longsor dan Pemilihan Rute Evakuasinya pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Semarang. *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA*, 7(Kimu 7), 1–10.
- Arifia, D., Rahmafritria, F., & Nurazizah, G. R. (2022). Kesesuaian Lahan untuk Wisata Alam di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. *Media Komunikasi Geografi*, 23(1), 93–110. <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.41419>
- Arjana, I. G. B. (2015). *GEOGRAFI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF*. Rajawali Pers.
- Asadi, M. A., & Andrimida, A. (2017). Economic Valuation of Coral Reefs Ecosystem of Bangsring, Banyuwangi, Indonesia. *Economic and Social of Fisheries and Marine*, 004(02), 144–152. <https://doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2017.004.02.04>

- ASEAN. (2016). *ASEAN Community Based Tourism Standard*.
- Badan Pusat Statistika. (2021). *Statistik Wisatawan Nusantara 2021*.
<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NjNmZWE1NDZjMjhiOGViMmMzYzcxMDA0&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMDkvMjYvNjNmZWE1NDZjMjhiOGViMmMzYzcxMDA0L3N0YXRpc3Rpay13aXNhGF3YW4tbnVzYW50YXJhLTIwMjEuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMjY0wMi0wMSAyMD0MjoxOQ%3D%3D>
- Bahar, A., & Tambaru, R. (2011). Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Wisata Bahari Polman- UNRI*, 1–18.
<http://repository.unhas.ac.id>
- BAPPENAS. (2018). *Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia*.
<https://bappenas.go.id/berita/84-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-mengentaskan-kemiskinan-dan-ketimpangan-di-indonesia-epTex>
- Blackburn, S. (2005). *The Oxford Dictionary of Philosophy* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Bodin, P., & Wiman, B. (2004). *Resilience and other stability concepts in ecology: Notes on their origin, validity, and usefulness* (2nd ed.) (Bodin, P.). ESS Bulletin.
- Boschma, R. (2015). Towards an Evolutionary Perspective on Regional Resilience. *Regional Studies*, 49(5), 733–751.
- BPS. (2014). *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan, 2000-2014*.
- BPS. (2020). *Profil Migran: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019*.
- BPS. (2022). *Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan) 2022*.

- Budiman, S. (2017). ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK : STUDI PEMBENTUKAN UU NO . 14 TAHUN 2008. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2), 109–119.
- Buhalis, D. (1998). Strategic use of information technologies in the tourism industry. *Tourism Management*, 19(5), 409–421.
- Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2014). *Smart Tourism Destinations*. IFITT.
- Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J. M., & Abel, N. (2001). From Metaphor to Measurement: Resilience of What To What? *Ecosystems*, 4(8), 765–781.
- Cave, J., & Jolliffe, L. (2012). Visitor Interpretation , Key Concepts in Tourism. *Tourism: The Key Concepts*, July, 273–275.
- Chan, C. S., Nozu, K., & Zhou, Q. (2022). Building destination resilience in the tourism disaster management process from the past experiences: The case of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi earthquake in Japan. *Tourism Recreation Research*, 47(5–6), 527–543.
<https://doi.org/10.1080/02508281.2021.1881707>
- Cignoni, P., & Scopigno, R. (2008). Sampled 3D models for CH applications. *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.1145/1367080.1367082>
- Cininta, I., Subiyanto, S., & Amarrohman, F. (2016). Analisis Nilai Ekonomi Kawasan Menggunakan Travel Cost Method (Tcm) Dan Contingen Valuation Method (Cvm) Untuk Pembuatan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan Dengan Sig (Studi Kasus : Kawasan Kota Lama Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, 5(4), 207–214.
- Çınar, K., & Şener, G. (2021). *Impact of Crises on the Tourism Industry: Evidence from Turkey*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/978-1-80071-070->

- Cohen, E. (1984). The sociology of tourism: approaches, issues, and findings. *Annual Review of Sociology*. Vol. 10, March, 373–392. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.10.1.373>
- Craven, R., & Hirnle, C. (2013). *Fundamentals of nursing, human health and function* (7th ed.). Lippincott.
- Dabbous, M. (2022). *2022 FIFA World Cup*. Getty Image. <https://www.gettyimages.ca/detail/news-photo/view-of-al-bayt-stadium-and-a-fifa-world-cup-ahead-of-the-news-photo/1244601594?adppopup=true>
- Dahniel, D. (2022). *Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Tak Benda*. Creative Common. <https://production.openverse.org/image/23102a36-4922-415c-a78d-d4b664499aef>
- Darsoprajitno, S. (2021). *Ekologi Pariwisata: Tata Laksana Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata* (Digital). ANGKASA CV.
- Davoudi, S. (2012). Climate risk and security: New meanings of 'the environment' in the English planning system. *European Planning Studies*, 20(1), 49–69.
- Dewaele, L., & Lucas, R. (2022). Policymaking to support resilience in democratic countries: an examination of Sweden, Israel, and Australia. *European Journal of Future Research*, 10(1), 1–9.
- Dieffenbacher, S. (2022). *What is Digital Maturity, How to Measure, Tools & Models*. <https://digitalleadership.com/blog/digital-maturity/>
- Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. (2021). *RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2022 - 2052* (Issue 67).

- Driven. (2021). *National Resilience Index -- Australia 2021 Report*.
Driven.
- Duval, D. T. (2004). Linking return visits and return migration among Commonwealth Eastern Caribbean migrants in Toronto. *Global Networks*, 4(1), 51–67.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2004.00080.x>
- Dyer, P., Gursoy, D., Sharma, B., & Carter, J. (2007). Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. *Tourism Management*, 409–422.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2005). *Kamus Inggris - Indonesia*. Gramedia.
- Fasa, A. W., Berliandaldo, M., & Andriani, D. (2022). IMPLIKASI PERAN DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION (DMO) -DESTINATION GOVERNANCE (DG) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas, Dan Perjalanan*, 21(2), 111–127.
- Faulkner, B. (2001). Towards a framework for tourism disaster management. *Tourism Management*, 22(2), 135–147.
[https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00048-0](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00048-0)
- Fesenmaier, D. R., Gretzel, U., Lee, Y. J., & Yoo, K. H. (2009). Trust in Travel-related Consumer Generated Media. In W. Höpken, U. Gretzel, & R. Law (Eds.), *Information and Communication Technologies in Tourism 2009*. SpringerWienNewYork.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/978-3-211-93971-0_5
- Fitriana, Hilman, Y. A., & Triono, B. (2020). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899>

- Garrido, A. (2022). *Principles of Sustainable Tourism and Sustainable Development Goals*.
<https://alexandregarrido.blog/2018/09/29/principles-of-sustainable-tourism-and-sustainable-development-goals/>
- Ghaderi, Z., Som, A. P., & Wang, J. (2014). Organizational Learning in Tourism Crisis Management: An Experience From Malaysia. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 31(5), 627–648.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., & Meijers, E. (2007). *Smart cities: Ranking of European medium*. Centre of Regional Science (SRF) Vienna University of Technology.
- Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. (2012). *Tourism: Principles, practices, philosophy (12th ed.)*. Wiley.
- Greco, J., & Pinto de Sa, L. (2018). Epistemic value. In *Routledge Encyclopedia of Philosophy*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/0123456789-P073-1>
- Gregoric, M. (2014). *PESTEL ANALYSIS OF TOURISM DESTINATIONS IN THE PERSPECTIVE OF BUSINESS TOURISM (MICE) Conference paper*. 551–565.
- Griffin, T. (2013). Research Note : A Content Analysis of Articles on Visiting Friends and Relatives. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 22(7), 781–802.
<https://doi.org/10.1080/19368623.2012.708960>
- Griffin, T., & Dimanche, F. (2017). Urban tourism : the growing role of VFR and immigration. *Journal of Tourism Futures*, July. <https://doi.org/10.1108/JTF-10-2016-0036>
- Gunasekara, I. (2008). *A Study on Impacts of Unplanned Tourism Development – with reference to Negombo Tourism Hub , Sri Lanka*. 10, 58–61.
- Gupta, J., Pouw, N., & Ros-Tonen, M. (2015). Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development. *European*

Journal of Development Research, 27, 541–559.

- Hajibaba, H., Karlsson, L., & Dolnicar, S. (2016). Residents Open Their Homes to Tourists When Disaster Strikes. *Journal of Travel Research*, 56, 8.
- Hall, C. M., & Müller, D. (2018). Second Home Tourism: An Introduction. In C. M. Hall & D. Müller (Eds.), *The Routledge Handbook of Second Home Tourism and Mobilities* (1st ed., p. 384). Routledge.
- Hall, M. P., Lewis-Junior, N. A., & Ellsworth, P. C. (2018). Believing in climate change, but not behaving sustainably: Evidence from a one-year longitudinal study. *Journal of Environmental Psychology*, 56, 55–62.
- Hartman, S. (2018). Resilient tourism destinations? Governance implications of bringing theories of resilience and adaptive capacity to tourism practice. In E. Innerhofer, M. F. Innerhofer, & H. Pechlaner (Eds.), *Destination Resilience* (p. 11). Routledge.
- HelloLampPost. (2022). *What is Smart Tourism (and Why Does it Matter)?* <https://www.hlp.city/blog/what-is-smart-tourism>
- Hidayatullah, H., Khakhim, N., & Kurniawan, A. (2021). Evaluasi Kesesuaian dan Daya Dukung Lahan untuk Pengembangan Pariwisata di Wilayah Kepesisiran Pulau Breuh. *Media Komunikasi Geografi*, 22(1), 19. <https://doi.org/10.23887/mkg.v22i1.30502>
- Holling, C., & Gunderson, L. (2002). Resilience and Adaptive Cycles. In C. S. Gunderson & C. S. Holling (Eds.), *Panarchy: Understanding Transformation in Human and Natural Systems*. Island Press.
- ILO. (2017). *ILO Guidelines on Decent Work and Socially Responsible Tourism*. PRODOC.
- Immaculata, Wardani, L. K., & Frans, S. M. (2019). Implementasi Konsep Eksistensi, Inovasi, Regenerasi pada Interior Pusat

Komunitas Ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara di Surabaya. *Dimensi Interior*, 17(1), 10–17.
<https://doi.org/10.9744/interior.17.1.10-17>

Inan, I. (2012). *The Philosophy of Curiosity* (1st ed.). Routledge.

Indonesia.Travel. (2021). *10 Alasan Kenapa Kamu Harus Mengunjungi Taman Nasional Komodo*.
<https://www.indonesia.travel/id/id/ide-liburan/10-alasan-kenapa-kamu-harus-mengunjungi-taman-nasional-komodo>

Irindu, E. M. (2004). The role of tourism in the conservation of cultural heritage in Kenya. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 9(2), 133–150.
<https://doi.org/10.1080/1094166042000233658>

IRENA. (2014). *Renewable Energy Opportunities for Island Tourism*. August, 72.

Isabella. (2017). Strengthening The National Resilience of Indonesia Through Socialization of National Insight. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 163, 224–228.

JADESTA. (2022). *Desa Wisata Penglipuran*.
<https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/penglipuran>

Job, H., Becken, S., & Lane, B. (2017). Protected Areas in a neoliberal world and the role of tourism in supporting conservation and sustainable development: an assessment of strategic planning, zoning, impact monitoring, and tourism management at natural World Heritage Sites. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(12), 1697–1718.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1377432>

Kachniewska, M. (2006). *Tourism Quality Management* (1st ed.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych.

Kalf, J., & Weernink, M. (2016). (2016). *Asia-Pacific: many risks but no new Asian crisis in the making*. Rabo Research -

- Economic Research; Asia-Pacific: many risks but no new Asian crisis in the making. Retrieved from Rabo Research - Economic Research.
<https://economics.rabobank.com/publications/2016/february/asia-pacific-many-risks-but-no-new-asian-crisis-in-the-making/>
- Karsono. (1999). *Kewiraan: Tinjauan strategis dalam berbangsa dan bernegara*. Gramedia.
- Kemenparekraf. (2022a). *Ayo, Daftar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022!* <https://www.indonesia.travel/id/id/ide-liburan/ayo-daftar-anugerah-desa-wisata-indonesia-2022>
- Kemenparekraf. (2022b). *Berkenalan dengan 5 Destinasi Super Prioritas Indonesia*. <https://info5dsp.kemenparekraf.go.id/>
- Kemenparekraf RI. (2020). *Noken sebagai Warisan Budaya Tak Benda asal Papua*. Instagram.
https://www.instagram.com/p/CIDaiQ7B-1R/?utm_source=ig_web_copy_link
- Kemenparekraf RI. (2022). *Lima Pilar Aksi Jadi Fokus Utama Pembahasan “The 1st Tourism Working Group” pada KTT G20*. <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/lima-pilar-aksi-jadi-fokus-utama-pembahasan-the-1st-tourism-working-group-pada-ktt-g20/>
- Kimhi, S., Eshel, Y., Lahad, M., & Leykin, D. (2019). National Resilience: A New Self-Report Assessment Scale. *Community Mental Health Journal*, 55(5), 721–731.
- Kurniawan, A., & Syafitri, W. (2018). Determinan Pengangguran Penduduk Migran Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
https://www.academia.edu/download/60502281/Determinan_Pengangguran_Penduduk_Migran_di_Provinsi_Kepulauan_Riau20190905-68240-1g86sz.pdf
- Kusuma, U. A., Satria, D., & Manzilati, A. (2017). Modal sosial dan ekowisata : Studi Kasus Di Bangsring Underwater,

Kabupaten Banyuwangi. *Jiep*, 17(2), 1–30.

- Larm, M., Elmhagen, B., Granquist, S. M., Brundin, E., & Angerbjörn, A. (2018). The role of wildlife tourism in conservation of endangered species: Implications of safari tourism for conservation of the Arctic fox in Sweden. *Human Dimensions of Wildlife*, 23(3), 257–272.
<https://doi.org/10.1080/10871209.2017.1414336>
- Leung, Y., Spenceley, A., Hvenegaard, G., Buckley, R., & Groves, C. (2018). Tourism and visitor management in protected areas : guidelines for sustainability. In *Tourism and visitor management in protected areas : guidelines for sustainability* (Issue 27). <https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2018.pag.27.en>
- Li, J., Weng, G., Pan, Y., Li, C., & Wang, N. (2021). A scientometric review of tourism carrying capacity research: Cooperation, hotspots, and prospect. *Journal of Cleaner Production*, 325, 127–137.
- Logan, W. S. (2007). Closing Pandora’s Box: Human Rights Conundrums in Cultural Heritage. In H. Silverman & D. F. Ruggles (Eds.), *Cultural heritage and human rights*. Springer.
- Lopez de Avila, A. (2015). Smart destinations: XXI century tourism. In I. Tssyadiah & Alessandro Inversini (Eds.), *Information and Communication Technologies in Tourism 2015*. Springer.
- Lukito, L. (2022). *Kontribusi Industri Pariwisata Terhadap Pembangunan Indek Manusia*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Lumeno, S. S., Warouw, F. F., Kembuan, D., & Ratu, R. (2022). Analysis of Waste Bank Management Model Around Lake Tondano Tourism Object in Supporting Sustainable Tourism Development. *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 5(3), 317–328.
<https://doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v5i3.14450>

- Lyons, T.-L. (2015). Bright ideas for clear water. *Australasian Leisure Management*, 108.
<https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.964526940349669>
- Mangindaan, J. M. P., & Krityakierne, T. (2018). Analysis of international visitor arrivals in Bali: Modeling and forecasting with seasonality and intervention. *Journal of Physics: Conference Series*, 1132(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1132/1/012069>
- Manyena, S. B. (2006). The Concept of Resilience Revisited. *Disasters*, 30, 433–450.
- Marcussen, C. H. (2011). Determinants of Tourist Spending in Cross-Sectional Studies and at Danish Destinations. *Tourism Economics*, 17(4), 833–855.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5367/te.2011.0068>
- Margosi, M., Palaiogiannis, F., Vasilakis, A., & Koukoufakis, G. (2022). *ENERGY, TOURISM, AND COVID-19: An Analysis of Energy Consumption in EU Islands During The Pandemic*. Publications Office of the European Union.
<https://doi.org/10.2760/63482>
- Martono, & Harjito. (2010). *Manajemen Keuangan*. Ekonesia.
- Masterson, V. (2022). (2022). *How quickly is tourism recovering from COVID-19?*
<https://www.weforum.org/agenda/2022/03/europe-tourism-has-slow-pandemic-recovery/>
- McLeod, B., & Busser, J. A. (2014). Second homeowners hosting friends and relatives. *Annals of Leisure Research*, 17(1), 86–96. <https://doi.org/10.1080/11745398.2014.888955>
- McLeod, S. (2007). *Maslow's Hierarchy of Needs*. Simply Psychology.
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Membangkitkan Pariwisata Indonesia Pasca Covid-19*.

- MIŠČEVIĆ, N. (2016). Epistemic Value. Curiosity, Knowledge and Response-Dependence. *Croatian Journal of Philosophy*, XVI(48), 393–418.
- Mitroff, I., Pearson, C. and Pauchant, T. (1992). Management and Strategic Management: Similarities, Differences and Challenges. In P. Shrivastava, A. Huff, & J. Dutton (Eds.), *Advances in Strategic Management*. JAI Press Inc.
- Mkono, M., & Hughes, K. (2020). Eco-guilt and eco-shame in tourism consumption contexts: understanding the triggers and responses. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(8), 1223–1244. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1730388>
- Morgenthau, H. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf. Inc.
- Murdana, I. M. (2011). PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU GILI TRAWANGAN BERBASIS EKOWISATA BAHARI. *Media Bina Ilmiah*, 5(4), 39–48. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Murni, N. G. N. S., Ruki, M., & Antara, D. M. S. (2021). Model of Gender Equality in International Chain Hotels to Support Sustainable Tourism in the Nusa Dua Tourism Area. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 442–447. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.086>
- Muspiroh, N. (2013). INTEGRASI NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN IPA (Perspektif Pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(3), 484–498.
- Mustika, P. L. K., Ichsan, M., & Booth, H. (2020). The Economic Value of Shark and Ray Tourism in Indonesia and Its Role in Delivering Conservation Outcomes. *Frontiers in Marine Science*, 7(April). <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00261>
- Nahak, P. G., Bria, M., & Mauta, M. C. H. (2019). Studi

- Penanganan Kerusakan Pantai Di Kawasan Wisata Pesisir Teluk Kupang. *JUTEKS - Jurnal Teknik Sipil*, 3(2), 301. <https://doi.org/10.32511/juteks.v3i2.284>
- Narasoma, Z. K. (2021). Dampak Pariwisata Bukit Mangunan Terhadap Status Sosial-Ekonomi Masyarakat. *Populika*, 7(2), 153–166. <https://doi.org/10.37631/populika.v7i2.341>
- Nasution, T. (2021). Kebijakan Pariwisata Indonesia Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analis Kebijakan*, 5(2), 149–165. <https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.487>
- Nerva, A. (2018). Upaya Penguatan Gotong Royong dalam Menunjang Kegiatan Wisata Petik Strawberry (Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 115–120.
- Niemisalo, N. (2014). *Briefing Note Tourism Safety and Security : Findings from Tourism Intensive Finnish Lapland*. 2013(50).
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta.
- Nugroho, S. (2019). BASIS IDEOLOGI PRAKTIK PARIWISATA: SEBUAH TINJAUAN FILSAFAT. In I. N. S. Arida & N. K. Arismayanti (Eds.), *Paradigma dan Kebijakan Pariwisata* (pp. 35–56). Cakra Pres.
- O’Keefe, R., Musayev, T., Péron, C., Tofiq Musayev, Ferrari, G., & UNESCO. (2016). *Protection of Cultural Property: Military Manual*. <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/MilitaryManuel-En.pdf>
- OECD. (2020). *A systemic resilience approach to dealing with Covid-19 and future shocks*. <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/a-systemic-resilience-approach-to-dealing-with-covid-19-and-future-shocks-36a5bdfb/>
- Olya, H., & Mehran, J. (2017). Modelling tourism expenditure

- using complexity theory. *Journal of Business Research*, 75, 147–158.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.015>
- Pernecky, T., & Zealand, N. (2010). The Being of Tourism. *The Journal of Tourism and Peace Research*, 1(1), 1–15.
- Perrine, T. (2021). Conceptions of Epistemic Value. *Episteme*, 1–19. <https://doi.org/DOI: 10.1017/epi.2021.17>
- Prasetyo, D., & Ahmad, H. (2021). Menguatkan Karakter Ecology Citizenship Masyarakat Melalui Aktivitas Ecotourism. *INTEGRALISTIK*, 32(2).
- Prayitno, & Trubus. (2013). *Pendidikan KADEHAM Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Trisakti.
- Pristiwasa, I. W., & Zahari, Z. (2022). *PARIWISATA SEBAGAI MODEL, SISTEM DAN PRAKTIK* (1st ed.). Pradina Pustaka.
- Putra, A. P., Wijayanti, T., & Prasetyo, J. S. (2017). Analisis Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi. *Journal of Tourism and Creativity*, 2(1), 141.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/tourismjournal/article/view/13833>
- Putranto, A. D., Alianto, B., Sumarman, Sembiring, J. D., Suprpto, H., Wetik, A. ., & Haryo, K. (2017). *Materi Pokok Bidang Studi Ideologi* (Direktorat Materi Pendidikan & Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional (eds.)). LEMHANNAS RI.
- Putri, V. S., Ibrahim, & Febrian, L. (2021). *KONSERVASI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT MANGKOL Veggy Shintya Putri , Ibrahim dan Luna Febriani Universitas Bangka Belitung Diterima : Abstrak Direvisi : Disetujui : Peluang dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Pendahuluan. 1*, 491–498.
- Radu, M. (2015). Political Stability - A Condition for Sustainable

Growth in Romania? *Procedia Economics and Finance*, 30(15), 751–757. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01324-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01324-6)

Ramadhian, N. (2021). *ITDC Tingkatkan Tata Kelola Protokol Kesehatan di Nusa Dua Bali*. <https://travel.kompas.com/read/2021/07/16/200700827/itdc-tingkatkan-tata-kelola-protokol-kesehatan-di-nusa-dua-bali?page=all>

Rasool, H., Maqbool, S., & Tarique, M. (2021). The Relationship between Tourism and Economic Growth among BRICS Countries: a Panel Cointegration Analysis. *Future Business Journal*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s43093-020-00048-3>

ResilientTourism. (2022). *Resilient Tourism*. <https://www.resilienttourism.com/>

Richards, G. (2003). What is Cultural Tourism? In V. Maaren (Ed.), *Erfgoed voor Toerisme*. National Contact Monumenten.

Rini, D. L., & Tambunan, T. T. (2021). Inclusive Economic Growth of Indonesia and Its Determinants-Recent Evidence with Provincial Data. *Asian Journal of Interdisciplinary Research*, 4(1), 85–94.

Ritchie, B. (2008). Tourism Disaster Planning and Management: From Response and Recovery to Reduction and Readiness. *Current Issues in Tourism*, 11(4), 315–348. <https://doi.org/10.2167/cit-0389.0>

Rohani, E. D., & Irdana, N. (2021). Dampak Sosial Budaya Pariwisata: Studi Kasus Desa Wisata Pulesari dan Desa Ekowisata Pancoh. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8, 128. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2021.v08.i01.p07>

Rohani, E. D., & Purwoko, Y. (2020). Dampak Sosial Pariwisata Terhadap Masyarakat Desa Ekowisata Pampang Gunung Kidul Menuju Desa Ekowisata Berkelanjutan. *Jurnal*

- Sosiologi Reflektif*, 14(2), 237.
<https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1853>
- Rosy, T., & Handayani, F. (2022). Tourism for Economic Recovery in Central Kalimantan: Simulation Using Input-Output Table. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 5(1), 1–7.
- Ryu, S. J. (2005). Political Instability and Its Effects on. *School of Hospitality, Tourism and Marketing, Hall 1996*, 1–14.
- Saarinen, J. (2019). Communities and sustainable tourism development: community impacts and local benefit creation in tourism. In S. F. McCool & K. Bosak (Eds.), *A Research Agenda for Sustainable Tourism* (pp. 206–223). Edward Elgar Publishing (in press).
<https://doi.org/10.4337/9781788117104.00020>
- Sanchez-Canizares, S. M., Lopez-Guzman, T. J., & Reis, H. (2011). *Education of Human Capital as a Source of Competitiveness in Tourist Destinations* (Á. Matias, P. Nijkamp, & M. Sarmiento (eds.)). Physica-Verlag HD.
<https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2725-5>
- Santana, G. (2004). Crisis management and tourism. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 15(4), 299–321.
<https://doi.org/10.1300/J073v15n04>
- Scheyvens, R., & van der Watt, H. (2021). Tourism, empowerment and sustainable development: A new framework for analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 13(22).
<https://doi.org/10.3390/su132212606>
- Schleicher, A. (2021, December). *Balancing the urgent and the important is key to resilience in education*.
<https://oecdeditoday.com/balancing-urgent-important-key-resilience-education/>
- Setiani, W., Dian, & Darsono, D. (2011). DAMPAK PARIWISATA TERHADAP PELUANG USAHA DAN KERJA LUAR PERTANIAN DI DAERAH PESISIR Impact

Tourism on Off Farm Business and Employment Opportunities in Coastal Area. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi*, 05(03), 1978–4333.

[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=350299&val=223&title=DAMPAK PARIWISATA TERHADAP PELUANG USAHA DAN KERJA LUAR PERTANIAN DI DAERAH PESISIR](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=350299&val=223&title=DAMPAK%20PARIWISATA%20TERHADAP%20PELUANG%20USAHA%20DAN%20KERJA%20LUAR%20PERTANIAN%20DI%20DAERAH%20PESISIR)

- Shanker, D. (2008). *ICT and Tourism: Challenges and Opportunities*. IIMK.
- Shepherd, R. (2002). Commodification, culture and tourism. *Tourist Studies*, 2(2), 183–201.
- Shin, G.-W., & Choi, J. N. (2015). *Global Talent: Skilled Labor as Social Capital in Korea*. Stanford University Press.
- Simamora, R. K., Rudi, D., & Sinaga, S. (2016). Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(1), 79–96.
- Skousen, K. F., Stice, E. K., & Stice, J. D. (2007). *AKUNTANSI KEUANGAN BUKU 1* (1st ed.). Salemba Empat.
- Sofyan, A. N., Sofianto, K., Sutirman, M., & Suganda, D. (2021). Regenerasi Kearifan Lokal Kesenian Lebon Sebagai Budaya Leluhur Pangandaran, Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 23(2), 158. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i2.24855>
- Spicker, P. (2019). Substantive collectivism: collectivism in practice. In P. Spicker (Ed.), *Thinking Collectively: Social Policy, Collective Action and the Common Good* (p. 0). Policy Press. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447346890.003.0001>
- Srijanti. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan di PT: Mengembangkan Etika Berwarga*. Penerbit Salemba Empat.
- Sugiarto, I., & Taufik, M. (2012). *Hukum dan Kebijakan Publik*. In

Kebijakan Publik Deliberatif. Tanah Air Beta Grafika.

- SULLIVAN, A. M. (2016). Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past. *THE JOHN MARSHALL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW*.
<https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=ripl>
- Sunariyah. (2011). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (4th ed.). Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Sunarso. (2008). *Pendidikan kewarganegaraan*. UNY Press.
- Sunlu, U. (2003). Environmental impacts of tourism. In D. Camarda & L. Grassini (Eds.), *Local resources and global trades: Environments and agriculture in the Mediterranean region* (Vol. 57, pp. 263–270). CIHEAM.
<http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=4001977><http://www.ciheam.org/>
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik* (1st ed.). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutantri, L., & Wijaya, I. N. S. (2021). Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Di Kecamatan Ubud. *Planning for Urban Region and ...*, 10(0341), 113–124.
<https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/85%0Ahttps://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/viewFile/85/56>
- Sutono, A. (2016). *MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN TINGGI BIDANG PARIWISATA*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sutono, A. (2020). *Pariwisata dan Ketahanan Nasional: Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis Penta Helix Guna Peningkatan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional* (M. Hanafi & H. Darmawan (eds.)). UPI Press.
- Sutono, A., Pah, J. G., & Aldora, M. (2021). *Digital Maturity:*

Manajemen Sumber Daya Manusia pada Theme Park. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

- Sutono, A., Permana, O., Fawwaz, M. A., Dewi, D. A. K., Maulida, M., Annisa, R. N., & Esarani, V. (2022). THE EXPLORATION OF GEOTOURISM VILLAGE: THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN MANAGING THE PRODUCT. In I. B. P. Puja, J. Pyke, M. R. Bin Zaini, F. C. Chong, I. H. H. Sihombing, I. G. N. A. Suprastayasa, I. G. A. G. Witarsana, N. M. Suastini, & P. A. Aryasih (Eds.), *The 2nd International Hospitality Entrepreneurship and Innovation Conference 2022* (pp. 517–531). Pusat Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Bali.
- Sutono, A., Rachmat, E. F., & Hutahaean, R. (2021). Overtourism Phenomenon at Borobudur Temple Based on The Penta Helix Perspectives. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 5(1), 48–57.
<https://doi.org/10.34013/jk.v5i1.263>
- Sutono, A., Rahtomo, W., Sumaryadi, Puksi, F., F., Permana, O., Tahir, S., & Li, L. (2022). Smart Halal Destination Ecosystem Model: Measurement and. *International Journal on Recent Trends of Business and Tourism*, 6(4), 1–12.
- Tanselle, G. T. (1998). *Literature and artifacts*. Bibliographical Society of the University of Virginia.
- Tarlow, P. E. (2014). *Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel risk and Safety*. Elsevier.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). *Economic Development. Economic Development (Elevent)*.
- Tosun, C., & Timothy, D. J. (2003). Arguments for community participation in the tourism development process. *The Journal of Tourism Studies*, 14, 2–15.
- Toubes, D., Vila, N. A., & Brea, J. A. F. (2021). Changes in

- consumption patterns and tourist promotion after the COVID-19 pandemic. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 16(5), 1332–1352.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jtaer16050075>
- Trimurti, C. P., Utama, I. G., Turker, S. B., & Krismawintari, N. P. (2021). *The Measurement Indicator of Quality Tourism from Bali Stakeholder Destination Perspective*. Technium Conference.
- Türker, M. F., Aydın, İ. Z., & Aydın, T. (2014). Ecotourism Activities for Sustainability and Management of Forest Protected Areas: A Case of Camili Biosphere Reserve Area, Turkey BT - Designing Low Carbon Societies in Landscapes. In N. Nakagoshi & J. A. Mabuhay (Eds.), *Designing Low Carbon Societies in Landscapes* (pp. 253–269). Springer Japan. https://doi.org/10.1007/978-4-431-54819-5_15
- UNEP. (2005). *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers Economic*.
- UNEP. (2017). *Green Economy*.
<https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.
- UNESCO Institute for Statistics. (2009). UNESCO Framework for Cultural Statistics. In *Journal of Cultural Economics* (Vol. 5, Issue 2).
- United Nations. (2021). *System of Environmental-Economic Accounting*. https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf
- UNWTO. (1997). *Tourist Safety and Security: Practical Measures for Destinations*.
- UNWTO. (2018). *Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism Consultation Draft* (Issue October).

http://statistics.unwto.org/sf_mst

- UNWTO. (2022). *G20 Bali Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents: A People-centred Recovery*.
- UNWTO, & ILO. (2014). *Measuring Employment in the Tourism Industries: Guide with Best Practices*.
- UNWTO, & UNEP. (2005). *Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers*.
- Vesić, M. (2017). Weekend tourism and unplanned construction in Deliblato Sands. *Zbornik Radova - Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 65-1a*, 419–432.
<https://doi.org/10.5937/zrgfub1765419v>
- Vrdoljak, A. F. (2017). Indigenous peoples, intangible cultural heritage and participation in the United Nations. In *Intellectual Property, Cultural Property and Intangible Cultural Heritage* (pp. 50–66). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315714288-3>
- Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems. *Ecology and Society*, 9(2), 5–15.
- Wearing, S., & Neil, J. (2009). *Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities?* (2nd ed.). Routledge.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- WEF. (2019). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019*.
- Weichselgartner, J. (2001). Disaster mitigation: The concept of vulnerability revisited. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 10(2), 85–94.
<https://doi.org/10.1108/09653560110388609>
- Williams, A. M., & Hall, C. M. (2000). Tourism and migration: New relationships between production and consumption.

- Tourism Geographies*, 2(1), 5–27.
<https://doi.org/10.1080/146166800363420>
- Williams, P., & Soutar, G. N. (2009). Value, Satisfaction and Behavioral Intentions in an Adventure Tourism Context. *Annals of Tourism Research*, 36(3), 413–438.
<https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.02.002>
- Williams, S. (2009). Tourism Geography. In *Tourism Geography* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203877555>
- Wiyono, S. (2015). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Gramedia.
- Wober, K. (2003). Information supply in tourism management by marketing decision support systems. *Tourism Management*, 24(3), 241–255.
- WTTC. (2022). *Travel and Tourism Economic Impact 2022: Global Trends*. World Travel and Tourism Council.
- Wu, Z., Lai, I. K., & Tang, H. (2021). Evaluating the Sustainability Issues in Tourism Development: An Adverse-Impact and Serious-Level Analysis. *SAGE Open*, 1–14.
- Wuleka Kuuder, C.-J., Bagson, E., Prempeh, V. M., Mumuni, A., Adongo, R., & Amoako, E. E. (2013). Energy, Water and Waste Management in the Accommodation Sector of Tamale Metropolis, Ghana. *American Journal of Tourism Management*, 2013(1A), 1–9.
<https://doi.org/10.5923/s.tourism.201304.01>
- Yusrizal, F., & Asmoro, A. Y. (2020). Dampak Sosial Budaya Pariwisata: Masyarakat Majemuk, Konflik dan Integrasi Sosial di Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 92–105.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/8559>
- Zainuri, Priyono, T. H., & Varazizah, A. (2021). Dampak Pariwisata Terhadap Tingkat Kemiskinan di Lima Negara ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 8(2), 138.

<https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i2.26771>

Zirulia, L. (2011). Competition Between and Within Tourist Destinations. In Á. Matias, P. Nijkamp, & M. Sarmiento (Eds.), *Tourism Economics: Impact Analysis* (pp. 31–42). Physica-Verlag HD. <https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2725-5>